

Mei 2025
Nomor 19

Makalah Kerja Akuntabilitas



Mengangkat Suara Rakyat: Pekerja Perikanan Berkumpul dan Berorganisasi untuk Memperjuangkan Hak serta Perikanan Berkelanjutan

*Pembelajaran dari Ekuador, Ghana, Indonesia,
Meksiko, Taiwan, dan Thailand*

Judy Gearhart dan Connor Moynihan



Tentang ARC

Pusat Penelitian Akuntabilitas (*Accountability Research Center, ARC*) berpusat di Sekolah Layanan Internasional di American University. ARC menjembatani perspektif penelitian dan berada di garis depan untuk memahami beragam ide, lembaga, dan pelaku yang selalu mengedepankan strategi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.accountabilityresearch.org.

Tentang FGP

Proyek Tata Kelola Perikanan (*Fisheries Governance Project, FGP*) merupakan kolaborasi antara penyandang dana dan praktisi yang bekerja sama untuk membangun pemahaman bersama tentang berbagai isu dan solusi, mendorong aspek tata kelola perikanan yang lebih baik serta memperjuangkan hak-hak buruh. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang meliputi perjanjian internasional, perilaku pasar yang lebih baik, penegakan hukum dan perlindungan korban.

Tentang GLJ

Keadilan Buruh Global (*Global Labor Justice, GLJ*) adalah pusat strategi yang mendukung kolaborasi transnasional antara organisasi pekerja migran untuk memperluas hak-hak buruh, mengeksplorasi bentuk-bentuk kesepakatan baru pada rantai nilai (value chain) global dan koridor migrasi tenaga kerja internasional.

Tentang Publikasi ARC

Publikasi ARC berfungsi sebagai platform bagi para ahli strategi dan peneliti di bidang akuntabilitas untuk berbagi pengalaman dan wawasan mereka dengan beragam pemirsa dan aliansi potensial di seluruh bidang dan sektor. Publikasi ini meringkaskan inisiatif lokal dan nasional yang khas dalam konteks yang melibatkan perdebatan yang lebih luas di bidang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.accountabilityresearch.org/publications.

Hak dan Izin



Materi dalam publikasi ini dilindungi hak cipta berdasarkan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0). Jika Anda menerjemahkannya, harap tambahkan pernyataan berikut: Terjemahan ini tidak dibuat oleh ARC, dan ARC tidak bertanggung jawab atas kesalahan terjemahan apa pun.

Harap kutip karya ini, sebagai berikut: Gearhart, Judy, dan Connor Moynihan, 2025. "Mengangkat Suara Rakyat: Pekerja Perikanan Berkumpul serta Berorganisasi untuk Memperjuangkan Hak dan Perikanan Berkelanjutan." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper* 19. <https://doi.org/10.57912/29042075>

Foto sampul: Seorang pekerja perikanan dari APROISPELA menarik jaring, Ayangue, Santa Elena, Ekuador.

Kredit: Gustavo Crespo

Isi

Daftar Singkatan.....	5
Ringkasan Eksekutif.....	7
1. Pendahuluan.....	8
1.1 Konteks dan tujuan	9
1.2 Pendekatan analitik	10
2. Metodologi	11
3. Tren Pengorganisasian Pekerja Perikanan per Negara	13
3.1 Ringkasan organisasi	13
3.2 Indonesia.....	18
3.3 Taiwan	22
3.4 Thailand	26
3.5 Ekuador	30
3.6 Ghana	34
3.7 Meksiko	38
4. Apa yang menjadi Pendorong dan Penghambat Pengorganisasian Pekerja Perikanan ?	42
4.1 Tantangan dalam pengorganisasian	42
4.2 Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengorganisasian pekerja perikanan	45
5. Kesimpulan	52
5.1 Gerakan global yang diperlukan para pekerja perikanan	52
5.2 Kebijakan yang tidak konsisten melemahkan pengorganisasian pekerja perikanan...	53
5.3 Kepemimpinan pekerja perikanan diperkuat dengan sumber daya	54
5.4 Instrumen pasar dan perdagangan internasional belum selaras	55
Catatan.....	56
Bibliografi	57

Apresiasi

Penelitian ini dapat diwujudkan oleh *Fisheries Governance Project* (FGP) bersama pendanaan tambahan dari David and Lucille Packard Foundation. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para kontributor FGP atas dorongan dan dukungan mereka dalam mengonseptualisasikan laporan: Shaochi Chiu, Sarah Hogan, Johanna Lee, Meredith Lopuch, Sarah Mount, dan Max Schmid. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai individu yang telah memberikan masukan penting selama proses berlangsung, termasuk Karen Brock, Jonathan Fox, Jon Hartough, Rossen Karatchev, Chris Williams, dan Roisai Wongsuban. Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak yang mengevaluasi draf akhir: Rainer Braun, Elena Finkbeiner, Michele Ford, dan Peter Vandergeest. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada individu dan organisasi yang berkolaborasi pada setiap laporan per-negara, seperti yang tercantum di bawah ini.

Negara	Kolaborator penelitian
Ekuador	Tito Feyner Navia (konsultan independen)
Ghana	Eric Mawuko Atsiatorme dan tim di <i>Friends of the Nation – Ghana</i>
Indonesia	Mohamed Abdi Suhufan dan tim di <i>Destructive Fishing Watch</i> , dan Azizah Hapsari (konsultan independen)
Meksiko	CONMECOOP (Ricardo Romero, Jose Luis Carillo, dan Lorena Ortiz)
Taiwan	Johanna Lee dan tim di <i>Global Labor Justice</i>
Thailand	<i>Center for Human Rights and Labor</i> (CENTRAL), dipimpin oleh Tola Moeun dan Thehoya Dy; dan Yasasipa Suksai (konsultan independen)

Tentang Penulis

Judy Gearhart telah memperjuangkan hak-hak pekerja dalam rantai pasokan global sejak tahun 1990-an ketika ia memulai kariernya sebagai organisator di Meksiko. Ia memimpin program ARC tentang hak-hak pekerja dan akuntabilitas Perusahaan, serta mengajar kelas-kelas tentang hak asasi manusia dalam ekonomi global di American University dan Columbia University. Gearhart sebelumnya menjabat sebagai direktur eksekutif di *International Labor Rights Forum* (sekarang *Global Labor Justice*) di mana ia membantu meluncurkan *Seafood Working Group*.

Connor Moynihan adalah peneliti ARC yang menangani hak asasi manusia dan akuntabilitas dalam perikanan. Ia pernah bekerja dalam bidang pengorganisasian masyarakat dan keadilan lingkungan di AS dan Paraguay. Ia meraih gelar master dalam sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan dari *School of International Service, American University*.

Daftar Singkatan

ARC	<i>Accountability Research Center</i> (Sentra Riset Akuntabilitas)
ASOSALAN	<i>Asociación de Pescadores-Buzo de Salango</i> (Asosiasi Pekerja Perikanan dan Penyelam Salango)
C 188	<i>ILO Convention 188 Work in Fishing</i> (Konvensi ILO 188 sektor perikanan)
CBA	<i>collective bargaining agreement</i> (Kesepakatan Negosiasi Kolektif)
CONACOOP	<i>Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras</i> (Koperasi Federasi Perikanan Nasional)
CONAPESCA	<i>Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca</i> (Badan Akuakultur dan Perikanan Nasional)
CONMECOOP	<i>Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas</i> (Koperasi Konfederasi Perikanan dan Akuakultur Meksiko)
CBP	<i>United States Customs and Border Protection</i> (Proteksi Perbatasan dan Bea cukai Amerika Serikat)
DWF	<i>Distant Water Fleet</i> (Kapal Perikanan Laut Lepas)
EEZ	<i>Exclusive Economic Zone</i> (Zona Ekonomi Eksklusif)
EU	<i>European Union</i> (Uni Eropa)
FAO	<i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>
FENACOPEC	<i>Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador</i> (Federasi Nasional Koperasi Perikanan Ekuador)
FGP	<i>Fisheries Governance Project</i> (Proyek Tata Kelola Perikanan)
FiTI	<i>Fisheries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi Penangkapan Ikan)
FOC	<i>flag of convenience</i> (Bendera Kemudahan/negara-negara yang dapat dimudahkan secara hukum untuk berlayar dengan bendera anggota FoC)
FOSPI	Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia
FRN	<i>Fisher Rights Network</i> (Jaringan Hak Pekerja Perikanan)
GAWU	<i>General Agriculture Workers Union of Ghana</i> (Serikat Pekerja Pertanian Umum Ghana)
GLJ	<i>Global Labor Justice</i> (Keadilan Buruh Global)
GNCFC	<i>Ghana National Canoe Fishermen Council</i> (Badan Nelayan Kano Ghana)

ILO	<i>International Labour Organization</i>
ITF	<i>International Transport Workers Federation</i> (Federasi Pekerja Transport Internasional)
IUU	<i>illegal, unregulated, and unreported</i> (illegal, tidak diatur, tidak dilaporkan)
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMFU	<i>Keelung Migrant Fishermen's Union</i> (Serikat Pekerja Perikanan Migran Keelung)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MT	<i>metric tonne</i> (metrik ton)
MWRN	<i>Migrant Worker Rights Network</i> (Jaringan Hak-Hak Pekerja Migran)
MWSC	<i>Migrant Worker Solidarity Committee</i> (Jaringan Solidaritas Pekerja Migran)
NFAT	<i>National Fishers Association of Thailand</i> (Asosiasi Pekerja Perikanan Thailand)
NUSPAW	<i>National Union of Seafarers, Ports, and Allied Workers</i> (Serikat Nasional untuk Pelaut, Pekerja Pelabuhan, dan Pekerja Terkait))
PIPO	<i>port-in, port-out</i> (masuk pelabuhan, keluar pelabuhan)
PMFU	<i>Pingtung Migrant Fishermen's Union</i> (Serikat Pekerja Perikanan Migran Pingtung)
PSMA	<i>Port State Measures Agreement</i> (Kesepakatan Aturan Pelabuhan)
SAKTI-SULUT	Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu, Sulawesi Utara
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
SPPI	Serikat Pekerja Perikanan Indonesia
TNC	<i>transnational corporation</i> (Perusahaan Transnasional)
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
WRO	<i>Withhold Release Order</i> (Perintah Penahanan Barang Impor)
YMFU	<i>Yilan Migrant Fishermen's Union</i> (Serikat Pekerja Perikanan Migran)

Ringkasan

Pekerja perikanan menghadapi risiko yang besar terkait kehidupan dan mata pencahariannya. Perubahan iklim dan penangkapan ikan yang berlebihan (*over-fishing*) membuat para pekerja perikanan terpaksa melaut untuk jarak dan jangka waktu yang lebih panjang, melampaui kapasitas kapal mereka. Sehingga, para pekerja perikanan menerapkan strategi baru untuk berorganisasi, membangun kekuatan, dan mempertahankan hak-hak mereka.

Makalah ini menyajikan pelajaran dari pengorganisasian pekerja perikanan di berbagai sektor. Makalah ini sejalan dengan Konvensi 188 (C 188) Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Pekerjaan di Bidang Perikanan, yang mendefinisikan pekerja perikanan sebagai pihak yang bekerja di bidang penangkapan ikan laut, mulai dari pekerja perikanan tradisional hingga AKP migran atau Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan Laut Lepas (*Distant Water Fleet, DWF*). Penelitian ini meninjau tren pengorganisasian di enam negara dan mengidentifikasi tantangan dan faktor umum yang berkontribusi terhadap pengorganisasian pekerja perikanan. Di keenam negara tersebut—Ekuador, Ghana, Indonesia, Meksiko, Taiwan, dan Thailand—beragam inisiatif pengorganisasian bermunculan.

Penelitian ini mempertimbangkan berbagai dinamika yang memengaruhi pengorganisasian pekerja perikanan dan kemampuan mereka untuk mengakses informasi, mencari solusi, dan memengaruhi hasil kebijakan. Penelitian ini mengumpulkan berbagai wawasan lewat wawancara dengan pelaku dan pakar perikanan lainnya. Temuan penelitian ini menyoroti area-area yang memerlukan lebih banyak perbaikan, serta strategi untuk membangun organisasi pekerja perikanan yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Studi ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi para advokat internasional dan nasional terkait hak-hak pekerja perikanan dan keadilan lingkungan. Temuan penelitian ini meliputi:

- Terdapat semakin banyak serikat pekerja dan organisasi pekerja yang terbentuk selama sepuluh tahun terakhir, yang sedang membangun momentum tetapi membutuhkan kohesi yang lebih besar. Banyak yang masih perlu diperkuat, yakni struktur internal, menambah keanggotaan, dan keselarasan dengan organisasi sejawat dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pengusaha.
- Kurangnya koherensi kebijakan menimbulkan tantangan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan. Oleh sebab itu, Kementerian Tenaga Kerja, Laut dan Perikanan, serta Transportasi/Perhubungan masih harus berusaha lebih keras untuk berkoordinasi. Kegagalan untuk memperbaiki disfungsi ini menambah ketidakpercayaan pekerja perikanan terhadap pemerintah, serta di lain pihak, menyuburkan penentangan terhadap usaha-usaha pengorganisasian pekerja perikanan.
- Adanya sumber daya tambahan membawa pada perubahan yang signifikan. Sumber daya tambahan memungkinkan adanya inkubasi pengorganisasian di sektor-sektor yang sebelumnya tidak terorganisasi, khususnya dalam konteks dimana perusahaan membayar konsultan serta memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membantu. Dengan demikian, suara pekerja dapat “didengar” dengan baik. Namun, sumber daya tersebut juga dapat menciptakan perpecahan di antara organisasi berbasis anggota dan harus dikelola dengan hati-hati.
- Para pengorganisir pekerja perikanan mungkin harus berjuang keras untuk mendapatkan manfaat dari kampanye internasional, menavigasi politik nasional, mengajukan solusi dengan pemerintah daerah, dan berunding dengan pengusaha. Aliansi internasional perlu membangun kampanye berdasarkan prioritas dari organisasi pekerja perikanan.

1. Pendahuluan

1.1 Konteks dan tujuan

Penangkapan ikan yang berlebihan (*over-fishing*) dan pelanggaran hak-hak pekerja perikanan sangat berkorelasi, baik untuk penangkapan ikan di pesisir maupun di perairan laut lepas. Namun, banyak inisiatif untuk mengatasi masalah ini tidak melibatkan partisipasi yang berarti dari pekerja perikanan dan organisasi mereka. Organisasi pekerja perikanan, yang sebagian besar berbentuk serikat pekerja dan koperasi, memiliki peran unik untuk mewakili pekerja perikanan dan memperkuat rasa tanggung jawab mereka. Organisasi-organisasi ini penting untuk memungkinkan suara dan pengaruh pekerja perikanan dalam inisiatif yang berfokus pada hak mereka dan pengelolaan laut.

Bukti telah menunjukkan pentingnya suara pekerja dalam memajukan keadilan, kesetaraan ras dan gender, dan tempat kerja yang lebih sehat, sejahtera serta aman. Lebih lanjut, pekerja yang bertindak secara kolektif dapat mengurangi pekerja anak dan pekerja paksa (Fischer-Daly dan Anner 2023). Semakin banyak para pendukung keadilan sosial dan lingkungan, kini berupaya untuk menutup kesenjangan terkait keterlibatan para pemangku kepentingan. Mereka juga mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk menghubungkan suara pekerja dengan solusi dalam industri boga bahari (makanan laut/*seafood*).

Laporan ini mengacu pada salah satu kolaborasi tersebut, Proyek Tata Kelola Perikanan (*Fisheries Governance Project*, FGP), sebuah inisiatif antara penyandang dana-praktisi yang memiliki kesamaan perjuangan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan penangkapan ikan ilegal, yang tidak diatur, serta tidak dilaporkan (*illegal, unregulated, and unreported*, IUU). Setelah berkonsultasi dengan peserta FGP lainnya, studi ini mengidentifikasi enam negara dimana pengorganisasian pekerja perikanan bersifat dinamis atau dalam masa transisi. Berfokus pada pengorganisasian pekerja perikanan yang bekerja untuk industri perikanan, atau kita sebut dengan awak kapal perikanan migran (AKP migran) di Indonesia, Taiwan, dan Thailand, serta organisasi pekerja perikanan tradisional di Ekuador, Ghana, dan Meksiko. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai cara pekerja perikanan berorganisasi dan bagaimana arus informasi dan keterlibatan yang lebih kuat dari para pengorganisir pekerja perikanan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pengusaha.

Mengingat bahwa gerakan pekerja bersifat dinamis dan upaya pengorganisasian masih berkembang di sektor ini, maka studi ini menampilkan contoh-contoh baru pendekatan pengorganisasian di setiap negara. Lebih dari separuh organisasi yang ditampilkan di bawah ini terbentuk di sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia, Taiwan, dan Thailand, meningkatnya perhatian terhadap isu kerja paksa telah membawa lonjakan pendanaan dan dukungan teknis bagi pengorganisasian serikat pekerja dan penjangkauan kepada AKP migran, khususnya yang bekerja di kapal industri. Dukungan ini menciptakan peluang dan tantangan untuk membangun persatuan dan meningkatkan pengaruh. Di Ekuador, Ghana, dan Meksiko, pengorganisasian serikat pekerja tertinggal karena intimidasi dan diskriminasi terhadap pengorganisir, sementara pengorganisasian pekerja perikanan tradisional telah.

Tujuan studi ini adalah untuk mendukung pembagian strategi antar organisasi pekerja perikanan dan untuk memberi informasi kepada organisasi internasional serta nasional yang berupaya mendukung organisasi yang dipimpin oleh pekerja perikanan. Cakupan penelitian dibatasi pada perikanan tangkap laut, yang mencakup contoh tren pengorganisasian dalam penangkapan ikan untuk industri dan perairan laut lepas, serta penangkapan ikan tradisional dan pesisir.¹ Meskipun beberapa narasumber mengemukakan isu pekerja di bidang akuakultur dan pengolahan boga bahari, di mana perempuan seringkali menjadi bagian terbesar dari tenaga kerja, sektor ini layak mendapat penelitian tambahan, khususnya untuk memperdalam pemahaman tentang pengorganisasian yang dipimpin perempuan dalam boga bahari (*seafood*).



Nelayan berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Kredit: ILO Asia Pasific (CC BY-NC-ND 2.0)

Pelanggaran besar atas hak asasi manusia dan berkurangnya stok ikan telah meningkatkan perhatian dari pemerintah dan para pembeli boga bahari dalam melibatkan organisasi pekerja perikanan. Hal ini sejalan dengan undang-undang dan kebijakan baru yang menekankan pentingnya pembangunan yang dipimpin secara lokal dan keterlibatan pemangku kepentingan. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (Rujukan Review Keberlanjutan Perusahaan) dari Uni Eropa (UE) memberikan penekanan signifikan pada pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi risiko hak asasi manusia di sepanjang rantai pasokan perusahaan. Selain itu, karena semakin banyak negara mengadopsi Konvensi Pekerjaan dalam Perikanan ILO (C 188), pemerintah terlibat dalam dialog tripartit tentang cara mereka mengatur kondisi kerja dalam penangkapan ikan, sektor yang sering dikeskualikan atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan hukum nasional dan internasional (Guelker 2023).

Tantangan terhadap partisipasi pekerja perikanan yang efektif bersumber dari kegagalan pembuat kebijakan dalam mengakomodasi masukan dari pekerja perikanan. Selain itu, pekerja perikanan tidak memiliki kekuatan kolektif untuk menyampaikan tuntutan mereka. Pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan perikanan yang sedang terpuruk dan membantu pekerja perikanan yang menjadi korban kerja paksa. membutuhkan pengembangan program yang cepat. Sering kali hal tersebut terbatas oleh kemampuan pelaksana untuk mengumpulkan masukan yang berarti. Kedua, organisasi pekerja perikanan tidak memiliki sumber daya dan waktu untuk menuntut akses ke informasi dan membangun dukungan kolektif untuk proposal mereka kepada pemerintah dan pelaku bisnis. Organisasi yang dipimpin pekerja perikanan yang kuat dapat mengubah dinamika ini.

Semakin banyak organisasi pekerja perikanan, termasuk serikat pekerja, asosiasi pekerja perikanan, dan koperasi, berupaya memengaruhi kebijakan dan undang-undang yang berdampak pada komunitas mereka. Lonjakan dalam pengorganisasian ini dimungkinkan oleh berbagai masukan, termasuk pendanaan dari luar, para penyintas kerja

paksa yang kembali pulang dan berupaya membantu pekerja perikanan lainnya, dan dampak perubahan iklim. Maka, semakin genting untuk para pekerja perikanan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Ini hanyalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengorganisasian pekerja perikanan, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1.2 Pendekatan analitik

Makalah ini menggunakan sudut pandang hak asasi manusia untuk memahami pengorganisasian pekerja perikanan dengan meneliti dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan sistemik, dan potensi diskriminasi yang dapat membatasi kemampuan pekerja perikanan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Makalah ini mencakup perikanan tangkap skala industri dan skala kecil, mengingat mereka bekerja di perikanan skala kecil, industri, dan perairan laut lepas. Selain itu, kebijakan pemerintah prihal perikanan harus mempertimbangkan kedua sektor tersebut, terkadang harus memediasi ketegangan di antara keduanya.

Laporan ini mengambil titik tolak dari gagasan bahwa organisasi berbasis konstituen yang kuat sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban baik dari pengusaha maupun pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana organisasi pekerja, khususnya serikat pekerja dan koperasi yang demokratis, menumbuhkan kekuatan di antara para anggotanya. Baik pemimpin serikat pekerja maupun koperasi menekankan bagaimana mereka membantu para anggotanya mencari solusi atau memperoleh keterampilan melalui pelatihan, mengadvokasi akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan rasa memiliki serta keinginan untuk saling mendukung.

Dalam analisis mereka terhadap serikat pekerja yang muncul di Indonesia pada tahun 2023, Ford, Hasbiyalloh, dan Palmer (2024) merujuk pada tiga rangkaian kegiatan, yaitu layanan, advokasi, dan pengorganisasian. Aspek ketiga dari kerja serikat pekerja ini, yakni pengorganisasian, sangat penting untuk membangun basis kekuatan, yang darinya organisasi dapat melibatkan pemerintah dan industri. Kekuatan semua organisasi berbasis konstituen terletak pada kemampuan mereka untuk tumbuh dan didanai oleh anggota yang mendapatkan manfaat dari layanan organisasi tersebut, serta lebih lanjut menjadi loyal kepada organisasi dan sesama anggota. Hal ini membangun kemandirian finansial dan kemampuan untuk menegosiasikan kontrak yang lebih baik dengan pemberi kerja atau para pembeli produk yang memengaruhi keputusan kebijakan. Namun, hal ini menantang bagi organisasi yang anggotanya bergelut dengan hutang, pendapatan yang rendah, atau status migrasi.

Secara keseluruhan, masih terdapat kekurangan literatur yang berfokus pada pendokumentasian upaya pengorganisasian pekerja perikanan dan perjuangan memajukan hak-hak pekerja perikanan di belahan bumi selatan. Khususnya, terdapat analisis ekstensif tentang pengorganisasian pekerja perikanan skala kecil yang terkait dengan pelibatan mereka yang lebih baik dalam pengelolaan perikanan (Kalikoski et al. 2019; Jentoft dan Chuenpagdee 2022) dan bagaimana mereka membangun kekuatan melalui jaringan transnasional (Mills 2021). Namun, dalam penangkapan ikan untuk industri, terdapat sedikit contoh pengorganisasian pekerja perikanan yang dapat dipelajari di Asia Tenggara sebelum paparan media pada tahun 2014 (Vandergeest 2018), sementara serikat pekerja perikanan terus menghadapi penindasan di Ekuador, Meksiko, dan pada tingkat yang lebih rendah di Ghana.

Beberapa studi per-negara telah mulai mengisi kesenjangan ini. Para penulis menyoroti pengorganisasian oleh pekerja perikanan industri di Indonesia dan Taiwan (Ford, Hasbiyalloh, dan Palmer 2024; Parhusip 2023). Dan di Meksiko, ada beberapa inisiatif dan analisis terkait bagaimana pekerja perikanan berorganisasi, terutama dalam konteks peningkatan tata kelola sumber daya milik bersama (Basurto et al. 2020).

Melalui tinjauan pustaka yang lebih luas tentang hak-hak pekerja perikanan, terdapat dokumentasi ekstensif tentang kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam penangkapan ikan industri. Dokumentasi tersebut dilakukan oleh PBB dan organisasi nonpemerintah (LSM) seperti *Environmental Justice Foundation* (EJF), *Global Labor Justice* (GLJ), dan *Greenpeace* pada awal tahun 2010-an. Hal ini diikuti oleh paparan jurnalis (Associated

Press 2015; Urbina 2015). Berdasarkan hal tersebut, beberapa penulis telah menilai strategi untuk melindungi hak-hak buruh di laut (Garcia Lozano et al. 2022; Kadfak 2024; Vandergeest, Marschke, dan MacDonnell 2021). Semakin banyak makalah yang menganalisis tantangan akuntabilitas perusahaan (Decker Sparks et al. 2022; Finkbeiner et al. 2024; Gearhart 2023; Nakamura 2024; Williams dan Decker Sparks 2023) dan prospek tanggung jawab sosial yang digerakkan oleh pekerja (*worker-driven social responsibility*, WSR) (Decker Sparks et al. 2022; Finkbeiner et al. 2024; Williams dan Decker Sparks 2023). Dengan berfokus pada bagaimana pekerja perikanan menggunakan pengorganisasian untuk mengamankan hak-hak mereka. Makalah ini bertujuan untuk memahami bagaimana pekerja perikanan mengorganisasikan dan membangun kepemimpinan. Tanpa serikat pekerja perikanan nasional yang kuat, kesepakatan WSR yang bermaksud baik pun dapat berisiko gagal.

Setelah merangkum pendekatan penelitian, laporan ini menyajikan tinjauan singkat tentang organisasi pekerja perikanan yang ditampilkan per negara. Kemudian, laporan ini menyajikan ringkasan masing-masing negara yang menguraikan konteks industri, tantangan hukum terhadap pengorganisasian, dan aktivitas pengorganisasian organisasi pekerja perikanan yang terkemuka. Ringkasan negara tersebut mengacu pada laporan negara yang lebih terperinci, yang akan tersedia secara terpisah secara daring. Bagian keempat dari laporan ini menganalisis temuan, menguraikan hambatan terhadap pengorganisasian, faktor-faktor yang membantu mendorong pengorganisasian pekerja perikanan, dan peran kampanye internasional. Terakhir, penulis menyoroti di mana lebih banyak perhatian diperlukan untuk lebih memperkuat organisasi pekerja perikanan.

2. Metodologi

Penelitian ini mengacu pada konsultasi dengan para ahli internasional dan lebih dari 100 wawancara lapangan dengan pekerja perikanan, advokat hak-hak pekerja perikanan, dan pakar lingkungan. Meskipun beberapa perwakilan pemerintah diwawancarai dan intervensi perusahaan dianalisis, fokusnya tetap pada organisasi pekerja perikanan dan pihak yang mendukung. Enam negara dipilih karena masing-masing menawarkan tren yang berbeda atau baru dalam dinamika pengorganisasian pekerja perikanan. Setiap studi kasus telah dikembangkan dan ditulis bersama dengan para ahli setempat. Laporan negara mendokumentasikan konteks ekonomi dan politik, tren terkini dalam pengorganisasian pekerja perikanan, dan tantangan yang dihadapi pekerja perikanan dalam mendapatkan partisipasi yang berarti dalam pengembangan solusi yang melindungi hak-hak mereka, mata pencaharian, dan perikanan yang menjadi penghidupan para pekerja perikanan.

Pendekatan penelitian untuk setiap negara mencakup tinjauan pustaka dan wawancara berbagai pihak terkait (*network*) untuk mengidentifikasi organisasi-organisasi yang bekerja di persimpangan antara hak-hak pekerja perikanan dan pengelolaan perikanan yang berwawasan lingkungan. Penelitian pustaka diikuti oleh perjalanan beberapa minggu ke lapangan untuk melakukan wawancara semiterstruktur dengan organisasi pekerja perikanan, LSM, dan perwakilan pemerintah. Di lima negara, ARC bekerja sama dengan organisasi atau konsultan lokal yang aktif di komunitas pekerja perikanan, yang melakukan wawancara lanjutan sesuai kebutuhan. Pihak terkait telah dicantumkan dalam ucapan terima kasih di atas. GLJ memimpin penelitian dengan mitra di Taiwan.

Di setiap negara, tim melakukan wawancara semi-terstruktur selama kunjungan lapangan dan pertemuan online. Berdasarkan konsultasi umum ini, tim mengidentifikasi organisasi pekerja perikanan terkemuka dan mempelajari lebih lanjut tentang strategi dan tantangan mereka. Pertanyaan inti dimulai dengan penyelidikan tentang asal-usul organisasi pekerja perikanan terpilih dan faktor apa yang membantu memperkuat organisasi mereka. Pertanyaan

lain termasuk: Bagaimana mereka melibatkan pemerintah dan bagaimana pemerintah dapat menjadi penghalang partisipasi pekerja perikanan dalam mengembangkan solusi atau menegosiasikan persyaratan yang lebih baik dengan pengusaha? Peran apa yang dapat dimainkan organisasi pekerja perikanan dalam mengurangi IUU atau mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan? Apa strategi pengorganisasian dan advokasi mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan proposal mereka untuk meningkatkan pemantauan pemerintah dan akses pekerja perikanan terhadap pemulihan?



Nelayan di Elmina, Ghana menyiapkan perlengkapan mereka untuk memancing di malam hari.

Kredit: Judy Gearhart

3. Tren Pengorganisasian Pekerja Perikanan per Negara

3.1 Ringkasan Organisasi

Prakarsa yang ditampilkan di sini mencakup contoh-contoh berbagai bentuk pengorganisasian pekerja perikanan. Indonesia, Taiwan, dan Thailand menghadirkan pendekatan baru untuk pengorganisasian serikat pekerja dalam penangkapan ikan industri, khususnya mengingat perlunya mengatasi kendala hukum yang dihadapi AKP migran. Tujuh dari sembilan serikat pekerja yang ditampilkan di bawah ini dari ketiga negara ini dipimpin oleh AKP migran atau mantan AKP migran. Mereka terutama berfokus pada membantu pekerja perikanan memproses keluhan, mengadvokasi undang-undang yang memfasilitasi akses pekerja perikanan mendapatkan penyelesaian, dan dalam kasus Indonesia, memberikan pelatihan pra-keberangkatan. Organisasi-organisasi ini diidentifikasi sebagai serikat pekerja selama wawancara dan menekankan pentingnya solidaritas dan pembangunan gerakan, tetapi hanya sedikit yang telah menegosiasikan perjanjian tawar-menawar secara kolektif dengan pengusaha.

Di Ekuador, Ghana, dan Meksiko, terdapat pengorganisasian berbasis konstituensi yang signifikan di antara pekerja perikanan tradisional melalui koperasi dan asosiasi. Di Meksiko dan Ekuador, konfederasi dan federasi koperasi menyatukan pekerja perikanan tradisional dan semi-industri dan melibatkan pemerintah dalam kebijakan perikanan nasional yang memengaruhi semua pekerja perikanan. Di Ghana, beberapa pengorganisir pekerja perikanan tradisional menyuarakan kekhawatiran bahwa pemerintah lebih memihak pada kapal berorientasi ekspor karena mereka membayar pajak dan menghasilkan pendapatan ekspor, tidak seperti pekerja perikanan tradisional.



Seorang nelayan yang bekerja di pelabuhan, Taiwan.

Kredit: Environmental Justice Foundation

Meskipun terdapat rentang angkatan kerja yang berbeda-beda, organisasi pekerja perikanan tradisional dan industri bertujuan untuk membangun basis keanggotaan mereka dan memengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan nasional yang secara langsung berdampak pada mata pencaharian dan kesejahteraan pekerja perikanan. Perbedaan utama terjadi pada komunikasi dan waktu. Bagi pekerja perikanan yang kembali ke pelabuhan secara teratur dan bagi pekerja perikanan tradisional, sebagian besar penjangkauan dilakukan di pelabuhan atau di komunitas Nelayan, sedangkan berhubungan dengan pekerja perikanan di armada industri (DWF) lebih sporadis karena kurangnya akses Wi-Fi di laut dan tantangan yang dihadapi AKP migran dalam mengakses layanan di pelabuhan, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

3.1.1 Pengorganisasian AKP migran di kapal industri

Lonjakan dalam pengorganisasian serikat pekerja di kapal industri terjadi setelah skandal yang mengungkap pelanggaran berat terhadap pekerja perikanan yang terdampar di laut selama bertahun-tahun—beberapa darinya melampaui satu dekade—dan yang lainnya dipukuli dan bahkan dibunuh karena memprotes kondisi tersebut. Banyak AKP migran yang terabaikan—tidak dilindungi oleh perjanjian serikat pekerja pelaut maupun didukung oleh serikat pekerja di darat (Guelker 2023). Dari sembilan organisasi yang dirujuk dalam Kotak 1 tentang pengorganisasian sektor industri, hanya *Migrant Worker Rights Network* (MWRN) yang mengorganisasi pekerja migran di sektor boga bahari sebelum tahun 2013, dan fokus mereka terutama pada pengolahan produk boga bahari, bukan penangkapan di laut.

Pengorganisasian AKP migran merupakan tantangan tersendiri; sulit untuk melibatkan mereka, dan banyak yang tidak memiliki akses ke layanan pelabuhan. Di Thailand, tempat AKP migran datang ke pelabuhan secara teratur, banyak yang tidak dapat turun karena kapten menahan dokumen identitas mereka dan dapat melaporkan mereka ke pihak berwenang sebagai migran tidak berdokumen jika mereka pergi meninggalkan kapal (FRN dan Gearhart 2024). AKP migran yang bekerja pada kapal perikanan laut lepas (DWF) sering menandatangani kontrak dua tahun dan mungkin berada terus menerus di laut sepanjang waktu tersebut. Beberapa serikat pekerja Indonesia memiliki perwakilan di negara lain, tetapi pekerja perikanan sering tidak diizinkan atau tidak memiliki dokumen untuk turun jika kapal mereka masuk ke pelabuhan. Hal ini semakin membatasi kemampuan mereka untuk mengakses layanan pelabuhan atau berkomunikasi dengan perwakilan serikat pekerja. Meskipun kehadiran serikat pekerja adalah penting, banyak AKP migran hanya melibatkan perwakilan serikat pekerja selama pelatihan pra-keberangkatan atau ketika mereka dalam krisis dan membutuhkan dukungan untuk mengajukan keluhan.

Seperti disebutkan di atas, serikat pekerja memainkan berbagai peran dalam membela hak-hak pekerja. Serikat pekerja ini mengorganisasi pekerja yang memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman berorganisasi, jadi mereka mulai dengan melibatkan diri dalam memenuhi kebutuhan pekerja perikanan. Banyak penyelenggara mengatakan bahwa mereka memulai dengan kegiatan yang berfokus pada layanan seperti memberikan pelatihan, yang diwajibkan sebelum keberangkatan, atau dengan membantu pekerja perikanan memproses keluhan atas cedera atau upah yang belum dibayarkan. Hal ini menciptakan beberapa tumpang tindih dengan LSM yang juga menyediakan layanan bagi pekerja migran yang perlu memproses keluhan.

Beberapa kegiatan yang membedakan serikat pekerja dari LSM meliputi jaringan solidaritas yang dibangun melalui protes buruh dan aksi kolektif; negosiasi kontrak dengan pengusaha; pembiayaan mandiri melalui iuran anggota; rapat umum; dan pemilihan pemimpin. Namun, banyak serikat pekerja yang mengorganisasi AKP migran belum bernegosiasi dengan pengusaha. Anggotanya sering kali takut untuk berunjuk rasa di depan umum, terilit masalah utang sehingga sulit membayar iuran, atau tidak dapat mengikuti rapat umum karena mereka berada di laut selama bertahun-tahun. Selain itu, banyak Pekerja di Kapal Perikanan laut lepas (DWF) tidak dikontrak langsung oleh pemilik kapal, tetapi oleh agen perekrutan di negara asal mereka (Liu et al. 2024). Hal ini membatasi kemampuan pekerja perikanan untuk berunding bersama dengan kapten atau pemilik kapal.

Keterbatasan ini menjelaskan mengapa serikat pekerja fokus pada dukungan terhadap keluhan pekerja perikanan. Dukungan ini adalah sesuatu yang seringkali dapat diberikan oleh LSM, bahkan lebih dari itu, terutama saat tersedia sumber daya pendanaan dari luar sebagai bentuk dukungan. Hal ini membutuhkan pemikiran lebih dalam, bagaimana LSM memenuhi kebutuhan yang mendesak, tetapi juga menjalankan fungsi yang merupakan bagian inti dari penjangkauan serikat pekerja dan membangun kepercayaan dengan basis pendukung. Meskipun pekerja perikanan yang mencari penyelesaian membutuhkan dukungan semacam ini, penting untuk menggambarkan antara organisasi dukungan teknis dan peran unik organisasi berbasis keanggotaan seperti serikat pekerja dan koperasi dalam mewakili suara pekerja. Organisasi-organisasi ini dirancang untuk memberikan dukungan jangka panjang, melampaui intervensi khusus saat terjadi insiden untuk membangun solidaritas masyarakat dan jaringan dukungan sebaya. Karena mereka membangun basis kekuatan kolektif untuk memengaruhi pemerintah dan pengusaha, struktur mereka lebih luas dan lebih berkelanjutan serta dapat diakses oleh semua pekerja di sektor tersebut.

Kotak 1. Serikat Pekerja dan Organisasi Pekerja di Sektor Perikanan Industri

Indonesia

Serikat pekerja perikanan di Indonesia berada dalam format yang beragam. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi pekerja migran terbesar. Dibentuk oleh para pekerja domestik yang kembali pada tahun 2003, SBMI mulai mengorganisasi dan mengadvokasi Awak Kapal Perikanan (AKP) migran pada tahun 2014, tetapi tidak untuk melakukan negosiasi dengan pengusaha. Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) memberikan pelatihan kepada pekerja perikanan sebelum keberangkatan dan telah menandatangani kontrak tripartit dengan agen perekrutan dan pemilik kapal di Taiwan. Serikat pekerja ketiga adalah Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu-Sulawesi Utara, (SAKTI-SULUT) yang berorganisasi di pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pengorganisasian berbasis pelabuhan yang dilakukan SAKTI-SULUT telah mendorong untuk melibatkan pekerja perikanan AKP migran dan pekerja perikanan AKP di armada domestik, serta istri pekerja perikanan AKP di industri pengolahan boga bahari. Bersama dengan serikat pekerja lainnya, organisasi ini melibatkan pengusaha dan pejabat pemerintah dalam dialog tripartit untuk mengadvokasi upah minimum yang lebih tinggi di Kota Bitung, tetapi belum menegosiasikan perjanjian tawar-menawar kolektif dengan pengusaha. Ada beberapa serikat pekerja lain yang mengorganisasi pekerja perikanan di Indonesia, tetapi SBMI, SPPI, dan SAKTI-SULUT memberikan contoh tiga strategi penjangkauan yang berbeda—berbasis masyarakat, berbasis pelatihan, dan berbasis pelabuhan.

Taiwan

Selama dua dekade terakhir, serikat AKP migran telah didirikan di berbagai pelabuhan di Taiwan untuk membantu AKP migran, sebagian besar dari Filipina dan Indonesia. *Yilan Migrant Fishermen's Union* (YMFU) didirikan oleh seorang warga negara Taiwan, sedangkan *Keelung Migrant Fishermen's Union* (KMFU) dan *Pingtung Migrant Fishermen's Union* (PMFU) didirikan oleh para migran Indonesia di Taiwan. PMFU didirikan oleh Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang telah berhasil melakukan pengorganisasian di kalangan pekerja perikanan, seperti mengamankan sumber daya untuk membangun masjid di dekat pelabuhan. Serikat pekerja terlibat dalam advokasi reformasi kebijakan dan menyediakan berbagai layanan bagi pekerja perikanan, mulai dari kegiatan budaya hingga dukungan bagi pekerja perikanan yang mencari penyelesaian. Mereka telah bergabung dalam koalisi untuk mengadvokasi hak-hak AKP migran dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah Taiwan dan pengusaha untuk mendukung inisiatif—contoh utama adalah kampanye *Wi-Fi Now for Fishers' Rights at Sea* yang dipimpin oleh FOSPI.

Thailand

Awak kapal penangkap ikan di armada kapal Thailand sebagian besar adalah pekerja migran Burma dan Kamboja, namun pekerja migran di Thailand tidak memiliki hak untuk membentuk atau memimpin serikat pekerja mereka sendiri. Meskipun demikian, organisasi yang dipimpin pekerja migran telah beraliansi dengan serikat pekerja dan menggunakan komite pekerja untuk bernegosiasi dengan pengusaha mengenai kondisi kerja dan ketentuan kontrak, sebuah pendekatan yang dipelopori oleh MWRN (Kyaw dan Gearhart 2024). Pada tahun 2022, beberapa anggota MWRN berpisah untuk membentuk *Migrant Worker Solidarity Committee* (MWSC), yang bernaung di bawah Yayasan Hak Buruh (*Labor Rights Foundation*) di Thailand. Seperti MWRN, mereka juga berupaya untuk mengatur tempat kerja, mengadakan pemilihan umum, dan mengenakan iuran tahunan, tetapi fokus utama mereka adalah membantu anggota untuk mengajukan proses pengaduan. Keduanya terutama mengorganisasi pekerja dalam pemrosesan boga bahari dan produksi berbasis daratan lainnya. Pada tahun 2018, *International Transport Workers Federation* (ITF) meluncurkan *Fisher Rights Network* (FRN) memfasilitasi AKP migran untuk mengatur dan berunding bersama untuk perbaikan kondisi kerja di atas kapal mereka, dan mengadvokasi reformasi kebijakan di seluruh sektor perikanan Thailand. Meskipun negosiasi FRN dengan para pengusaha dipimpin oleh AKP migran tanpa perlindungan serikat pekerja resmi, negosiasi tersebut telah berkembang dengan stabil, kini mewakili lebih dari 5.000 pekerja perikanan Burma dan Kamboja melalui cabang FRN yang aktif di lima lokasi pelabuhan Thailand (Ranong, Chumphon dan Kuraburi di perbatasan Myanmar; Songkhla di selatan; dan Trat di perbatasan Kamboja).

3.1.2 Pekerja perikanan tradisional berorganisasi untuk mendapatkan pengaruh yang lebih kuat

Organisasi pekerja perikanan tradisional berakar dari komunitas lokal mereka dan sering kali berfungsi sebagai organisasi sosial terkemuka yang mengadvokasi kebutuhan masyarakat, menuntut hak seperti klinik medis atau jalan yang lebih baik dan mendukung kegiatan pemuda setempat. Mereka mungkin juga menjadi garis pertahanan pertama terhadap kegiatan ilegal di perairan, terutama ketika mereka terlibat dalam pengelolaan bersama atau mandiri atas sumber daya kolektif. Kehadiran mereka yang terorganisasi dapat bertindak sebagai pencegah -dan anggotanya dapat membantu memberi sinyal peringatan-atas kegiatan ilegal yang terjadi. Sayangnya, banyak pekerja perikanan tradisional dan pesisir menyatakan frustrasi dengan kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah mereka terhadap masalah mereka, dengan beberapa mencatat bahwa pemerintah mungkin memprioritaskan kebutuhan pekerja perikanan industri yang lebih menguntungkan dan kuat secara finansial. Di ketiga negara yang dirangkum dalam Kotak 2, pekerja perikanan tradisional menyatakan kesulitan dengan pembatasan lingkungan, yang ditetapkan tanpa diskusi dengan para pekerja perikanan.

Kotak 2. Koperasi dan Asosiasi dalam Perikanan Tradisional

Ekuador

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) adalah organisasi pekerja perikanan terbesar di Ekuador, yang mewakili hampir 48.000 pekerja perikanan tradisional. Mengingat ukurannya dan pemimpinnya yang terkenal, FENACOPEC sering kali menjadi corong utama bagi para pekerja perikanan. Ada beberapa organisasi pekerja perikanan lain yang lebih kecil seperti *Asociación de Pescadores-Buzo de Salango* (ASOSALAN), yang mengadvokasi agar metode penangkapan ikan mereka diakui. Di seluruh sektor tradisional, para pekerja perikanan khawatir akan keselamatan mereka dan meminta perlindungan yang lebih besar dari pemerintah. Meskipun beberapa pekerja perikanan yang sudah pensiun telah berkerjasama dengan serikat pekerja untuk menuntut upah tertunggak, tidak ada serikat pekerja di sektor tersebut karena faktor-faktor seperti penindasan yang berat terhadap serikat pekerja di Ekuador dan adanya hambatan hukum.

Ghana

Pengorganisasian pekerja perikanan di Ghana sedang dalam tahap transisi besar, dengan munculnya beberapa bentuk baru. *Ghana National Canoe Fishermen Council* (GNCF) didirikan pada tahun 1993, yang menyatukan para pekerja perikanan utama di sepanjang garis pantai. Peran kepala Nelayan yang secara historis kuat kini kehilangan otoritasnya karena faktor politik dan lingkungan, yang telah menciptakan peluang bagi organisasi-organisasi baru (Nunoo dkk. 2015; Nyavor dkk. 2023). Pada saat yang sama, para pedagang ikan utama, pemimpin terpilih dari para pengolah ikan perempuan, juga kehilangan otoritas karena menurunnya stok ikan yang mengikis kemampuan mereka untuk memengaruhi harga (EJF 2019). Beberapa organisasi ini secara terbuka menolak struktur kepemimpinan yang diwariskan. Ada dua serikat pekerja—*National Union of Teamsters and General Workers* (NUTGW) dan *General Agricultural Workers Union* (GAWU)—yang mengorganisasi pekerja perikanan tradisional, dalam upaya yang mungkin di beberapa tempat harus menolak struktur *family-like*, sebuah sistem mengatur hubungan kerja di sektor tersebut di masa sebelumnya. *National Union of Seafarers, Ports, and Allied Workers* (NUSPAW) mengorganisasi pekerja perikanan di kapal pukat industri, tetapi kapten sering kali melakukan diskriminasi atau menolak untuk mempekerjakan anggotanya.

Meksiko

Koperasi memiliki sejarah panjang di Meksiko, yang dimulai sejak revolusi. Banyak pekerja perikanan Meksiko yang terorganisasi dalam koperasi, sebagian karena kebijakan yang menempatkan mereka dalam tanggung jawab atas izin penangkapan ikan lokal, yang memberikan akses ke jenis hak penangkapan ikan dan spesies tertentu. Namun, perubahan kebijakan sejak tahun 1990-an memperluas izin kepada pekerja perikanan yang tidak terafiliasi (Bennett 2017). Perizinan melalui koperasi memiliki pro dan kontra. Beberapa koperasi dibentuk terutama untuk mendapatkan izin. Namun, koperasi telah menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan pekerja perikanan terkait langkah-langkah perikanan keberlanjutan. Ada dua konfederasi yang mewakili campuran pekerja perikanan tradisional dan industri, tergantung pada komunitas Pekerja Perikanan lokal yang mereka wakili. *Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras* (CONACOO) didirikan pada tahun 1994, dan mereka mewakili koperasi Pekerja Perikanan di 14 negara bagian pesisir. *Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca* (CONMECOOP) dibentuk pada tahun 2014 dengan tujuan membangun kehadiran nasional; mereka sekarang mewakili koperasi di 15 dari 17 negara bagian pesisir Meksiko. CONMECOOP secara aktif berupaya terlibat dalam program penguatan organisasi yang melibatkan Pekerja Perikanan dalam pengelolaan perikanan dan langkah-langkah konservasi. Serikat pekerja di armada kapal industri Meksiko belum memperoleh dukungan.

Baik di sektor perikanan industri maupun perikanan tradisional, organisasi berbasis keanggotaan mencari aliansi di komunitas LSM. Baik LSM lingkungan maupun kelompok antiperdagangan manusia telah membawa keahlian dan dukungan teknis. Namun aliansi ini dapat menjadi tantangan ketika agenda sebagian tumpang tindih tetapi tidak sepenuhnya selaras, atau ketika cara operasinya berbeda. LSM memperoleh kredibilitas dari analisis hukum atau ilmiah mereka, sedangkan serikat pekerja dan koperasi adalah aktor politik, yang perlu menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan anggota. Hal ini sering kali berarti organisasi berbasis keanggotaan harus mengubah agenda untuk merespon anggota yang sedang mengalami krisis atau masalah. Ini juga berarti mereka mungkin dikecualikan dari ruang tertentu. Misalnya, ketika pengusaha atau perwakilan pemerintah merasa terancam, mereka mungkin lebih suka bekerja sama dengan LSM daripada serikat pekerja.

Untuk memungkinkan solusi yang dipimpin pekerja perikanan dan mendukung partisipasi organisasi pekerja perikanan dalam diskusi penetapan kebijakan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala ekonomi dan politik yang mereka hadapi dan pengakuan tentang cara-cara perubahannya. Rangkuman negara berikut ini merupakan gambaran singkat pada masanya, yang membantu menggambarkan berbagai pendekatan dalam pengorganisasian, yang hampir semuanya akan berubah seiring munculnya tantangan dan peluang.

3.2 Indonesia



3.2.1 Tinjauan industri

Indonesia memiliki salah satu Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*, EEZ) terbesar di dunia, tetapi baru pada tahun 2014 pemerintah Indonesia berupaya mengendalikan perikanan Indonesia dan mengusir kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Selama dua periode jabatan Presiden Joko Widodo (2014–24), pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitasnya untuk mengawasi perairan dan memperkuat sektor perikanan maritim. Langkah-langkah tambahan yang diambil selama masa jabatan Jokowi termasuk meratifikasi *Port State Measures Agreement* (PSMA), melarang transshipment, dan menjadi negara pertama yang membagikan data Vessel Monitoring System (VMS) dengan *Global Fishing Watch* (GFW), meskipun dengan penundaan selama 72 jam (CEA Consulting 2018). Sejak pergantian abad, nilai produk perikanan Indonesia meningkat dua kali lipat, dari US\$1,43 miliar pada tahun 1999 menjadi US\$3,07 miliar pada tahun 2019. Namun, pangsa pasar perikanan Indonesia terhadap para pesaingnya dalam perdagangan di sektor perikanan global menurun dari 4,11 persen menjadi 2,75 persen, meskipun sektor ini tumbuh sebesar 200 persen selama periode yang sama. Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar kedua di dunia setelah China dan pemerintah terus meningkatkan investasi untuk infrastruktur pelabuhan. Namun, negara ini masih kesulitan menerapkan usulan rencana berbasis kuota untuk manajemen perikanan (Gokkon 2023a).

Lebih dari satu juta orang Indonesia bekerja di sektor perikanan tangkap laut, tetapi pekerja perikanan di kapal industri berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun dengan estimasi yang sangat bervariasi, beberapa peneliti memperkirakan sebanyak 250.000 pekerja perikanan AKP berada di luar negeri antara tahun 2013 dan 2015 (IOJI 2022) dan setidaknya satu set analisis data menunjukkan bahwa warga Indonesia merupakan korban kerja paksa terbesar di sektor perikanan (Bukharin 2020). Kondisi di kapal-kapal industri berbendera Indonesia juga sangat rentan. Mereka memperoleh penghasilan enam hingga delapan kali lebih sedikit daripada mereka yang bertahan hidup untuk bekerja di DWF. Mereka juga menjadi sasaran kerja paksa dan berisiko menghadapi kematian (Mochtar dkk. 2023).

3.2.2 Tren dan hambatan kebijakan

Beberapa dinamika kebijakan memengaruhi pengorganisasian di kalangan pekerja perikanan Indonesia di sektor industri, termasuk dalam perlindungan bagi AKP migran yang pergi ke luar negeri, regulasi pelanggaran ketenagakerjaan di armada kapal Indonesia, dan upaya pemerintah untuk bersaing secara internasional.

Kebijakan migrasi yang tidak konsisten. Sejak 2013, Indonesia telah mengalami kesulitan dengan peraturan yang saling bertentangan dan kurangnya koordinasi antara lembaga negara utama yang mengawasi kontrak pekerja migran: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun, pada tahun 2024, badan khusus yang bertanggung jawab atas pekerja migran (sebelumnya disebut BP2MI) ditingkatkan menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Para pihak yang mengadvokasi kebijakan berharap kementerian baru tersebut akan mengonsolidasikan regulasi terkait agen perekrutan. Putusan terbaru oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya memberikan semua pekerja migran, termasuk pekerja darat, Pekerja Perikanan, dan pelaut, perlindungan yang sama di setiap tahap migrasi (IOJI 2024). Namun, Kemenhub akan terus memiliki peran penting, mengingat kehadiran mereka di pelabuhan dan fakta bahwa banyak agen perekrutan telah menandatangani perjanjian negosiasi kolektif (CBA, *collective bargaining agreements*) tiga arah dengan pemilik kapal dan serikat pekerja yang disetujui oleh Kemenhub. Perlu diperhatikan, persyaratan bahwa agen perekrutan harus menandatangani CBA dengan serikat pekerja agar dapat mengirim pekerja perikanan ke luar negeri melalui DWF menciptakan insentif yang merugikan bagi CBA yang tidak melakukan negosiasi dengan pemilik kapal, yakni pihak mempekerjakan kapten yang kemudian akan mengelola pekerja perikanan (Liu et al. 2024).

Kontradiksi kebijakan dalam perlindungan pekerja perikanan dalam negeri. Terdapat pula pedoman yang saling bertentangan untuk mengatur hak-hak pekerja perikanan di armada kapal domestik. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengizinkan 91 jam kerja per minggu (Peraturan 27/2021) sementara pedoman Kementerian Kelautan menetapkan 40 jam seminggu dan menetapkan hari istirahat dan lembur maksimum. (Arif 2023). Di Manado, di mana terdapat kelompok inspeksi antar kementerian, pengawas ketenagakerjaan yang diwawancarai berkomentar bahwa keluhan utama dari para pekerja meliputi kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan, kesulitan dalam berganti pekerjaan, dan kurangnya kejelasan tentang cara menentukan jam kerja dan waktu istirahat saat melaut (wawancara di Manado, Desember 2022). Wawancara dengan para Pekerja Perikanan mengungkap pelanggaran yang lebih parah lagi, termasuk permainan harga, jeratan utang, dan pemukulan (Mochtar 2023).

Kurangnya perlindungan berbasis pelabuhan. Indonesia masih mengkaji kemungkinan penerapan C 188 terkait pekerjaan di bidang perikanan. Jika C 188 diadopsi, penerapannya memerlukan proses yang dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian dan memerlukan peningkatan keselamatan di kapal Indonesia. Namun, ratifikasi PSMA oleh Indonesia pada tahun 2016 hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Hanya empat dari 2.459 pelabuhannya yang menerapkannya hingga pertengahan tahun 2023 (Gokkon 2023b). Namun, pemerintah telah mengumumkan upaya baru untuk membuat lebih banyak pelabuhan mematuhi peraturan (Gokkon 2023b). Para pendukung C 188 dapat memperkuat argumen mereka jika mereka dapat menyoroti sinergi dalam penerapan kedua perjanjian tersebut, yang mungkin dibangun berdasarkan pembelajaran dari inspeksi antar kementerian di Manado.

Baru-baru ini, sekelompok LSM dan serikat pekerja perikanan bersatu membentuk koalisi untuk mengadvokasi C 188, sebuah proses yang dapat memajukan Konvensi dan memperkuat kolaborasi lintas organisasi pekerja perikanan yang jumlahnya terus bertambah.

3.2.3 Pengorganisasian pekerja perikanan

Pekerja perikanan Indonesia telah memperoleh manfaat dari lonjakan pendanaan eksternal langsung dan tidak langsung, selama delapan hingga sepuluh tahun terakhir. *Safe Seas Project*, yang didanai oleh Departemen Tenaga Kerja AS, *Ship to Shore Rights Project* dari *International Labour Organization* (ILO), dan *Freedom Fund* adalah contoh program yang telah memberikan dukungan, termasuk pelatihan pra-keberangkatan bagi AKP migran, bantuan kasus hukum, dan pengembangan kapasitas organisasi. Penerima manfaatnya meliputi LSM dan serikat pekerja.

Meskipun ketiga organisasi yang diprofilkan dalam Tabel 1 terdaftar sebagai serikat pekerja, tidak ada yang terlibat dalam perundingan kolektif langsung dengan para pengusaha/pemberi kerja dari anggotanya. Akan tetapi, para pemimpin masing-masing organisasi berbicara tentang penjangkauan dan pengorganisasian kerja mereka dengan para pekerja perikanan, berbagai layanan yang mereka berikan, serta kerja advokasi dengan serikat pekerja lainnya.

Tabel 1. Organisasi Pekerja Perikanan, Indonesia

	Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu, Sulawesi Utara (SAKTI-SULUT), didirikan tahun 2021	Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), didirikan tahun 2003	Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), didirikan pada tahun 2013
Anggota	1.400 pekerja perikanan dan pengolah ikan	40 cabang di 107 desa, mencakup seluruh pekerja migran	Diperkirakan 10.000 AKP migran telah dilatih pada tahun 2023
Jenis Layanan	Pelatihan pra-keberangkatan, dukungan dengan keluhan (pembayaran aman), perawatan kesehatan	Pemrosesan dan pelacakan pengaduan; pembangunan komunitas; koperasi konsumen	Pelatihan pra-keberangkatan; manajemen pengaduan
Advokasi	Terkait dewan upah melalui proses tripartit lokal	Terkait perubahan peraturan AKP (22/2022); untuk ILO C 188	Terkait ILO C 188
Negosiasi dan iuran	Iuran yang dibebankan, termasuk biaya perawatan kesehatan; berpartisipasi dalam dialog sosial tentang upah minimum lokal, namun belum ada negosiasi langsung dengan pengusaha	Tidak ada iuran atau biaya, namun cabang-cabang mereka menyumbang dana melalui koperasi konsumen yang disebut SBMI-Marts; mereka belum mengarah padanegosiasi dengan para pengusaha	Biaya pelatihan; menandatangani CBA 3 arah dengan agen perekrutan dan pemilik kapal yang diwakili oleh agen tersebut
Kepemimpinan	Ketua dan pendiri: Arnon Hiburong, bersama 3 orang lainnya	Ketua Hariyanto Suwarno; jangka waktu 4 tahun; maks. 3 masa kepemimpinan	Ketua dan pendiri: Ilyas Achdiento Pangestu

Pengorganisasian AKP migran di Indonesia berkembang pesat baik sebagai repons terhadap tuntutan pekerja perikanan akan pelatihan yang dibutuhkan maupun sebagai upaya mendapatkan ganti rugi ketika mereka terluka atau jika upah mereka tidak dibayarkan. Serikat pekerja dan LSM pendukung juga telah menerima pendanaan dari luar dari yayasan swasta, donor pemerintah bilateral, dan lembaga multilateral untuk memerangi perdagangan manusia di laut dan mendukung pengorganisasian.

Setiap serikat pekerja memiliki strategi yang sedikit berbeda untuk membangun basisnya. SAKTI-SULUT mengorganisasikan diri secara lokal, di pelabuhan, untuk melibatkan AKP migran, pekerja perikanan rumah tangga,

dan kini juga istri pekerja perikanan yang bekerja di pengolahan makanan laut setempat. Serikat pekerja ini menggunakan proses tripartit lokal untuk mencoba menegosiasikan kenaikan upah pekerja perikanan tetapi belum menegosiasikan CBA dengan pemberi kerja. SBMI adalah serikat pekerja terdaftar yang beroperasi lebih seperti gerakan sosial. Didirikan oleh pekerja migran yang bekerja di sektor domestik, SBMI kini mendukung semua pekerja migran; serikat pekerja ini telah mendirikan kantor cabang di 40 lokasi dan hadir di 107 desa di seluruh Indonesia (Suwarno, Fritzner, dan Gearhart 2024). Serikat pekerja ini mendukung pengajuan pengaduan pekerja perikanan dan telah membangun kapasitas advokasi yang kuat. Para pemimpinnya menekankan solidaritas yang telah dibangun di antara para anggotanya, tetapi serikat pekerja ini belum berupaya untuk menegosiasikan CBA (Suwarno, Fritzner, dan Gearhart 2024). SPPI telah mendirikan pusat pelatihan di Jawa Barat yang menyediakan pelatihan pra-keberangkatan dan membantu memproses pengaduan pekerja perikanan yang menjadi anggota. Pendekatan SPPI terhadap perjanjian kerja sama tiga pihak yang ditandatangani dengan pemilik kapal dan agen perekrutan telah mengikuti format yang digunakan serikat pelaut dalam menandatangani perjanjian kerja sama yang kemudian divalidasi oleh Kementerian Perhubungan.

3.2.4 Langkah berikutnya

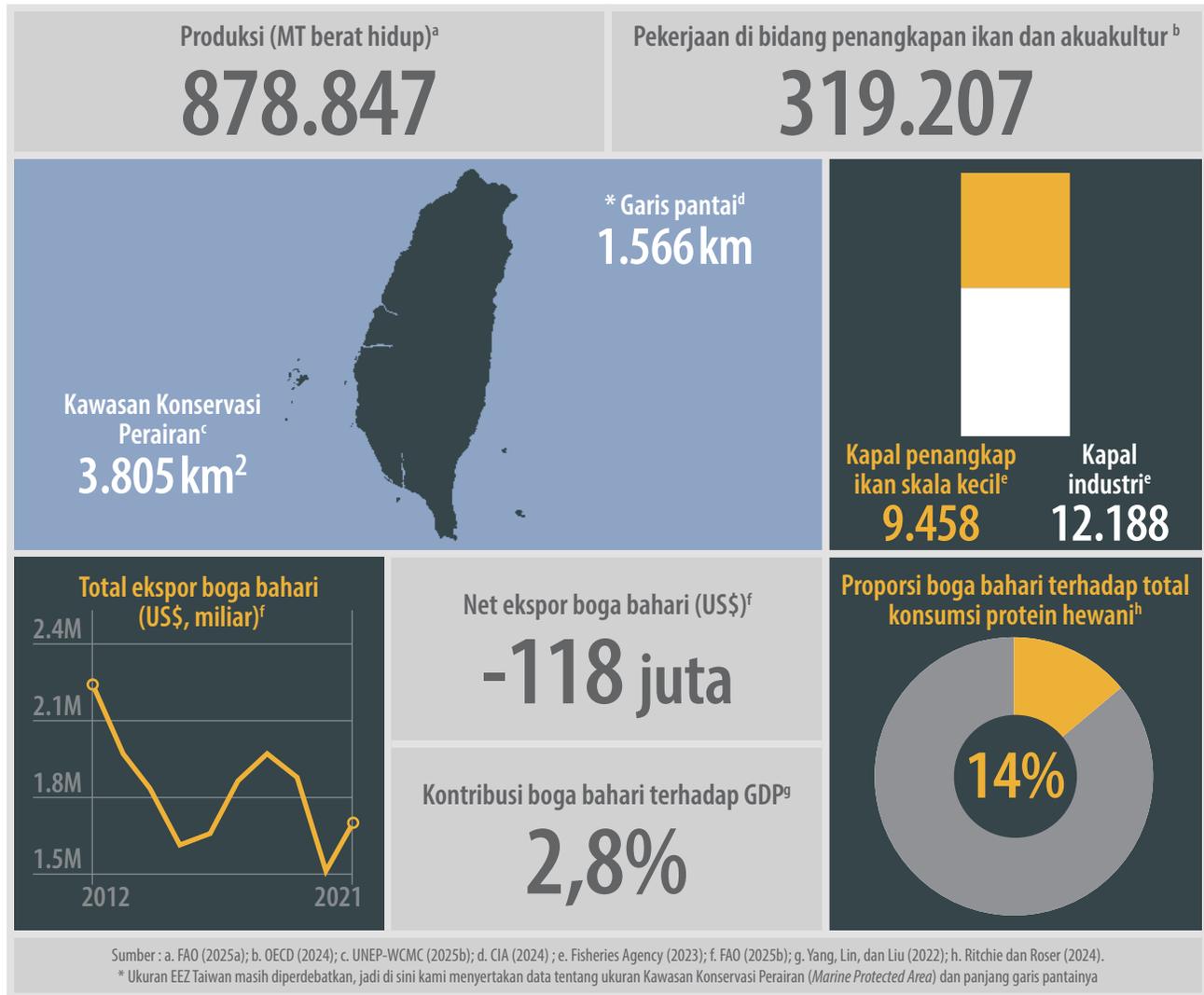
Mengingat pendekatan yang berbeda yang diambil oleh serikat-serikat ini dalam mendukung dan mewakili pekerja perikanan, mungkin sulit untuk menyelaraskan pengorganisasian mereka dengan cara yang membangun basis kekuatan yang lebih luas dan kemampuan mereka untuk menghadapi dan melakukan protes pada pengusaha. Agar hal itu dimungkinkan, mereka membutuhkan struktur demokrasi yang kuat dan kapasitas untuk mewakili pekerja perikanan secara langsung. Hal ini sulit dilakukan mengingat sulitnya komunikasi dengan AKP migran, yang hanya mereka temui selama pelatihan pra-keberangkatan atau saat mereka kembali dan membutuhkan bantuan penanganan keluhan. Saat ini, mereka berkumpul untuk mencapai tujuan advokasi tertentu, seperti advokasi terkini bagi Indonesia untuk meratifikasi ILO C 188. Beberapa serikat pekerja telah menyatakan minat untuk berafiliasi dengan ITF. Ini bisa menjadi jalur yang baik bagi serikat pekerja untuk memperkuat struktur internal dan kemampuan mereka untuk bernegosiasi dengan pengusaha.



Jaringan Buruh Migran (JBM) memberikan masukan terhadap revisi UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025.

Kredit: Tim SBMI

3.3 Taiwan



3.3.1 Tinjauan industri

Armada Taiwan yang berjumlah sekitar 21.646 kapal termasuk armada DWF terbesar kedua di dunia (sekitar 1.100 kapal) setelah Tiongkok (Fishery Agency, 2023). Jumlah ini mencakup kapal-kapal milik Taiwan yang menggunakan *flags of convenience* (FOC), yang menurut para pejabat setempat, jumlahnya sekitar 200, namun menurut perkiraan pihak lain jumlahnya tiga kali lipat (Chiang dan Rogovin 2020; EJF 2020). Jumlah tenaga kerja di sektor perikanan tangkap adalah 305.868 orang. Tenaga kerja migran menyumbang 62 persen tenaga kerja di armada perikanan tangkap dan 13 persen di sektor perikanan pesisir dan lepas pantai (Fishery Agency, 2023).

3.3.2 Tren dan hambatan kebijakan

Risiko tinggi penangkapan ikan IUU dan pelanggaran ketenagakerjaan di sektor DWF Taiwan berimbas pada “kartu kuning” dari Uni Eropa pada tahun 2015 dan tekanan signifikan dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP, *Customs and Border Protection*) mulai tahun 2019. Setelah pemerintah bekerja untuk “mereformasi kerangka hukum perikanan, menerapkan alat kontrol baru dan meningkatkan keterlacakan produk perikanan laut,” (Karmenu Vella dalam European Commission 2019), Komisi UE mencabut kartu kuning pada tahun 2019, dan CBP memodifikasi

Withhold Release Orders (WRO) terhadap dua kapal berbendera Taiwan pada tahun 2020 dan 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah menanggapi tekanan internasional untuk memerangi penangkapan ikan IUU dan kerja paksa di kapalnya dengan memberlakukan atau mengubah peraturan dan berkomitmen untuk mengabsorpsi perjanjian internasional, termasuk ILO C 188 dan PSMA.

Namun, penerapan perbaikan ini masih tertinggal. Taiwan belum mengadopsi dan menerapkan ILO C 188 atau PSMA. Selain itu, meskipun Rencana Aksi untuk Perikanan dan Hak Asasi Manusia mencakup beberapa ketentuan utama seperti peningkatan inspeksi, subsidi untuk Wi-Fi, dan langkah-langkah ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan lainnya, kebijakan dan implementasinya masih sangat tidak memadai dalam menjamin hak-hak AKP migran, karena gagal mengatasi kerentanan sistemik yang dialami AKP migran berikut ini.

Pengecualian dari perlindungan tenaga kerja. Taiwan menganggap AKP migran yang bekerja di sektor perikanan tangkap sebagai pekerja di luar negeri, menempatkan mereka secara administratif di bawah naungan Badan Perikanan (*Fisheries Agency*) dan bukan Kementerian Tenaga Kerja (*Ministry of Labor*). Hal ini secara efektif mengecualikan mereka dari undang-undang ketenagakerjaan nasional, sehingga memberikan mereka perlindungan yang lebih sedikit (Liu dan kawan-kawan, 2024). Misalnya, upah minimum mereka hanya dua pertiga dari upah minimum nasional; jam kerja yang panjang; serta asuransi dan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan yang lemah.

Aturan visa yang ketat. Taiwan memiliki rezim visa ketat untuk pekerja migran, di mana AKP migran di penangkapan ikan perairan laut lepas, serta penangkapan ikan pesisir dan lepas pantai, direkrut sebagai pekerja sementara dan memperoleh visa yang bergantung pada pekerjaan mereka. Ini berarti bahwa jika pemilik kapal mengakhiri kontrak pekerja perikanan—misalnya, sebagai balasan karena mengeluh tentang kondisi di atas kapal—maka pekerja perikanan tersebut akan segera dideportasi setelah tiba di pelabuhan. Ini juga menghalangi AKP migran untuk berganti majikan dan pindah kapal setelah dipekerjakan. Sebaliknya, biasanya, pekerja perikanan yang ingin berganti kapal harus mengakhiri kontrak mereka, kembali ke negara asal mereka, dan menjalani proses perekrutan lagi, termasuk membayar kembali biaya perekrutan. Sistem ini menghambat banyak pekerja perikanan untuk berbicara tentang pelanggaran ketenagakerjaan atau meninggalkan tempat kerja yang eksploitatif.



Perayaan ulang tahun FOSPI-PMFU ke-18, 2025.

Kredit: Johanna Lee

Utang terkait perekrutan. Meskipun Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia Taiwan bermaksud untuk memastikan upah dibayarkan langsung kepada awak kapal, sebagian besar pekerja perikanan tetap dibayar melalui agen perekrutan (Liu et al. 2024). Hal ini memungkinkan agen perekrutan memotong gaji pekerja perikanan sebagai pengganti biaya terkait perekrutan dan biaya di atas kapal, sehingga menjebak pekerja perikanan dalam siklus utang.

Hambatan dalam pengorganisasian. Kendala hukum dan penerapan terus menjadi kendala AKP migran untuk berorganisasi dan mencari penyelesaian ketika hak-hak mereka terancam atau telah dilanggar. Meskipun Undang-Undang Serikat Perburuhan Taiwan telah memberikan hak kepada pekerja migran untuk membentuk dan memimpin serikat mereka sendiri sejak tahun 2011, para migran menghadapi tantangan dalam menjalankan kebebasan berserikat mereka karena persyaratan hukum yang sulit dan kendala praktis seperti isolasi, kendala bahasa, dan kendala keuangan.

3.3.3 Pengorganisasian pekerja perikanan

Ada tiga serikat pekerja profesional yang mengorganisasi AKP migran yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Taiwan. Tabel 2 memberikan gambaran umum tingkat tinggi dari masing-masing organisasi, termasuk layanan dan tujuan advokasi mereka yang berbeda.

Tabel 2. Organisasi Pekerja Perikanan, Taiwan

	<i>Yilan Migrant Fishermen's Union (YMFU), didirikan pada tahun 2013</i>	<i>Keelung Migrant Fishermen's Union (KMFU), didirikan tahun 2021</i>	<i>Pingtung County Migrant Fishermen's Union, formed by the Indonesian Seafarers' Gathering Forum (FOSPI-PMFU), 2022</i>
Anggota	106 anggota, mayoritas Indonesia, minoritas Filipina	Sekitar 200 anggota	2.300 anggota, pekerja perikanan DWF Indonesia
Jenis Layanan	Donasi dan perlengkapan untuk pekerja perikanan; pendidikan hak asasi manusia; dokumentasi kasus pelanggaran hak asasi pekerja perikanan	Penjangkauan ke sekolah-sekolah menengah atas untuk mengajarkan tentang budaya Indonesia dan pelanggaran yang dilakukan AKP migran; dukungan selama perselisihan perburuhan;	Jaringan sosial (13 asosiasi kampung halaman regional); kegiatan budaya; menyediakan tempat berteduh sementara di pelabuhan
Advokasi	Terkait alat pelindung diri; larangan FOC; menutup celah yang merugikan bagi pekerja migran	Akan bernegosiasi dengan departemen ketenagakerjaan	FOSPI membangun masjid di dekat pelabuhan pada tahun 2018; mendorong <i>Wi-Fi Now</i> untuk Hak pekerja perikanan di Laut; perjanjian migrasi tenaga kerja bilateral Taiwan-Indonesia; kenaikan upah minimum untuk AKP migran di sektor perikanan laut lepas
Negosiasi dan iuran	Tidak ada iuran; Sekretaris Jenderal mendampingi pemerintah dalam inspeksi tenaga kerja perikanan	Tidak ada biaya; akan bernegosiasi dengan agen perekrutan dan pemberi kerja	Mengumpulkan iuran dan berusaha bernegosiasi dengan pengusaha
Kepemimpinan	Li Hua (Allison) Lee, Pendiri dan Sekretaris Jenderal	Mei Hua Lee, Sekretaris Jenderal	Achmad Mudzakir, Ketua

Sebagai tanggapan atas upaya pengorganisasian mereka, para pemimpin dan anggota serikat pekerja mengalami tindakan balasan, seperti gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh pengusaha dan calo tenaga kerja, upaya untuk mengganggu ketergantungan serikat pekerja, dan intimidasi terhadap pekerja perikanan yang menyuarakan kondisi di atas kapal. Dalam menghadapi tantangan ini, AKP migran di Taiwan terus berorganisasi dan membangun kekuatan dengan harapan dapat bernegosiasi dengan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tawar-menawar kolektif dan kesepakatan rantai pasokan yang dapat diberlakukan. Mereka juga mulai bekerja sama dengan serikat pekerja di Indonesia untuk mengadvokasi perjanjian migrasi tenaga kerja bilateral antara Indonesia dan Taiwan yang melindungi hak-hak AKP migran.

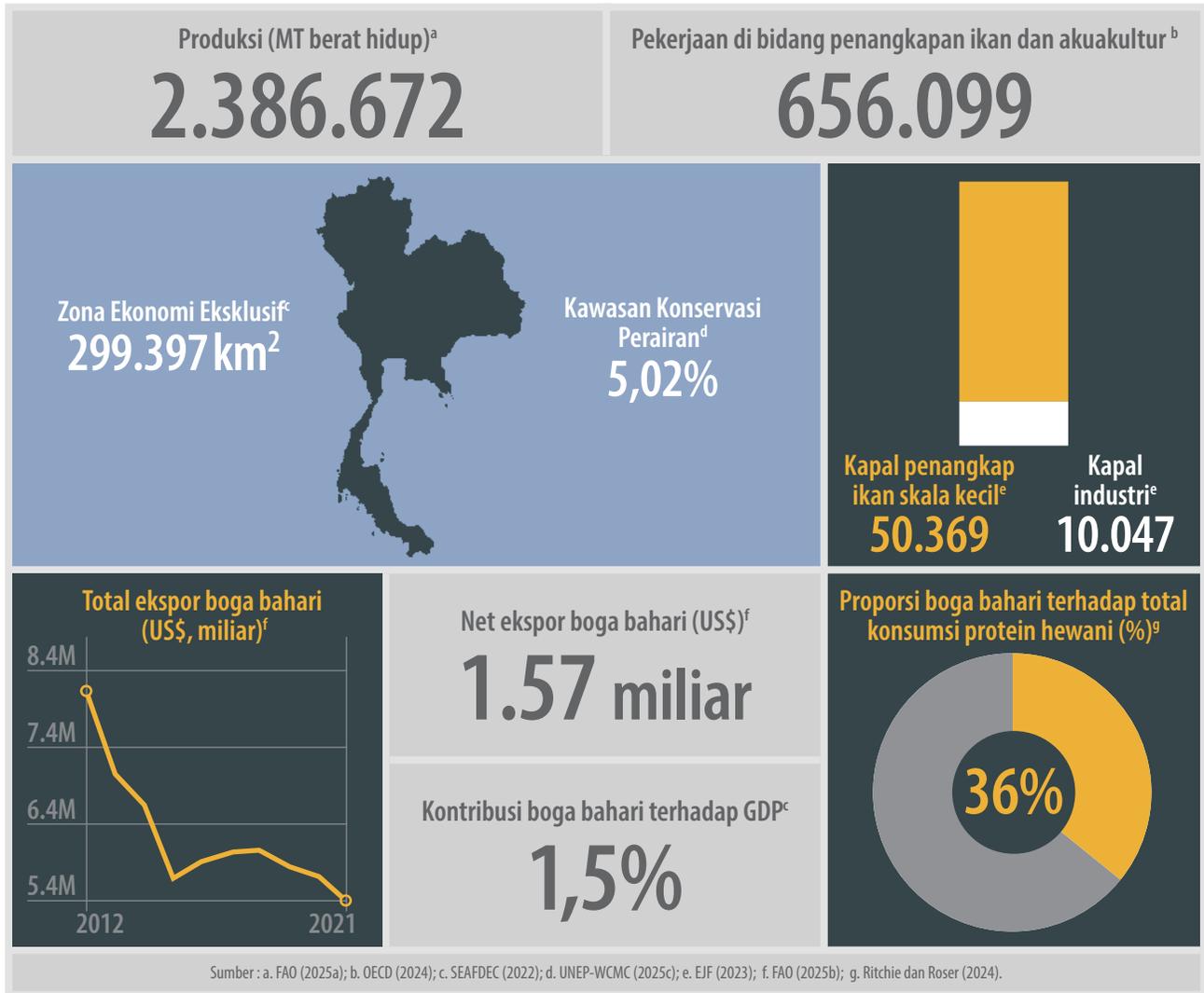
3.3.4 Langkah berikutnya

Sejak 2023, kampanye *Wi-Fi Now for Fishers' Rights at Sea*, yang dipimpin oleh FOSPI-PMFU dan sekutunya di AS dan Taiwan, telah mengadvokasi agar pemerintah Taiwan mewajibkan Wi-Fi di kapal-kapal DWF Taiwan. Selain memungkinkan pekerja untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka, memastikan pembayaran gaji tepat waktu, dan mendukung hubungan sosial serta kesehatan mental mereka, akses ke Wi-Fi di laut sangat penting untuk memungkinkan pekerja perikanan menjalankan kebebasan berserikat mereka. Akses ini memberdayakan mereka untuk berorganisasi dan memperkuat kemampuan serikat pekerja untuk berunding bersama atas nama anggota. Kampanye ini telah menetapkan lima kriteria untuk memastikan akses dan efektivitasnya dalam menegakkan hak-hak pekerja perikanan:

1. Regulasi Wi-Fi harus bersifat wajib, bukan sukarela, dan mencakup sanksi jika tidak dipatuhi.
2. Pemilik kapal harus berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar buruh pekerja perikanan.
3. Pedoman tentang akses Wi-Fi yang wajar harus dikembangkan untuk memastikan bahwa Wi-Fi gratis dan dapat diakses oleh semua pekerja perikanan.
4. Proses penyelesaian konflik harus dikembangkan di atas kapal, yang dirancang bersama dan ditegakkan bersama dengan serikat pekerja perikanan, dan akan memungkinkan keluhan diselesaikan secara langsung.
5. Penegakan hukum harus diperkuat melalui tindakan antarlembaga.

Kampanye ini bertujuan untuk menggunakan kriteria ini sebagai dasar perjanjian rantai pasokan yang dapat diberlakukan antara FOSPI, pemilik kapal Taiwan, dan merek/ritel AS yang mendapatkan makanan laut dari Taiwan. Lebih jauh, sebagai bagian dari Koalisi Perlindungan AKP Migran Indonesia di Kapal Penangkap Ikan Taiwan, yang menyatukan serikat pekerja Taiwan dan Indonesia, FOSPI telah mengajukan tuntutan—yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak dasar buruh pekerja perikanan, kebebasan berserikat, akses ke Wi-Fi, perlindungan terhadap pembalasan, penanganan keluhan, perjanjian tawar-menawar kolektif, upah yang adil, dan prinsip pemberi kerja membayar (*employers pay principle*)—kepada pemerintah Taiwan dan Indonesia saat mereka merundingkan perjanjian migrasi tenaga kerja bilateral dan hak-hak AKP migran.

3.4 Thailand



3.4.1 Tinjauan industri

Thailand adalah eksportir boga bahari terbesar ketiga di dunia pada tahun 2013 (McDowell dan Mason 2015), namun nilai ekspor ikan dan produk perikanan Thailand telah menurun, sehingga menjadi negara dengan ekspor terbesar keenam pada tahun 2019 (Thammachote dan Inthisang Trochim 2023) Negara tersebut merupakan rumah bagi dua dari sepuluh perusahaan penghasil boga bahari terbesar di dunia, Thai Union dan CP Foods, tetapi beberapa analis berpendapat bahwa industri perikanan sedang mengalami kemerosotan karena kurangnya investasi dan peningkatan armada.² Hal ini tentu saja akan berdampak pada margin keuntungan pemilik kapal. pekerja perikanan mungkin akan menanggung beban terbesar dari hal ini dan pemilik kapal telah menolak reformasi regulasi (EIJ 2023).

Menyusul tekanan perdagangan dan diplomatik yang signifikan dari AS dan UE, Thailand melakukan reformasi kebijakan antara tahun 2015 dan 2019, untuk mengatasi tingginya angka kerja paksa dan perdagangan manusia pada armada penangkapan ikannya dan pelanggaran IUU yang meluas. Reformasi tersebut mencakup pengurangan waktu di laut, larangan transshipment di laut, ratifikasi C 188, dan pembuatan program inspeksi kapal. Sayangnya, penerapan jaminan sosial berkisar dari tidak konsisten hingga tidak efektif, dan meskipun tata kelola perikanan

telah membaik, stok ikan yang menipis baru mulai menunjukkan perbaikan (EJF 2023). Meskipun pelaksanaannya masih belum jelas, para pendukung keadilan lingkungan dan hak-hak pekerja perikanan kini berjuang untuk mempertahankan reformasi, meskipun menghadapi penolakan keras dari para pemilik kapal, yang diwakili oleh Asosiasi Pekerja Perikanan Nasional Thailand (*National Fishers Association of Thailand, NFAT*).

3.4.2 Tren dan hambatan kebijakan

Industri boga bahari Thailand mempekerjakan sebagian besar pekerja migran dari Myanmar dan Kamboja, dan hak-hak mereka menjadi pusat tekanan perdagangan terhadap Thailand. Meskipun dekade terakhir membawa beberapa perbaikan dan peluang bagi pengorganisasian pekerja perikanan, banyak dari migran ini masih harus membayar biaya yang dibayarkan majikan mereka kepada broker untuk memproses dokumen mereka. Biaya ini dan biaya tak terduga lainnya membuat mereka berutang kepada majikan mereka. Bahkan ketika agen perekrutan di Kamboja, misalnya, mengklaim bahwa mereka tidak lagi membebankan biaya kepada pekerja, pekerja perikanan menceritakan bahwa majikan di Thailand masih memotong biaya tersebut dari upah mereka setelah mereka tiba.³ Yang mungkin lebih buruk adalah sifat yang melekat pada praktik-praktik tertentu, yang menunjukkan tingginya tingkat risiko kerja paksa di AKP migran dan hambatan terhadap usaha peningkatan perlindungan pekerja.

Kebijakan yang tidak konsisten. Dua undang-undang yang penting dalam penerapan ILO C 188 adalah Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Perikanan Tahun 2019/*Labor Protection in Fishing Work Act* (BE 2562) dan Peraturan Menteri Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Perikanan Laut/*Labour Protection in Sea Fishery Work* (BE2565). Kelompok Kerja Migran Thailand melaporkan bahwa kedua undang-undang tersebut menciptakan redundansi dan menawarkan persyaratan yang berbeda pada isu-isu seperti akomodasi dan makanan, kewenangan dan tugas inspektur, dan apakah nakhoda adalah pemberi kerja atau karyawan (MWG 2023).



Pheaktra, seorang relawan pengorganisir di CENTRAL, membantu seorang nelayan membersihkan jaringnya.

Kredit: Judy Gearhart

Penegakan hukum yang lemah. Saat ini terdapat 30 stasiun inspeksi pelabuhan masuk dan keluar (*port in-port out*, PIPO) di Thailand, yang seiring berjalannya waktu telah meningkatkan layanan *interpreter* dan mengembangkan tim inspeksi multidisiplin. ILO C 188 telah memungkinkan dialog mengenai inspeksi PIPO, namun para organisator pekerja perikanan marah ketika pemerintah melaporkan bahwa inspektur PIPO hanya menemukan 20 pelanggaran hukum ketenagakerjaan dari 55.818 inspeksi kapal penangkap ikan dilakukan di pelabuhan, dan hanya satu pelanggaran ketenagakerjaan dari 842 inspeksi di laut pada tahun 2020 (Hartough dan Gearhart 2024).

Kurangnya akses untuk mendapatkan layanan pelabuhan telah meningkatkan risiko. Bahkan bagi AKP migran di Thailand yang memiliki dokumen yang sah, mereka masih terikat dengan kapal mereka di pelabuhan. Anggota FRN melaporkan bahwa ketika mereka tiba di stasiun PIPO, inspektur mengambil foto mereka dengan memegang dokumen identitas, tetapi kapten akan mengambilnya lagi setelah pemeriksaan selesai. Jika mereka pergi terlalu jauh ke kota dan kapten akan curiga. Kapten dapat melaporkan mereka ke pihak berwenang, yang membuat mereka berisiko ditangkap tanpa dokumen kerja dan didenda, dipenjara, atau dideportasi tanpa gaji (FRN dan Gearhart 2024).

Jeratan hutang. Ketergantungan Thailand pada tenaga kerja murah berarti ada banyak jalur bagi AKP migran untuk mendapatkan dokumen kerja setelah kedatangan. Di Kamboja, di mana pemerintah telah melarang AKP migran dan agen perekrutan dianggap lambat dan mahal, banyak pekerja perikanan memilih untuk bermigrasi secara informal dan mendapatkan dokumen kerja melalui pemberi kerja mereka setelah kedatangan. Akibatnya, banyak pemberi kerja memotong biaya perekrutan dan pengeluaran lainnya setelah pekerja perikanan dipekerjakan, yang berarti bahwa banyak pekerja perikanan di kapal Thailand masih terjerat utang.

Penindasan dan ketakutan untuk ikut berorganisasi. Undang-undang Thailand membuat pengorganisasian serikat pekerja menjadi sangat sulit. Ada jeda waktu antara pendaftaran serikat pekerja (hanya sepuluh pekerja yang dibutuhkan) dan pengaman hak untuk berunding bersama (20 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan), di mana anggota pertama rentan dipecat. Selain itu, kategori pekerja dalam undang-undang menunjukkan bahwa subkontraktor tidak dapat berorganisasi dengan pekerja tetap dan pekerja migran tidak dapat memimpin atau membentuk serikat pekerja mereka sendiri. Batasan terhadap pengorganisasian pekerja migran khususnya menjadi masalah di sektor perikanan, di mana jarang ada warga negara Thailand di antara para awak kapal. Tantangan-tantangan ini, dikombinasikan dengan maraknya jeratan utang, membuat pertumbuhan gerakan serikat pekerja yang independen dan mandiri menjadi tantangan.

Kekhawatiran ditangkap dan dideportasi. Banyak pekerja migran yang menerima surat kerja melalui majikan mereka menghadapi deportasi jika dipecat, tetapi ketakutan itu diperkuat oleh komitmen terbaru Thailand terhadap negara-negara tetangga, ASEAN. Negara-negara utama asal AKP migran—Kamboja, Laos, dan Myanmar—semuanya melakukan tindakan represif transnasional, menuntut Thailand untuk memulangkan individu-individu yang mereka minta, yang akan ditahan setelah tiba di negara tujuan (Freedom House 2022). Bahkan bagi pekerja perikanan yang bukan pembangkang politik aktif, ada ketakutan yang meluas yang dapat menghambat pekerja perikanan untuk berbicara atau bergabung dengan suatu organisasi.

3.4.3 Pengorganisasian pekerja perikanan

Meskipun ancaman yang dihadapi AKP migran di Thailand masih terus berlanjut dan menyeluruh, para pekerja migran berorganisasi dan beraliansi dengan serikat pekerja. Berbeda dengan pekerja perikanan yang berorganisasi di Indonesia, pekerja perikanan dan pekerja pengolahan boga bahari di Thailand tidak dapat memperoleh pengakuan hukum sebagai serikat pekerja. Meskipun demikian, mereka telah secara aktif berupaya untuk terlibat dalam representasi kolektif dan perundingan dengan pengusaha, meskipun hal ini tidak memberikan perlindungan yang sama seperti kepada perwakilan serikat pekerja, terhadap risiko tindakan balasan. Akibatnya, beberapa kelompok seperti MWSC mampu meningkatkan fokus kerja mereka untuk mendapatkan ganti rugi bagi pekerja perikanan.

Tabel 3. Organisasi Pekerja Perikanan, Thailand

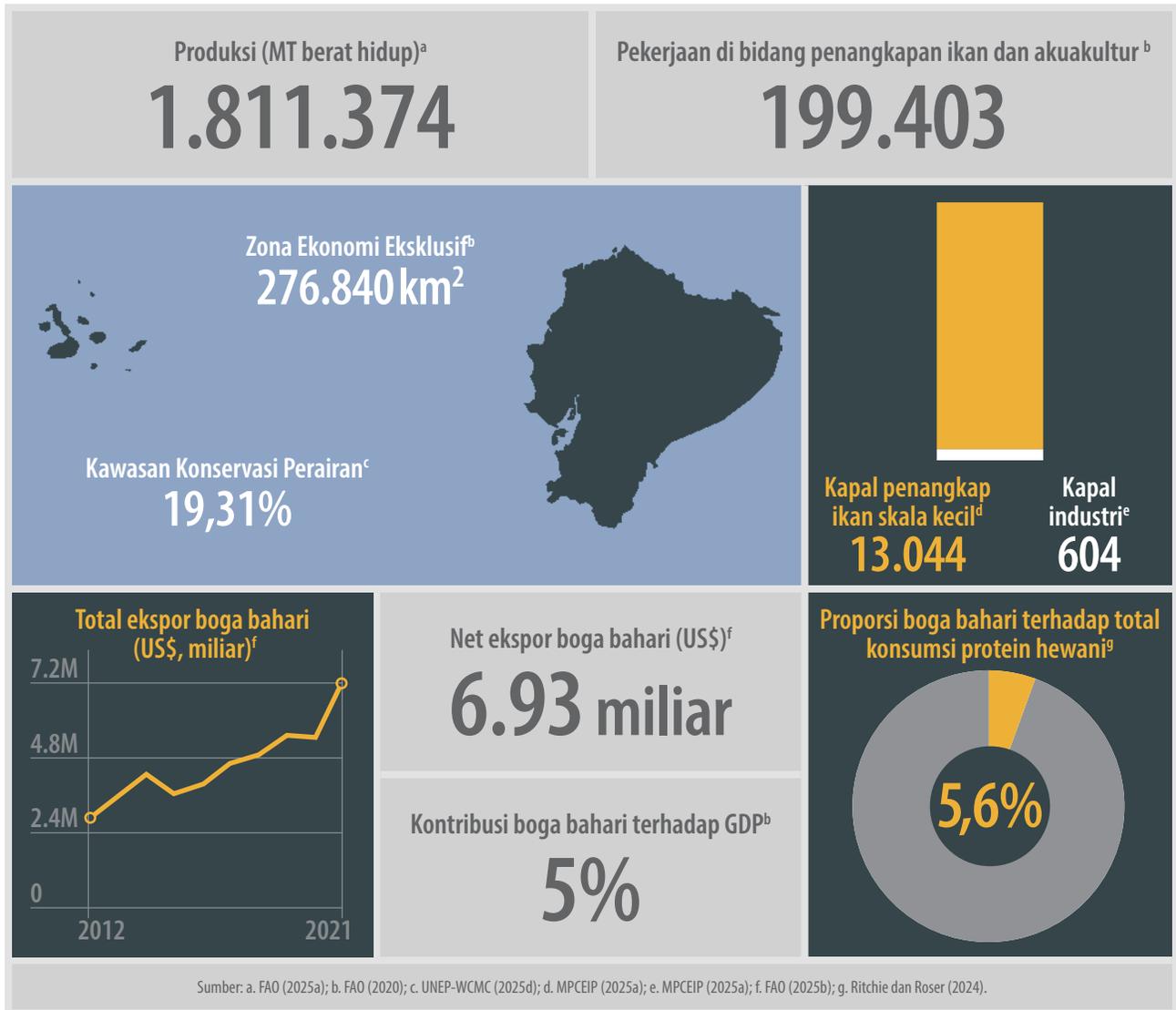
	<i>Migrant Worker Rights Network (MWRN), didirikan tahun 2009</i>	<i>Migrant Worker Solidarity Committee (MWSC), didirikan tahun 2022</i>	<i>Fisher Rights Network (FRN), didirikan tahun 2018</i>
Anggota	Sekitar 1.200 anggota, sebagian besar bergerak di sektor pengolahan boga bahari	618 anggota, sebagian besar bergerak di sektor pengolahan boga Bahari (24 AKP migran)	4.000 anggota di 3 pelabuhan Thailand
Jenis Layanan	Pelatihan komputer dan bahasa; bantuan hukum; pendidikan	Bantuan hukum; pengembangan kapasitas; intervensi terjadinya krisis/ masalah; pembangunan jaringan sebaya.	Pelatihan dan perlengkapan pertolongan pertama; dukungan pengaduan; pengembangan kapasitas
Advokasi	Melakukan advokasi dengan pihak pembeli (buyers); secara historis berpihak pada serikat pekerja Thailand	Selaras dan mendukung serikat pekerja Thailand	Berafiliasi dengan ITF; selaras dengan serikat pekerja Thailand
Negosiasi dan iuran	Tidak ada iuran. Bernegosiasi dengan merek tentang kondisi kerja dan biaya perekrutan, melalui komite kesejahteraan	400 Baht per tahun. Negosiasikan persyaratan yang lebih baik melalui komite kesejahteraan	Bebas biaya. Bernegosiasi dengan kapten/pemilik kapal untuk meningkatkan kondisi dan ketentuan kontrak.
Kepemimpinan	Sein Htay, Presiden	Lwin Moe Aung, Presiden	Pemimpin terpilih di setiap lokasi pelabuhan

3.4.4 Langkah Berikutnya

Mengingat bagaimana Thailand ditekan untuk meratifikasi Konvensi ILO C 188 sebagai respons terhadap perhatian global terhadap pelanggaran berat pada armadanya, proses perencanaan dan implementasi tidak membangun ruang dialog sosial yang kuat, seperti yang telah terjadi sebelum Ghana meratifikasi Konvensi tersebut. Proses semacam itu berpotensi untuk meningkatkan dan mempertahankan dukungan untuk implementasi Konvensi C 188. Penolakan NFAT terhadap reformasi yang membantu Thailand mematuhi Konvensi C 188 dan PSMA dapat mengindikasikan perlunya untuk kembali dan berinvestasi dalam strategi yang lebih panjang untuk membangun basis dan memfasilitasi dialog.

Selain itu, merek dan pengecer internasional, serta perusahaan ekspor makanan laut Thailand yang sangat besar, belum transparan tentang upaya mereka untuk mendukung reformasi. Mereka telah menyatakan dukungan secara terbuka untuk perlindungan yang lebih besar bagi AKP migran, tetapi tidak ada informasi publik yang menunjukkan bahwa mereka telah membiayai perubahan yang harus dilakukan oleh pemilik kapal. Khususnya, tidak ada alasan bisnis bagi mereka untuk melakukannya, mengingat sebagian besar ekspor dilakukan melalui perusahaan pemrosesan dan akuakultur. Singkatnya, perusahaan transnasional (TNC) dengan hubungan rantai pasokan dengan Thailand berkepentingan dengan reputasi negara dan kepatuhan terhadap norma internasional, tetapi industri perikanan domestik (terutama) yang harus membiayai sebagian besar reformasi.

3.5 Ekuador



3.5.1 Tinjauan industri

Ekuador merupakan salah satu negara penangkapan ikan terpenting di Amerika Latin. Negara ini menangkap 4 persen tuna dunia (FAO 2020b) dan memproses 500.000 ton, sekitar dua kali lipat dari yang ditangkapnya sendiri (Monterey Bay Aquarium and Sustainable Fisheries Partnership 2022). Negara ini telah menjadi pengeksport udang (kebanyakan hasil budidaya) terbesar di dunia, menyusul pesatnya pertumbuhan sektor akuakultur (Molinari 2023). Sektor ini telah menerima lebih dari US\$550 juta dalam bentuk pembiayaan dari International Financial Corporation (IFC) dan lembaga keuangan internasional lainnya, yang menimbulkan keluhan tentang persaingan tidak adil, sebagaimana dicatat oleh pekerja perikanan Meksiko yang diwawancarai, dan didokumentasikan oleh produsen udang AS (Southern Shrimp Alliance 2023).

Dengan armada sebanyak 20.000 kapal dan mempekerjakan hampir 600.000 orang secara langsung, sektor ini menghasilkan 5 persen dari PDB negara tersebut (FAO 2020b). Meskipun penting secara ekonomi, hewan laut hanya menyumbang 5,6 persen dari konsumsi protein hewani rata-rata penduduk Ekuador. Badan yang mengatur

perikanan adalah Sub-sekretariat Sumber Daya Perikanan, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Luar Negeri, Produksi, Investasi, dan Perikanan. Hal tersebut merupakan indikasi pentingnya industri perikanan bagi pendapatan ekspor negara tersebut. Kementerian Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi ketenagakerjaan kapal, tetapi program yang dijalankan oleh Departemen Tenaga Kerja AS, ILO, dan ITF masih berjalan dengan kapasitas yang rendah (ILAB 2024). Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Transisi Ekologi bertanggung jawab atas cagar laut.

Perjuangan Ekuador melawan IUU telah menarik perhatian internasional, termasuk kartu kuning dari Uni Eropapada tahun 2019 pekerja perikanan melaporkan penurunan stok ikan dan perjalanan melaut yang lebih jauh akibat penangkapan ikan yang berlebihan, terutama perambahan oleh kapal-kapal berbendera Tiongkok. Selain itu, AS telah bermitra dengan LSM dan Ekuador untuk mengatasi perdagangan hiu ilegal (American University CLALS and InSight Crime 2022). Meningkatnya kejahatan terorganisasi di Ekuador juga berdampak negatif pada sektor tersebut; pekerja perikanan beresiko menjadi korban pembunuhan dan perampokan di laut. Selain itu, kejahatan terorganisasi sering kali disertai korupsi pemerintah, yang semakin menjauhkan pekerja perikanan dari akses terhadap upaya hukum. Pekerja perikanan juga tidak memiliki cakupan jaminan sosial yang memadai dan harus berjuang keras untuk melindungi akses mereka terhadap perikanan. Ekuador telah meratifikasi PSMA dan menjadi peserta *Fisheries Transparency Initiative* (FITI), yang merupakan upaya merespon tujuan lingkungan internasional.



Tim ASOSALAN di Salango, Manabí, Ekuador.

Kredit: Gustavo Crespo

3.5.2 Tren dan hambatan kebijakan

Pemerintahan di Ekuador condong ke kanan. Sejak masa jabatan terakhir populis sayap kiri Rafael Correa pada tahun 2017, jabatan presiden telah dialihkan kepada Lenín Moreno yang pro-bisnis, mantan ekonom Bank Dunia Guillermo Lasso, dan saat ini kepada pewaris orang terkaya di Ekuador, Daniel Noboa. Laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2023 menemukan beberapa praktik anti-buruh, termasuk penargetan para pemimpin serikat pekerja dan kurangnya penegakan hukum di sektor informal (Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan/ *Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor* 2023). Para pekerja perikanan yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka difokuskan pada lima bidang berikut:

Keamanan fisik. IUU dan maraknya kejahatan terorganisasi membahayakan pekerja perikanan. Ekonomi Ekuador yang menggunakan dolar dan lokasinya di antara Kolombia dan Peru menjadikannya lokasi utama perdagangan narkoba. Organisasi pekerja perikanan telah mendokumentasikan peningkatan risiko serangan di laut, yang sering kali berakhir dengan terdampar atau meninggal. Selain itu, IUU dan kejahatan terorganisasi meningkatkan risiko perdagangan manusia dan kerja paksa. Upaya hukum sulit dilakukan karena aturan sistem pengadilan tentang yurisdiksi, kecocokan kasus dan yuridiksi-nya, serta ketakutan akan pembalasan.

Jaminan sosial. Saat sakit atau cedera, pekerja perikanan sering kali tidak dapat mengakses sistem perawatan kesehatan nasional karena keterbatasan logistik. Sistem tersebut, meskipun terjangkau, sering kali dianggap terlalu menyita waktu untuk diikuti. Misalnya, pekerja perikanan melaporkan bahwa iuran harus dibayarkan setiap bulan secara langsung, sering kali di lokasi di luar komunitas mereka. Selain itu, fasilitas yang menerima pertanggungjawaban tersebut jauh dari rumah pekerja perikanan. Mereka membeli asuransi swasta atau tidak memiliki asuransi.

Hak akses. Penangkapan ikan yang berlebihan mengharuskan pekerja perikanan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh ke tengah laut. Undang-Undang Perikanan tahun 2020 menetapkan delapan mil laut pertama dari lepas pantai sebagai Zona Eksklusif Pesisir untuk pekerja perikanan tradisional. Serbuan oleh sektor industri dan kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah mendorong para pemimpin pekerja perikanan untuk mencari perlindungan tambahan. Pada bulan Maret 2023, mantan presiden Lasso mendeklarasikan Zona Eksklusif Pesisir sebagai cagar laut (Ministerio del Ambiente, Agua dan Transición Ecológica 2023). Beberapa pekerja perikanan berharap dana tambahan untuk pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dapat digunakan untuk mengawasi zona tersebut. Yang lain mengkhawatirkan lapisan birokrasi tambahan, membuat hidup lebih sulit bagi pekerja perikanan yang sah dan tidak melakukan apa pun untuk menghalangi pekerja perikanan yang tidak sah. Pekerja perikanan di tingkat lokal telah berhasil memperbaiki hubungan antara mereka dan berbagai layanan, tetapi dialog lebih lanjut diperlukan.

Kebijakan yang tidak konsisten. Para pekerja perikanan di Ekuador merasa frustrasi dengan lembaga-lembaga yang seharusnya mampu mengatur sektor perikanan. Hal ini terutama saat terjadi tumpang tindih kelembagaan antar kementerian, seperti di kawasan konservasi laut. Niat pemerintah untuk memperlakukan perairan pekerja perikanan tradisional sebagai kawasan konservasi laut hanya meningkatkan kecemasan para pekerja perikanan bahwa mereka harus tunduk pada dua rezim yang dikoordinasikan secara terpisah (Subsekretaris Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup). Beberapa pekerja perikanan menunjukkan minat pada system kementerian perikanan yang terpadu, sementara yang lain percaya bahwa dibutuhkan komunikasi yang lebih baik dan penghapusan sekat antar kementerian.

Ketakutan dan intimidasi terhadap serikat pekerja. Mengorganisasikan sektor industri Ekuador sulit dilakukan karena permusuhan negara tersebut terhadap buruh yang terorganisasi sudah berlangsung lama. Meskipun Kementerian Tenaga Kerja memiliki mandat yang jelas untuk memeriksa kondisi ketenagakerjaan di kapal-kapal di pelabuhan, kapasitas mereka lemah dan akses mereka ke pelabuhan terbatas (ILAB 2024). Terdapat hambatan struktural dalam undang-undang tersebut, seperti persyaratan bahwa serikat pekerja harus memiliki setidaknya 30 anggota dan jumlah maksimum pekerja perikanan di kapal industri dibatasi hingga 21 orang. Meskipun beberapa asosiasi pekerja perikanan yang lebih kecil memang ada, seperti *Marineros de Atún*, mereka terhambat oleh sikap anti-serikat pekerja dari para pemberi kerja.

3.5.3 Pengorganisasian pekerja perikanan

Tabel berikut, yang difokuskan pada pengorganisasian pekerja perikanan tradisional di Ekuador, mencakup organisasi pekerja perikanan terbesar serta contoh kelompok kecil yang independen.

Tabel 4. Organisasi Pekerja Perikanan, Ekuador

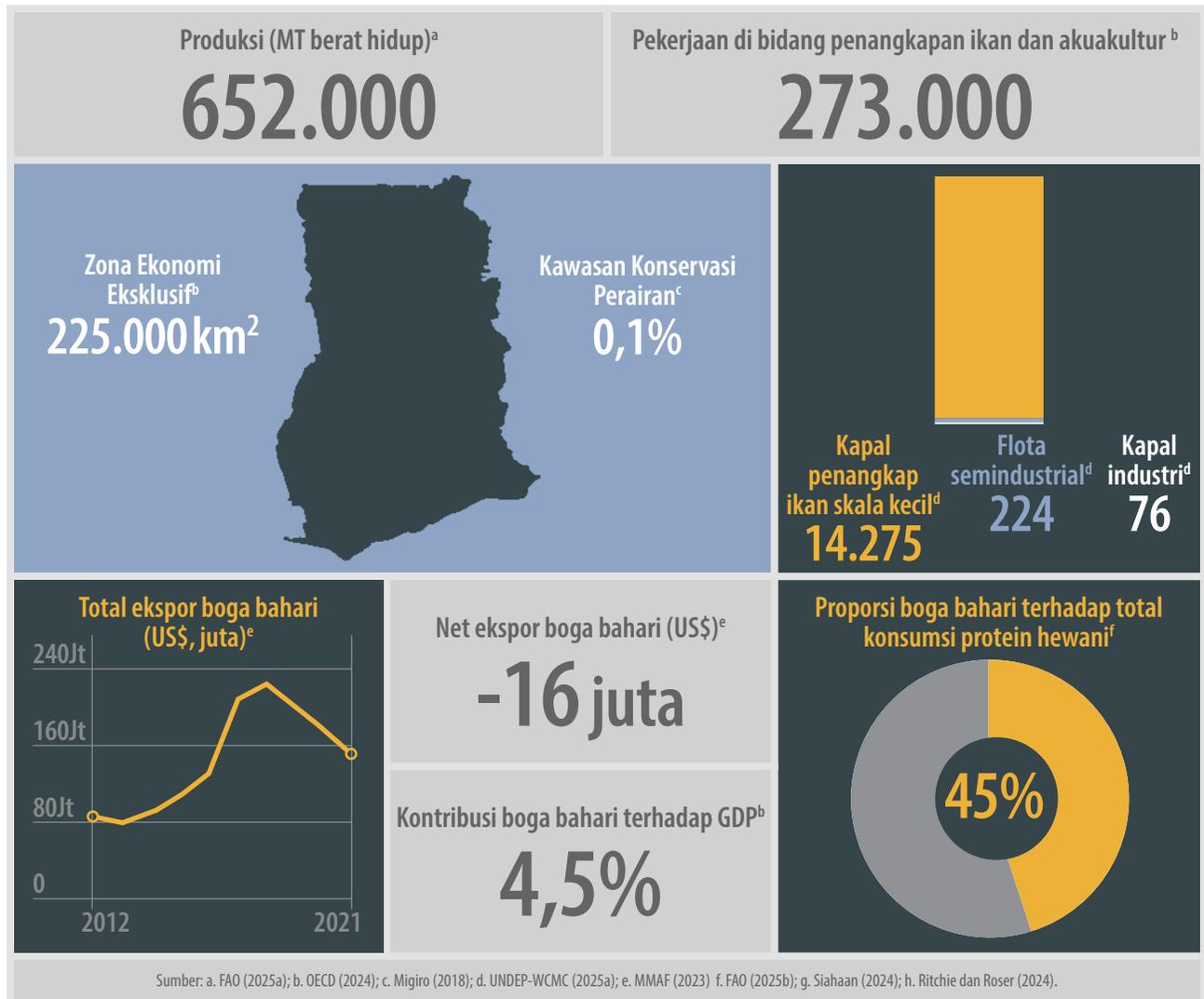
	<i>Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), didirikan tahun 1986</i>	<i>Asociación de Pescadores-Buzo de Salango (ASOSALAN), didirikan pada tahun 2016</i>
Anggota	Mewakili sekitar 48.000 pekerja perikanan tradisional Ekuador	20
Jenis Layanan	Donasi dan perlengkapan untuk pekerja perikanan; pendidikan hak asasi; dokumentasi kasus pelanggaran hak pekerja perikanan; mengoperasikan stasiun bahan bakar eksklusif untuk anggota	Komersialisasi, termasuk nilai tambah; koneksi pasar ke restoran kelas atas
Advokasi	Keamanan fisik, hak ekonomi, hak sosial, pengakuan terhadap isu pekerja perikanan, penegakan hukum pemerintah yang lebih baik	Pengakuan metode penangkapan ikan, normalisasi hubungan dengan taman nasional, penegakan hukum pemerintah yang lebih baik
Negosiasi dan iuran	Koperasi anggota membayar iuran kepada Federasi	Anggota membayar iuran
Kepemimpinan	Gabriela Cruz, Presiden	Ruben Baque, Presiden

3.5.4 Langkah selanjutnya

Peraturan Ekuador, dan khususnya penegakan hukumnya, perlu diperkuat dan diperbarui. Ekuador meratifikasi Konvensi Perburuhan Maritim pada tahun 2024, tetapi pembicaraan seputar ILO C 188 masih baru. Tanggapan yang masih dangkal terhadap tekanan internasional tidak cukup untuk meningkatkan kehidupan pekerja perikanan. Pekerja perikanan menghadapi ketidakamanan fisik, yang hanya akan bertambah buruk karena penangkapan ikan berlebihan yang tidak terkendali mendorong mereka harus berlayar semakin jauh dari pantai. Di sektor industri, tindakan nyata harus diambil terhadap perusahaan, baik asing maupun domestik, yang terlibat dalam penghancuran serikat pekerja dan pelanggaran seperti penolakan tunjangan bagi pekerja yang terluka atau pensiun. Koordinasi kelembagaan yang lebih baik dapat membantu inspeksi meningkatkan efektivitasnya.

Meningkatnya kejahatan terorganisasi dan pemerintahan sayap kanan meredam harapan bahwa otoritas penegak hukum akan diperkuat dengan cara yang menegakkan hukum secara merata dan memungkinkan pekerja perikanan untuk berkembang. Meskipun pekerja perikanan menyatakan frustrasi dengan inisiatif yang berfokus pada lingkungan, mereka terus berpartisipasi. Hal ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan isu pekerja perikanan dengan lebih baik ke dalam diskusi yang berfokus pada lingkungan dan pertimbangan pembuatan kebijakan.

3.6 Ghana



3.6.1 Tinjauan industri

Stok ikan Ghana anjlok selama dua dekade terakhir, turun sekitar 80 persen sejak tahun 1996 (Sarpong 2023). Konsumsi ikan per kapita Ghana merupakan salah satu yang tertinggi di Afrika; ikan menyumbang 41 persen dari protein hewani mereka (Ritchie dan Roser 2024). Ghana merupakan negara pengimpor boga bahari; 46 persen makanan laut yang dikonsumsi diimpor meskipun negara ini mengonsumsi 75–80 persen ikan yang ditangkap secara nasional (Asiedu, Iddrisu, dan Failler 2023). Di seluruh sektor penangkapan, akuakultur, dan pengolahan, sektor ini membuka 720.000 lapangan pekerjaan. Sektor perikanan memiliki akar tradisional yang dalam di negara ini, dengan peran pekerja perikanan dan pedagang ikan (berbagi peran berdasarkan gender) masih sangat relevan dengan operasi sehari-hari sektor ini (EJF 2019; Nunoo dkk. 2015; Osei dkk. 2024). Pentingnya boga bahari bagi pola makan dan budaya Ghana menyebabkan negara tersebut menjadi nett importir boga bahari dan mendorong para pekerja perikanan untuk meningkatkan upaya mereka dalam memenuhi hasrat konsumsi ikan dari warga Ghana.

Ghana memiliki lebih dari 12.000 kapal, melampaui estimasi kapasitas perikanan yang berkelanjutan. Para akademisi mengindikasikan bahwa jumlah yang lebih tepat adalah 9.000–10.000 kano. Pekerja perikanan pemerintah harus memfasilitasi transisi pekerja perikanan keluar dari bidang ini, untuk mengurangi tekanan tersebut, meski

menghadapi rintangan. Armada kapal Ghana mencakup kapal pukat dasar, yang menurut beberapa analis setempat 90 persennya dimiliki oleh perusahaan induk Tiongkok, meskipun secara teknis mereka terdaftar atas nama warga Ghana, karena kapal milik asing tidak diizinkan menangkap ikan di EEZ Ghana. Penyelenggara serikat pekerja yang bekerja di kapal pukat industri Ghana melaporkan kondisi kerja yang buruk dan ketidakadilan di atas kapal-kapal ini, khususnya berkaitan dengan cara kapten dan mandor (biasanya warga Tiongkok) memperlakukan pekerja warga Ghana. Praktik anti-serikat pekerja membatasi manfaat yang dapat diraih dari pengorganisasian. Kapten menolak mempekerjakan pekerja perikanan yang diketahui menjadi anggota serikat pekerja.

3.6.2 Tren dan hambatan kebijakan

Ghana menerima kartu kuning dari Uni Eropa pada tahun 2013, tetapi upayanya untuk mengembangkan rencana aksi untuk memerangi IUU menyebabkan kartu peringatan tersebut dicabut pada tahun 2015. UE kembali memberikan kartu kepada Ghana pada tahun 2021 setelah menemukan kurangnya penegakan hukum anti-IUU; kartu ini masih bertahan pada tahun 2024 (European Commission 2021). Kebijakan utama Ghana untuk mengatasi kelebihan kapasitas adalah moratorium lisensi penangkapan ikan baru dan musim tertutup (meskipun Presiden Mahama, yang terpilih pada bulan Desember 2024, mengumumkan pengecualian bagi pekerja perikanan tradisional). Di sektor industri, standar seperti mengubah jenis jaring yang diizinkan tidak banyak berpengaruh pada penangkapan ikan yang berlebihan. ILO dapat menjadi perantara perjanjian antara pengusaha di sektor industri dan perwakilan pekerja melalui Lab Akselerator 8.7 mereka, yang membantu mengamankan dukungan dari semua sektor dan ratifikasi Ghana terhadap C 188.

Tangkapan sampingan yang ilegal. Dalam satu dekade terakhir, telah terlihat berbagai upaya baru untuk memerangi bentuk transshipment yang disebut *saiko*. Praktik ini melibatkan kapal pukat yang menjual tangkapan sampingan (ikan kecil yang ditujukan untuk pekerja perikanan kano) kepada pemilik kano, yang kemudian menjualnya di pasar lokal. Larangan *saiko* mungkin telah menghentikan pemilik kano untuk mendapatkan ikan ini, tetapi pada akhirnya kapal pukat membuang ikan kecil tersebut, sehingga kondisi menjadi lebih buruk bagi pekerja perikanan tradisional. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemerintah juga menerapkan kebijakan mengatur dan membatasi penangkapan ikan di sektor tangkapan tradisional.

Partisipasi dan perencanaan transisi yang berkeadilan. Pekerja perikanan memahami perlunya mengatasi berkurangnya stok ikan, tetapi mereka mempersoalkan pendekatan konvensional dan top-down terhadap regulasi di sektor tersebut. Pertama, pekerja perikanan merasa tersisih dari wacana diskusi. Kebijakan Pengelolaan Bersama, yang melibatkan organisasi pekerja perikanan dalam percakapan tentang sektor tersebut, baru mulai diterapkan pada tahun 2023, tetapi kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih ketat telah diberlakukan sebelum itu. Kedua, bantuan yang diberikan kepada pekerja perikanan dan pengolah ikan yang terkena dampak negatif dari kebijakan ini sangat sedikit. Misalnya, pekerja perikanan diberi satu



Penangkapan ikan tradisional di Ghana.

Kredit: Environmental Justice Foundation

karung beras dan sedikit minyak, yang menurut mereka tidak cukup untuk bertahan hidup selama dua bulan saat musim menangkap ikan di tutup. Para pendukung reformasi lingkungan menyoroti Program Mata Pencaharian Alternatif dari *United States Agency for International Development* (USAID) sebagai cara untuk mengurangi dampak sosial negatif dari pembatasan tersebut. Namun, program tersebut menargetkan kaum muda, dan tidak banyak membantu pekerja perikanan lama yang tersisih. Kurangnya bantuan telah melemahkan organisasi pekerja perikanan, mendorong penolakan dan ketidakpatuhan.

Informalitas dan perubahan tradisi. Akar tradisi dari sektor tradisional menghadapi tantangan di era modern. Misalnya, tradisi adanya pria yang memimpin sebagai Kepala Nelayan serta adanya perempuan yang memimpin sebagai Ratu di lapak pemasaran tangkapan ikan, meskipun secara tradisional cukup kuat, menjadi terpolitisasi, yang mengganggu kemampuan mereka untuk melakukan perubahan (Apetorgbor 2018). Politisasi ini mungkin juga memengaruhi tata kelola subsidi bahan bakar. Perubahan-perubahan ini, bersama dengan ketidaksepakatan tentang strategi, telah memecah belah sektor tradisional. Beberapa orang mencatat bahwa kurangnya formalitas di sektor tradisional, yang berarti pekerja perikanan membayar sedikit pajak, menghasilkan lebih sedikit perhatian dari pemerintah. Organisasi seperti GNCFC mempromosikan upaya untuk memformalkan sektor tersebut, mendaftarkan pemilik kano dan karyawan mereka. Meskipun formalisasi mungkin disertai dengan pajak, para pemimpin mereka percaya hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk didengar oleh pemerintah.

Mengubah kontrak sosial lampau yang tradisional. Pengaturan penangkapan ikan di sektor tradisional dibangun atas dasar kepercayaan, bukan kontrak, dan ini dapat membuat perubahan menjadi sulit. Pengolah ikan (perempuan) akan membiayai pekerja perikanan (laki-laki) untuk melaut dengan janji hasil tangkapan mereka. Namun, dalam konteks pasokan rendah, pekerja perikanan akan menggunakan praktik penangkapan ikan yang merusak seperti bahan kimia atau dinamit, atau mungkin hanya menjual hasil tangkapan mereka di pantai atau daratan lainnya dengan harga yang lebih tinggi, dan memberi tahu pemodal mereka bahwa mereka tidak menangkap apa pun. Bank pembangunan dan beberapa LSM telah berupaya mengorganisasi pengolah ikan untuk meningkatkan kesehatan keuangan mereka. Mengajarkan cara mengenali ikan yang ditangkap dengan bahan kimia atau dinamit membantu perempuan membawa produk yang lebih baik dan lebih sehat ke pasar. Namun, tidak jelas apakah perempuan akan mendapat manfaat dan keuntungan lebih, sementara jelas bahwa perempuan berisiko merusak hubungan kerja dengan para pekerja perikanan, jika mereka menolak ikan para pekerja perikanan terlalu sering.

Isu kepemilikan. Masalah utama adalah kepemilikan asing atas banyak kapal pukat di Ghana. Selain praktik ini ilegal menurut Undang-Undang Perikanan, keberadaan semacam “mitra gelap” menciptakan masalah akuntabilitas yang signifikan di sektor ini. Misalnya, the *Alliance 8.7 Accelerator Lab* mempertemukan para pelaku dari pemerintah, pekerja, dan sektor bisnis untuk bernegosiasi demi kondisi yang lebih baik. Namun, karena sifatnya “mitra gelap” tidak dilibatkan dalam perundingan.

Kurangnya kontrol lokal. Kapten kapal biasanya adalah orang asing yang dipekerjakan oleh dan bertanggung jawab kepada investor, sehingga mustahil bagi warga negara Ghana yang menjadi awak kapal pukat untuk naik pangkat. Celah hukum yang menjadi dasar praktik ini sering kali dapat membuat pemilik perusahaan perikanan terjerat utang, yang mengakibatkan sebagian besar keuntungan jatuh ke tangan investor dan memastikan kendali berada di tangan pemilik asing.

3.6.3 Pengorganisasian pekerja perikanan

Tabel di bawah ini menyoroti gabungan asosiasi dan serikat pekerja di sektor ini. Ini termasuk asosiasi pemilik kano, serikat pemilik kano, awak kapal, dan pengolah, dan satu serikat yang mengorganisir awak kapal penangkap ikan di armada industri. Sebagian besar pengolahan ikan dikelola oleh organisasi yang dipimpin oleh perempuan, namun belum tercantum di sini.

Tabel 5. Organisasi Pekerja Perikanan, Ghana

	Ghana National Canoe Fishermen Council (GNCFC), didirikan tahun 1993	Canoe and Fishing Gear Owners Association of Ghana (CaFGOAG), didirikan tahun 2021	National Union of Teamsters and General Workers (NUTGW), didirikan tahun 2007	National Union of Seafarers, Ports, and Allied Workers (NUSPAW), didirikan pada tahun 2017	General Agricultural Workers Union (GAWU), didirikan tahun 1959
Anggota	120.000	2.200	2.321 orang	1.532 orang	23.000 (di berbagai sektor)
Jenis Layanan	Pendidikan, peningkatan kapasitas bagi kepala nelayan/pekerja perikanan	Pendidikan anggota; negosiasi perbaikan struktur gaji	Pendidikan Anggota	Negosiasi tripartit untuk upah yang lebih baik	Program pemantauan masyarakat, pendidikan, advokasi
Advokasi	C 188, penegakan manajemen perikanan, peningkatan pasokan bahan bakar	C 188	C 188, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan	C 188, pekerjaan layak di bidang perikanan, praktik perekrutan yang lebih baik, pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik dan lebih banyak	C 188, zona bebas pekerja anak di wilayah Danau Volta
Negosiasi dan iuran	Mulai mengumpulkan iuran ~US\$12 per tahun per anggota, ~US\$8 pendaftaran per kano	US\$7,50–US\$22,50 per tahun (tergantung posisi dalam organisasi)	Beberapa anggota membayar iuran.	Tidak melakukan pengumpulan dana karena menghancurkan serikat pekerja	Iuran yang terkumpul
Kepemimpinan	Nana Jojo Solomon, Presiden	Nana Kweigyah, Presiden	Desmond Sackey, Sekretaris Jenderal	Michael Angmor, Sekretaris Jenderal	Andy Tagoe, Sekretaris Jenderal

3.6.4 Langkah berikutnya

Ghana mengambil langkah-langkah yang menjanjikan untuk mata pencaharian pekerja perikanan dan melindungi lingkungan. Kebijakan Pengelolaan Bersama (*Co-Management Policy*), meskipun masih dalam tahap awal, menunjukkan kesediaan pemerintah untuk melibatkan pekerja perikanan dalam pengambilan keputusan. Lab Akselerator ILO 8.7 telah memfasilitasi dialog sosial yang meningkatkan upah bagi pekerja perikanan di armada kapal industri Ghana.

Tantangan utama untuk melanjutkan pekerjaan ini adalah kapasitas. Ghana saat ini bergantung pada pendanaan luar negeri dari AS, EJK, atau ILO untuk sumber daya guna mendanai Kebijakan Pengelolaan Bersama, pengembangan kapasitas untuk pengorganisasian, serta bantuan sosial dan transisi. Jika pendanaan tersebut habis, para pekerja perikanan khawatir bahwa regulator akan kembali menjalankan sistem kembali seperti dahulu. Selain itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sektor industri untuk melibatkan organisasi pekerja dengan lebih baik dan membasmi praktik ilegal pada isu kepemilikan.

3.7 Meksiko



3.7.1 Tinjauan industri

Meksiko memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ketiga belas di dunia, tetapi baru pada tahun 1980-an Meksiko berupaya melindunginya sebagai wilayahnya sendiri. Pertikaian yang terjadi kemudian dikombinasikan dengan reformasi neoliberal pada tahun 1990-an yang menarik dukungan bagi organisasi pekerja perikanan tradisional dan memicu eksploitasi berlebihan terhadap perikanan Meksiko (Bennett 2017). Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Perikanan AS tahun 1976 memberlakukan kedaulatan EEZ AS, dengan pengecualian untuk tuna yang bermigrasi jarak jauh, yang memungkinkan kapal-kapal AS untuk terus menangkap ikan tuna di perairan Meksiko.⁴ Pada tahun 1980-an, Meksiko membalas dengan mengirim kapal udang ke perairan AS. Pembalasan AS atas hal itu hampir menutup operasi penangkapan ikan tuna Meksiko, dan embargo AS selama puluhan tahun yang menuduh pekerja perikanan tuna Meksiko tidak mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi lumba-lumba pun terjadi (Rosendahl 1984). Saat ini, Meksiko adalah produsen tuna kalengan terbesar kelima di dunia, tetapi tidak ada satu pun yang diekspor (FAO 2024).

Meksiko telah menerima perhatian signifikan dari inisiatif konservasi laut AS. Negara ini sekarang memiliki jumlah *Fishery Improvement Projects* (FIP) terbesar, menurut *International Sustainable Seafood Foundation* (ISSF). Sejak tahun 1990-an, puluhan proyek telah berupaya meningkatkan praktik pengelolaan perikanan Meksiko, tetapi baru-baru ini inisiatif tersebut mulai berinvestasi dalam penguatan organisasi pekerja perikanan (Basurto et al. 2020). Sekarang ada beberapa inisiatif yang dirancang untuk mendukung komunitas pekerja perikanan dan memperkuat organisasi pekerja perikanan.

3.7.2 Tren dan hambatan kebijakan

Kebijakan perikanan Meksiko telah melalui beberapa fase, dari intervensi negara untuk mendukung pekerja perikanan hingga strategi pasar bebas yang menarik dukungan dan membuka sektor tersebut untuk persaingan baru. Koperasi telah memainkan peran penting dalam mengorganisasi dan menghubungkan komunitas pekerja perikanan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan mengamankan manfaat anggota seperti izin penangkapan ikan dan subsidi peralatan, tetapi itu berubah pada tahun 1980-an. Embargo perdagangan mengharuskan pekerja perikanan untuk berinvestasi pada peralatan baru sementara dukungan negara menyusut. Undang-Undang Perikanan Federal tahun 1994 semakin melemahkan koperasi dengan menghilangkan akses eksklusif mereka ke spesies yang berharga (Bennett 2017). Undang-Undang baru tentang Koperasi juga dikeluarkan pada tahun 1994, yang memungkinkan koperasi terbentuk hanya dengan lima anggota, yang semakin memecah kohesi sosial di sektor tersebut.

Ketika NAFTA mulai berlaku pada akhir tahun 1994, tekanan meningkat bagi Meksiko untuk menarik intervensi negara dalam perekonomian dan meningkatkan peluang bagi investasi sektor swasta. Hasilnya adalah sektor ini mengalami finansialisasi berlebihan dan menipisnya stok ikan (Bennett 2017). Ketika organisasi lingkungan internasional dan nasional berupaya memajukan pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan, mereka semakin menemukan aliansi di antara koperasi, yang dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan praktik penangkapan ikan yang lebih baik dan mengelola sumber daya bersama (Basurto et al. 2020).

Selama pemerintahan Presiden Lopez Obrador, para pekerja perikanan yang mencari dukungan strategis mendapati prioritas mereka justru terabaikan karena inisiatif dukungan utama program *Bienpesca*, yang memberikan semua pekerja perikanan yang terdaftar senilai 7.200 peso per tahun.⁵ Para pekerja perikanan yang diwawancarai melihat hal ini sebagai penggantian yang buruk dan bukanlah Langkah strategis yang diperlukan oleh industri ini. Presiden Claudia Sheinbaum telah berjanji untuk meningkatkan subsidi *Bienpesca*. Dengan perubahan pemerintahan tersebut, para pekerja perikanan menceritakan bahwa mereka melihat peluang untuk berdialog. Untuk tujuan tersebut, koperasi pekerja perikanan telah mengidentifikasi beberapa area untuk reformasi:

Transparansi dan dialog sosial. Undang-undang Meksiko membentuk *Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca* (CONAPESCA) dan lembaga terkait di tingkat negara bagian, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja perikanan didengar dan kekhawatiran mereka ditangani melalui proses dialog sosial yang berkelanjutan. Proses ini telah diabaikan selama enam tahun terakhir.

Inspeksi dan pemantauan. Para pekerja perikanan memperkirakan hingga 40 persen penangkapan ikan dilakukan secara gelap, melanggar izin penangkapan ikan dan berbagai upaya yang sering dilakukan oleh koperasi untuk menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab. Hasilnya adalah para pekerja perikanan membiayai dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan di wilayah penangkapan ikan mereka, sehingga jika diperlukan penangkapan, mereka harus membayar bensin dan menyediakan perahu untuk membawa perwakilan dari CONAPESCA dan Angkatan Laut ke lokasi terjadinya pelanggaran.

Kekerasan yang terjadi di laut. Di Laut Karibia, Pasifik, dan Teluk Meksiko, para pekerja perikanan dan komunitas mereka terdampak oleh operasi perdagangan narkoba dan manusia. Fakta bahwa mereka tidak dilindungi oleh otoritas pemerintah, dan harus membayar sendiri operasi pemantauan mereka, membuat para pekerja perikanan rentan terhadap pemerasan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Kebijakan yang tidak konsisten. Pengelolaan perikanan sebagian besar dilakukan melalui sistem perizinan bagi pekerja perikanan. Reformasi Undang-Undang Koperasi pada tahun 1980-an telah membuat proses ini kurang sistematis dan lebih mudah disalahgunakan, sehingga melemahkan peran koperasi dalam mendistribusikan izin. Pekerja perikanan mengupayakan peninjauan ulang yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap sistem perizinan yang lebih erat kaitannya dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Kurangnya penelitian. Karena sistem perizinan tidak dikelola dengan baik dan pengawasan pemerintah lemah, terdapat kekurangan data sistematis tentang keadaan perikanan Meksiko serta jumlah dan ukuran kapal yang aktif di perairan dan jenis peralatan yang mereka gunakan.

Pembiayaan. Pekerja perikanan berjuang untuk bersaing secara internasional, mengingat kurangnya dukungan infrastruktur pemerintah dan fakta bahwa negara lain mensubsidi bahan bakar dan perlengkapan pekerja perikanan.



Para pemimpin dari 41 federasi koperasi yang tergabung dalam CONMECOOP berkumpul untuk foto bersama di pelabuhan La Paz, Meksiko, Mei 2024.

Kredit: Judy Gearhart

3.7.3 Pengorganisasian pekerja perikanan

Koperasi memiliki sejarah yang panjang di Meksiko sejak revolusi. Koperasi perikanan telah memainkan peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan hak guna. Peran tersebut telah dirusak oleh reformasi kebijakan berikutnya. Pekerja perikanan Meksiko diorganisasikan ke dalam 300 koperasi yang mewakili sekitar 30.000 pekerja perikanan, mulai dari koperasi penyelam skuba tradisional hingga koperasi pekerja perikanan semi-industri yang lebih besar (Garcia Lozano et al. 2023). Khususnya, koperasi bervariasi dalam ukuran dan bentuk. Beberapa hanya memiliki lima anggota yang semuanya masih dari keluarga besar yang sama, hingga yang lebih berbasis masyarakat (Frawley, Finkbeiner, dan Crowder 2019).

Para pemimpin koperasi yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sering kali kesulitan untuk membuat pekerja perikanan menjual hasil tangkapan mereka melalui koperasi. Padahal koperasi hanya mengenakan sedikit biaya untuk membantu membiayai struktur administratifnya. Koperasi kehilangan pijakan dalam memajukan kebijakan yang berpihak pada pekerja perikanan, sehingga menjadi lebih sulit untuk mempertahankan kekuatan mereka. Banyak koperasi telah mencari dukungan dari kelompok lingkungan untuk memajukan program yang dapat meningkatkan ketersediaan ikan dan membantu menyatukan anggota untuk tujuan bersama.

Koperasi-koperasi tersebut bersatu dalam federasi regional dan konfederasi nasional, yang bertanggung jawab untuk mendukung dan mengadvokasi kebijakan pemerintah yang lebih melayani anggota mereka. Dua konfederasi koperasi nasional memberikan gambaran umum tentang upaya-upaya untuk memajukan perlindungan ekonomi dan sosial yang lebih kuat bagi para pekerja perikanan. CONACOOOP, atau Konfederasi Nasional Koperasi Perikanan, didirikan pada tahun 1994 dan saat ini mewakili 638 koperasi dengan hampir 33.000 anggota di 14 negara bagian Meksiko. CONMECOOP didirikan pada tahun 2014 dengan anggota di 11 negara bagian; mereka sekarang memiliki 41 federasi anggota di 15 dari 17 negara bagian pesisir Meksiko, yang mencakup 550 koperasi dan 35.000 anggotanya. Tabel 6 memberikan gambaran singkat tentang dua konfederasi dan jumlah federasi koperasi yang berafiliasi.

Tabel 6. Organisasi Pekerja Perikanan, Meksiko

	<i>Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONMECOOP), didirikan pada tahun 2014</i>	<i>Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOOP), didirikan tahun 1994</i>
Anggota	41 federasi di 15 negara bagian, 35.000 anggota	42 federasi di 11 negara bagian, 33.000 anggota
Jenis Layanan	Mendukung koperasi dalam mengamankan dan mengelola izin atau konsesi perikanan; pertukaran strategi (misalnya pemantauan perikanan); menghubungkan koperasi dengan program dukungan teknis	Mendukung koperasi dalam mengamankan dan mengelola izin atau konsesi perikanan; pertukaran strategi (misalnya pemantauan perikanan)
Advokasi	Advokasi dukungan untuk industri perikanan dalam produksi dan komersialisasi	
Negosiasi dan iuran	Pekerja perikanan menjual hasil tangkapannya melalui koperasi, yang menghasilkan biaya; koperasi membayar iuran kepada konfederasi	
Kepemimpinan	Jose Luis Carillo Gallaz, Presiden	Aureliamo Aldama Rivera, Presiden

3.7.4 Langkah selanjutnya

Pekerja perikanan tradisional Meksiko telah lama memperjuangkan inisiatif lingkungan, khususnya yang mengamankan peraturan federal untuk menetapkan musim tanpa penangkapan ikan. Namun, upaya pengelolaan perikanan ini masih bersifat top-down dan kaku, khususnya ketika diperintahkan oleh pemerintah federal dan bukan oleh pemerintah negara bagian. Sering kali dilaksanakan hanya dengan sedikit input pendapat dari pekerja perikanan, Langkah-langkah ini menciptakan permusuhan antara beberapa pekerja perikanan dan organisasi lingkungan. CONMECOOP telah berupaya untuk merangkul dan memanfaatkan beberapa inisiatif lingkungan yang lebih adaptif, dengan melihat pengembangan kawasan lindung laut, zona larangan tangkap, dan musim tanpa penangkapan ikan sebagai titik koordinasi. Program yang lebih banyak berinvestasi dalam kepemimpinan pekerja perikanan dan menggabungkan konservasi laut dengan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja perikanan akan sangat membantu dalam meningkatkan hubungan dan membangun program yang lebih efektif.

4. Apa yang menjadi Pendorong dan Penghambat dalam Pengorganisasian Pekerja Perikanan?

Laporan ini berupaya mengidentifikasi bagaimana organisasi pekerja perikanan membangun kekuatan dan memengaruhi kebijakan pemerintah dan perusahaan. Hal tersebut dimulai dengan asumsi bahwa hal ini memerlukan peningkatan arus informasi pemerintah dan jalur yang lebih efektif untuk memperbaiki keadaan yang memungkinkan pekerja perikanan bernegosiasi dengan pengusaha dan pelaku perusahaan lainnya. Namun, di keenam negara tersebut, pekerja perikanan menghadapi tantangan berupa kurangnya arus informasi, perlunya inisiatif keterlibatan pemerintah yang lebih besar, dan kurangnya koneksi TNC secara keseluruhan dengan organisasi hak-hak pekerja perikanan. Meskipun tantangan dan faktor yang memotivasi pengorganisasian pekerja perikanan berbeda-beda di setiap negara, ada beberapa tema umum yang harus dipertimbangkan dalam upaya untuk memperkuat partisipasi pekerja perikanan dalam pembuatan kebijakan dan implementasi program.

4.1 Tantangan dalam pengorganisasian

Meskipun skalanya berbeda, ada kesamaan dalam jenis tantangan yang dihadapi oleh para pengorganisir pekerja perikanan; tiga dari empat tantangan yang didiskusikan, memiliki pengaruh pada penangkapan ikan dengan kapal tradisional maupun industri. Tantangan tersebut meliputi kebijakan yang tidak koheren dan kurangnya perlindungan pekerja perikanan; isolasi dan ketidakmampuan mencari bantuan saat di laut; kurangnya akses ke layanan saat di pelabuhan; dan terkait AKP migran, kurangnya transparansi kepemilikan kapal, serta kurangnya tanggung jawab agen perekrut.

Penindasan hak berorganisasi dan inkonsistensi kebijakan. Di setiap negara dalam studi ini, pekerja perikanan menghadapi berbagai pembatasan hukum atas hak mereka untuk berorganisasi. Lebih lanjut, terdapat berbagai kontradiksi kebijakan yang melemahkan perlindungan atas hak dan kesejahteraan mereka. Para pekerja migran Indonesia, yang merupakan sebagian besar AKP migran di Perikanan Laut Lepas, sering kali luput dari perlindungan pemerintah, seperti yang digambarkan oleh sengketa yurisdiksi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi. Negara ini juga dapat memiliki undang-undang yang saling bertentangan. Peraturan yang mengatur upah dan waktu istirahat bagi para pekerja perikanan di armada domestik (Mochtar dkk. 2023). Di Taiwan, aturan visa yang ketat telah mengikat para pekerja migran dengan pemberi kerja, sesuai penugasan

dari agen perekrut. Selain itu, para pekerja perikanan di DWF diklasifikasikan sebagai 'bekerja di luar negeri' dan dilindungi oleh Badan Perikanan di bawah Kementerian Pertanian. Namun, Kementerian Tenaga Kerja, yang justru membatasi perlindungan dalam berorganisasi. Thailand telah berupaya menciptakan koherensi antar kementerian dengan melakukan inspeksi bersama di pelabuhan dan di perairan, tetapi inspeksi ini tidak efektif, dan pemerintah menolak tawaran dukungan teknis dari serikat pekerja. Kurangnya penuntutan dipadukan dengan undang-undang yang melarang AKP migran membentuk serikat pekerja mereka sendiri, mengindikasikan penolakan dan resistensi yang lebih dalam terhadap hak pengorganisasian pekerja perikanan.

Banyak pekerja perikanan tradisional mengungkapkan rasa frustrasi karena pemerintah mereka tidak memprioritaskan masalah mereka. Di Ghana, larangan *saiko*, atau pemindahan tangkapan (transshipment) sampingan kapal pukat industri, telah menyebabkan kapal pukat mendapatkan lalu terkadang membuang ikan kecil yang seharusnya menjadi ranah pekerja perikanan kano dan tidak menghadapi akibat apa pun karena pelanggaran tersebut. Di Meksiko dan Ekuador, terdapat kebijakan yang mengatur penangkapan ikan tradisional, tetapi pekerja perikanan yang telah terorganisir, sering kali harus mengawasi daerah penangkapan ikan mereka sendiri. Pekerja perikanan tradisional Meksiko melaporkan harus membayar bensin dan dan suplai lainnya, agar agen pemerintah dapat menahan pelanggar. Tantangan ini sering kali diperburuk oleh nuansa permusuhan terhadap serikat pekerja atau tekanan dengan tujuan membatasi, ketimbang melindungi pekerja perikanan tradisional.

Isolasi dan ketidakmampuan mengirim sinyal untuk meminta bantuan. Baik pekerja perikanan pesisir maupun mereka yang berada di DWF mengalami isolasi dan bahaya yang mengancam jiwa di laut. Di lain pihak, sering kali mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengirim isyarat untuk meminta bantuan. Bagi pekerja perikanan pesisir, terdampar di laut dapat mengakibatkan dehidrasi, sengatan panas, atau kapal terbalik karena badai. Pasokan makanan dan air yang buruk selama di laut untuk waktu yang panjang dapat mengakibatkan kekurangan gizi yang juga mematikan. Risiko ini dapat dikurangi secara signifikan jika pekerja perikanan dapat berkomunikasi saat berada di laut, atau penjaga pantai nasional dapat berperan lebih dalam mengawasi perairan.



Kedatangan nelayan, Puerto Lopez, Ekuador.

Kredit: Chris Feser (CC BY 2.0)

Pekerja perikanan di DWF secara rutin tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga atau serikat mereka saat berada di laut selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sehingga mereka tidak dapat mencari bantuan jika mereka sakit, kekurangan gizi, atau mengalami kekerasan fisik. Mengingat bahwa pekerja perikanan di DWF mengambil risiko besar untuk menghidupi keluarga mereka, maka terputusnya komunikasi merupakan kesulitan yang signifikan. Meskipun ada dukungan luas untuk kampanye *Wi-Fi Now for Fishers' Rights at Sea* dan analisis kelayakan tentang bagaimana konektivitas dapat diwujudkan (J. Lee dan Gill 2023), namun penerimaan masih terjadi lambat. Komunikasi di laut juga menjadi tantangan bagi pekerja perikanan pesisir, yang mengharuskan organisasi mereka berbagi sedikit sumber daya untuk mengatur operasi pencarian dan penyelamatan saat motor pekerja perikanan dicuri, atau keluarga melaporkan pekerja perikanan hilang.

Kurangnya akses ke layanan di pelabuhan. Ketika pekerja perikanan perikanan laut lepas (DWF) tiba di pelabuhan, mereka sering kali terbatas dalam kemampuan untuk berhubungan dengan serikat pekerja atau organisasi pendukung lainnya. Banyak AKP migran tidak memiliki surat-surat kerja yang tepat untuk pergi ke luar wilayah sekitar kapal mereka (Hiburong dan Gearhart 2024). Lebih lanjut, para migran yang sudah memiliki dokumen yang benar untuk pergi ke luar pelabuhan pun mengalami kesulitan. Misalnya, pekerja perikanan yang diorganisir oleh FRN di Thailand mungkin dipaksa oleh kapten mereka untuk menyerahkan kembali dokumen identitas mereka setelah pemeriksaan pelabuhan selesai, terutama jika kapten mencurigai mereka tengah mengorganisir sesuatu (FRN dan Gearhart 2024). Bagi organisasi pekerja perikanan tradisional, masalah layanan pelabuhan juga menjadi tantangan. Di Meksiko, misalnya, pemerintah federal sebelumnya berinvestasi dalam infrastruktur perikanan untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemrosesan, tetapi program tersebut tidak selalu dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut dukungan untuk fasilitas ini telah ditarik atau dibatalkan.⁶ Saat ini, koperasi pekerja perikanan Meksiko bersaing dengan perusahaan yang lebih besar yang ingin membeli hasil tangkapan anggotanya. Praktik ini menyulitkan koperasi untuk membantu mengelola perikanan secara berkelanjutan dan memantau aktivitas ilegal.

Kurangnya transparansi seputar kepemilikan kapal dan agen perekrutan. Ini adalah masalah yang khusus dialami oleh AKP migran di armada kapal industri, khususnya DWF. Kurangnya transparansi seputar kepemilikan kapal dan agen perekrutan yang bertanggung jawab atas kontrak pekerja perikanan membuat serikat pekerja sulit mendapatkan ganti rugi bagi anggotanya dan bahkan menegosiasikan CBA. Banyak pemilik kapal yang dapat memisahkan identitas dirinya dari identitas kapal, melalui struktur kepemilikan tertentu yang menguntungkan bagi mereka (Brush dan Utermohlen 2022). Sehingga, kapal dapat dinyatakan bangkrut, ketika penyelesaian sengketa dengan pekerja dianggap mahal. Banyak pekerja perikanan di perikanan laut lepas (DWF) dikontrak dan dibayar langsung oleh agen perekrutan di negara asal mereka (Liu et al. 2024), yang dapat menambah tantangan yurisdiksi ketika agen perekrutan diatur oleh satu negara dan kapal oleh negara lain. Selain itu, agen perekrutan diketahui menolak komitmen, dan beberapa bahkan telah menutup atau memindahkan kantor mereka, sehingga menyulitkan pekerja perikanan yang kembali untuk mengajukan pembayaran kembali. Meskipun memperjuangkan penyelesaian hanya sebagian kecil dari peran utama serikat pekerja, semua serikat pekerja yang diwawancarai menekankan pekerjaan mereka dalam mendukung keluhan pekerja perikanan. Mungkin sangat sulit untuk membangun gerakan dan strategi jangka panjang ketika mencapai penyelesaian sangat memakan waktu.

Tantangan-tantangan ini membuat pekerjaan organisasi pekerja perikanan menjadi lebih sulit dan mengalihkan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk bernegosiasi dengan pengusaha, mengadvokasi upah dan kondisi kerja yang lebih baik, serta mendidik anggotanya tentang cara-cara untuk mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

4.2 Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengorganisasian pekerja perikanan

Ada beberapa faktor yang membantu memotivasi pengorganisasian pekerja perikanan, yang berperan dalam bentuk pengaruh internasional dan nasional. Sebagian besar organisasi pekerja perikanan berfokus pada kebijakan nasional, provinsi, atau kota, karena itulah yang menarik bagi anggotanya. Kampanye internasional dapat menarik perhatian pada suatu isu atau meningkatkan tekanan pada pemerintah atau pengusaha untuk melakukan reformasi, tetapi ini biasanya hanya berlaku jika aktor internasional terlibat. Ketika ditanya tentang strategi organisasi mereka, pengorganisasian pekerja perikanan sebagian besar berbicara tentang meminta lembaga pemerintah nasional dan lokal untuk menegakkan hukum. Pada tingkat yang lebih rendah, mereka berbicara tentang bagaimana mereka melibatkan pengusaha dan pembeli. Hanya SBMI di Indonesia, yang bekerja sama erat dengan *Greenpeace*, dan serikat pekerja di Taiwan yang bekerja pada kampanye yang menargetkan perusahaan transnasional (TNC).

4.2.1 Faktor-faktor nasional dan lokal yang membantu memperkuat pengorganisasian pekerja perikanan

Terdapat tiga faktor yang menonjol dalam cara para pengorganisir pekerja perikanan, ketika kita berbicara tentang motivasi untuk membangun Gerakan kolektif yang lebih kuat. Faktor-faktor ini terkait dengan kebutuhan akan keamanan fisik dan finansial, cara mereka dan orang lain mengidentifikasi diri sebagai pekerja perikanan dan menghargai rasa memiliki yang diciptakan oleh organisasi mereka, serta sumber daya yang tersedia untuk membiayai kegiatan organisasi.

Meningkatnya kesadaran akan ketidakamanan manusia. Pekerja perikanan telah lama mengetahui bahaya yang mereka hadapi di perairan, tetapi kini tersedia lebih banyak informasi tentang kecelakaan dan kematian di laut. Seiring dengan meningkatnya komunikasi, jumlah organisasi yang memperhatikan hak-hak pekerja perikanan pun meningkat, begitu pula keinginan pekerja perikanan untuk mencari organisasi pendukung. Mengingat kurangnya informasi sebelum sepuluh tahun lalu, tidak jelas apakah ada peningkatan dalam insiden kematian dan cedera di kalangan pekerja perikanan seperti halnya peningkatan dokumentasi dan kesadaran tentang insiden ini.

Dalam perikanan industri, media mengekspos kasus kerja paksa dan pembunuhan di laut menggemparkan dunia dan mendorong berkembangnya LSM antiperdagangan manusia yang bekerja di sektor tersebut. Meskipun banyak isu telah dilaporkan sebelumnya oleh ILO dan LSM, media menarik koneksi baru ke Perusahaan transnasional dan jaringan distribusi di belahan bumi utara, serta meningkatkan perhatian dan pendanaan internasional (Gearhart 2023). Hal ini juga membawa lonjakan aktivitas pengorganisasian serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja migran yang didirikan pada tahun 2003, SBMI, mulai membangun upaya pengorganisasian pekerja perikanan pada tahun 2014, setelah mereka mulai mengadvokasi 74 AKP migran yang terdampar di Afrika Selatan. Banyak dari 74 AKP migran tersebut masih aktif dalam jaringan SBMI (Suwarno, Fritzner, dan Gearhart 2024). Di Thailand, ITF mulai mengorganisasikan diri di sektor makanan laut, dan pengorganisasian MWRN semakin menonjol setelah beberapa skandal yang melibatkan armada Thailand terungkap antara tahun 2013 dan 2015. Pembeli makanan laut seperti CP Foods dan Thai Union melibatkan MWRN dan berbicara di depan umum tentang perjanjian tempat kerja yang ditandatangani oleh fasilitas pemrosesan dalam rantai pasokan mereka. Meskipun perjanjian tersebut terutama mencakup pekerja dalam pemrosesan boga Bahari, pendekatan MWRN untuk mengatasi batasan hukum terhadap kemampuan pekerja migran untuk berorganisasi telah menjadi preseden penting. Beberapa kasus kerja paksa telah “mengganggu” armada kapal Taiwan, termasuk WRO terhadap kapal-kapal Taiwan (CBP 2024), membantu meningkatkan jumlah pihak di Taiwan yang mengadvokasi dan mendukung AKP migran yang sedang dalam kesulitan.

Di sektor tradisional, pengorganisasian pekerja perikanan telah meningkat sejak FAO menerbitkan Pedoman Perikanan Skala Kecil, yang menekankan pentingnya mengikutsertakan organisasi pekerja perikanan skala kecil dalam inisiatif pengelolaan bersama perikanan. Namun, saat berbicara dengan pekerja perikanan tentang kekhawatiran dan motivasi mereka, banyak yang merujuk pada bagaimana mereka mengorganisasikan diri untuk

mengatasi masalah keamanan manusia. Pekerja perikanan skala kecil telah lama menghadapi risiko kematian akibat terbalik dan tenggelam, tetapi bahaya ini telah berlipat ganda karena badai menjadi lebih kuat dan persewaan ikan yang menipis mengharuskan pekerja perikanan untuk melaut lebih jauh. Selain itu, pekerja perikanan Meksiko dan Ekuador melaporkan kegiatan kriminal dan kekerasan di perairan serta kurangnya pengawasan pemerintah. Bahaya ini telah mendorong pekerja perikanan untuk bergabung atau membangun jaringan dukungan terorganisasi yang mampu memobilisasi operasi penyelamatan. Keamanan pangan dan mata pencaharian juga memotivasi pengorganisasian baru di Ghana, tempat penduduk sangat bergantung pada makanan laut sebagai sumber protein dan puluhan ribu pekerja perikanan kano dan pengolah ikan memperoleh pendapatan subsisten. Setiap ancaman terhadap pendapatan mereka merupakan motivator yang signifikan untuk mengorganisasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah.

Budaya dan identitas. Meskipun budaya dan identitas merupakan karakteristik yang tidak sepenuhnya berwujud, keduanya sangat penting untuk membangun persatuan. Hal ini khususnya lazim di kalangan pekerja perikanan tradisional di Amerika Latin dan Afrika, dimana menangkap ikan sudah menjadi bagian budaya. Di Ghana, organisasi nelayan kano tertua, GNCFC, dipimpin oleh kepala nelayan yang mengidentifikasi diri sebagai kepala pekerja perikanan meskipun mereka hampir tidak atau tidak lagi aktif menangkap ikan. Dengan demikian, pekerja perikanan tradisional mungkin termotivasi untuk bergabung dengan organisasi tidak hanya untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, tetapi juga untuk mempertahankan cara hidup yang bersifat turun-temurun dan yang mereka gambarkan sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Lebih lanjut, di luar budaya masyarakat pesisir yang sudah mengakar, wawancara dengan para penyelenggara organisasi mengungkapkan bagaimana pengorganisasian menumbuhkan rasa memiliki di antara para pekerja perikanan. Hal ini terwujud saat para pekerja perikanan mengambil risiko untuk saling meminta dan saling menawarkan bantuan (Hartough dan Gearhart 2024). Membangkitkan identitas kolektif juga merupakan sesuatu yang diisyaratkan oleh SAKTI-SULUT dan SBMI, yang keduanya mengandalkan jaringan mantan AKP migran untuk menjangkau dan mendukung calon AKP migran. Di Taiwan, FOSPI dimulai sebagai jaringan klub dari sesama “kampung halaman”, membantu para pekerja perikanan membuat hubungan yang bermakna dan berfungsi sebagai dasar penting untuk membentuk serikat pekerja (PMFU) dan mengartikulasikan tuntutan pekerja perikanan akan Wi-Fi di laut.

Sumber daya. Memiliki waktu dan sumber daya yang memadai sangat penting untuk membangun organisasi pekerja perikanan yang solid, tetapi dana bisa jadi sulit untuk dikumpulkan ketika mayoritas pekerja perikanan mendapatkan upah yang masih rendah atau hidup dalam jeratan utang. Sebagian besar serikat AKP migran yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka tidak memungut iuran, yang khususnya sulit jika pekerja perikanan tidak menerima upah mereka secara teratur, yang merupakan kejadian umum di perikanan laut lepas (DWF). Beberapa serikat melaporkan bahwa mereka berusaha untuk mengumpulkan dana melalui cara lain, seperti koperasi konsumen SBMI atau biaya pelatihan SPPI. Bahkan SAKTI-SULUT, yang memang memungut iuran rutin, telah memasang iuran tersebut dengan jumlah yang digunakan untuk membiayai pertanggungjawaban medis (Hiburong dan Gearhart 2024).

Bagi para penyelenggara di ITF adalah hal yang penting memiliki struktur jaringan serikat pekerja yang kuat di antara para pelaut yang pekerjaannya terstruktur secara lebih formal, dengan upah yang ditentukan lewat perundingan kolektif. Pengorganisasian serikat pekerja di bidang perikanan berkembang pesat di Thailand ketika ITF memutuskan untuk menginvestasikan sumber daya dalam mengorganisasi AKP migran, sebuah kelompok yang sebagian besar dianggap sebagai tenaga kerja yang belum terorganisasi (Hartough dan Gearhart 2024). Seiring dengan semakin meningkatnya kerja sama ITF dengan FRN, mereka juga telah berhasil mendapatkan sumber daya dari ILO untuk mendukung dan memperluas jangkauan mereka di Thailand dan Indonesia. Namun, tidak seperti organisasi yang lebih kecil, ITF dapat terhindar dari ketergantungan pada pendanaan luar karena ukurannya dan dukungan dari para anggotanya. Agar berhasil, organisasi pekerja perikanan nasional perlu membangun struktur yang demokratis, mandiri, dan dapat membiayai sendiri, yang memungkinkan mereka mempertahankan dukungan dan mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya.



Anggota perempuan dari Koperasi Perikanan Guadalupe dan CONMECOOP.

Kredit: Judy Gearhart

Para penyelenggara usaha perikanan tradisional juga menyebutkan pentingnya pendanaan dari luar dan strategi pembiayaan mandiri. Koperasi terkuat di Meksiko adalah koperasi yang bergerak di bidang produk kelas atas seperti udang dan lobster, khususnya di Meksiko barat laut. Koperasi yang terorganisasi dengan baik cenderung memastikan anggotanya menjual tangkapan ikan melalui koperasi, sehingga menyumbangkan dana untuk memungkinkan koperasi mendirikan kantor dan menyediakan layanan dukungan yang dibutuhkan anggotanya. Jadi, ketika produk memiliki margin pendapatan yang rendah, pekerja perikanan kesulitan untuk menolak tawaran yang sedikit lebih baik.⁷ Koperasi di Meksiko telah membangun aliansi dengan LSM seputar tema peningkatan kapasitas, promosi legislasi, pengelolaan sumber daya, dan kooperativisme. Dalam kasus CONMECOOP, hal ini memungkinkan anggotanya untuk mengakses dukungan di area yang mereka butuhkan. Hal ini telah menjadi strategi kolaborasi penting bagi organisasi nonpemerintah dan koperasi yang berpartisipasi. CONMECOOP, misalnya, melihatnya sebagai sarana untuk memperkuat struktur organisasi anggotanya, yang juga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan mandiri mereka. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa setelah para ahli menyelesaikan pelatihan, inisiatif ini masih mengharuskan pekerja perikanan tradisional untuk menginvestasikan sumber daya mereka sendiri. Koperasi berpartisipasi dalam inspeksi dan kontrol wilayah mereka dan di area yang dilindungi seperti tempat perlindungan

ikan melalui pembentukan inspeksi dan pengawasan masyarakat, yang berkoordinasi dengan otoritas terkait.⁸ Seperti yang telah disebutkan, pekerja perikanan sering kali perlu membiayai bahan bakar dan mengatur para pekerja perikanan untuk melakukan pekerjaan pengawasan tersebut.

Sumber daya tambahan diperlukan untuk mendukung pengorganisasian di antara pekerja perikanan yang terlilit hutang atau pekerja perikanan yang pendapatannya masih rendah. Namun, pendanaan luar untuk pengorganisasian pekerja perikanan juga berisiko menciptakan ketergantungan finansial atau mengorbankan independensi organisasi berbasis konstituen ini. Yang pasti, ada risiko pendanaan turun drastis, tetapi itu tampaknya menjadi argumen yang lemah untuk tidak memperluas pendanaan ke kelompok-kelompok ini. Kekhawatiran yang lebih besar adalah jika pendanaan luar menyebabkan pergeseran prioritas, menjauh dari tuntutan langsung pekerja perikanan. Terakhir, ada kekhawatiran bahwa pendanaan luar dapat menciptakan persaingan antara kelompok berbasis konstituen, sehingga lebih sulit untuk membangun gerakan yang bersatu. Beberapa orang yang diwawancarai menyarankan pendanaan harus dikelola secara transparan dan tidak lebih dari seperempat anggaran organisasi. Singkatnya, kelompok berbasis konstituen dapat memperoleh manfaat dari pendanaan luar, tetapi mereka perlu mengelolanya secara strategis.

4.2.2 Bagaimana masyarakat internasional dapat mendukung pengorganisasian?

Sebagian besar organisasi pekerja perikanan yang diwawancarai menggambarkan strategi mereka dalam hal upaya mereka untuk membuat pemerintah mereka melakukan reformasi dan/atau menegakkan hukum. Jadi, peran apa yang dapat dimainkan oleh kampanye internasional dalam memperkuat organisasi pekerja perikanan? Tiga strategi—tekanan perdagangan, kampanye perusahaan, dan advokasi bersama—telah digunakan dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Namun, kunci reformasi yang efektif adalah apakah organisasi pekerja perikanan lokal terlibat dalam menuntut dan memantau implementasinya. Hal ini lebih mungkin terjadi ketika reformasi merupakan hasil dari kampanye yang dibangun dan diadvokasi bersama.

Tekanan perdagangan terhadap negara-negara pengekspor telah membantu mendorong reformasi kebijakan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 7, yang menggambarkan bagaimana tekanan perdagangan sering kali bertepatan dengan ratifikasi perjanjian. Salah satu contohnya adalah sistem Uni Eropa, yang mengeluarkan kartu peringatan kuning dan kemudian kartu merah untuk memicu sanksi perdagangan yang dapat membatasi akses ke pasar Uni Eropa, memberi insentif bagi reformasi untuk mencegah IUU. Contoh lain termasuk Laporan Perdagangan Manusia AS, yang memberi peringkat upaya negara-negara untuk menghentikan perdagangan manusia, dan Bagian 307 dari Undang-Undang Tarif AS, yang memberi wewenang kepada CBP untuk mengeluarkan WRO (withhold, release, order), guna menghentikan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa, seperti yang dilakukan terhadap empat kapal Taiwan.

Tekanan perdagangan memang kuat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan jika tidak disertai dengan dialog sosial yang kuat dan pelaku lokal yang mampu meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dan pengusaha. Thailand dan Ghana memberikan contoh yang kontras.

- **Thailand.** Berbagai kebijakan perdagangan Uni Eropa dan AS digunakan untuk menekan Thailand agar memberlakukan reformasi pada pertengahan tahun 2010-an, termasuk ratifikasi PSMA dan ILO C 188, serta pendirian stasiun inspeksi PIPO. Sayangnya, implementasi reformasi ini lemah, dan pemilik kapal mendorong agar beberapa kebijakan tersebut dicabut (EJF 2023).

- **Ghana.** Menghadapi kartu kuning kedua, pemerintah Ghana bergerak cepat untuk melarang perdagangan hasil tangkapan sampingan (*saiko*) dan memperketat kontrol terhadap kapal pukat dan pekerja perikanan kano. Beberapa pekerja perikanan dan pemilik kapal mengkritik peraturan baru tersebut, dan beberapa pekerja perikanan tradisional yang diwawancarai mengkritik kurangnya konsultasi sebelum putusan tersebut. Namun, ada dua inisiatif yang dapat membantu meredakan ketegangan ini jika dapat dipertahankan. pekerja perikanan telah berpartisipasi dalam inisiatif yang disponsori USAID dalam pengelolaan bersama perikanan, dan negara tersebut baru-baru ini bergabung dengan FiTI, yang seharusnya meningkatkan transparansi dan dialog di sektor tersebut. Selain itu, ILO telah memfasilitasi proses dialog sosial untuk mengevaluasi C 188, yang menghasilkan ratifikasinya baru-baru ini. Meski masih terlalu dini, tetapi penyelenggara pekerja perikanan sangat antusias dengan C 188 dan ada harapan bahwa dialog sosial, jika dilanjutkan, berpotensi untuk meningkatkan atau mempertahankan implementasi. Saat laporan ini dicetak, Presiden Ghana yang baru terpilih John Mahama telah mulai membalikkan (membatalkan) beberapa kebijakan, termasuk pengecualian bagi pekerja perikanan tradisional dari aturan terkait musim penangkapan ikan tertutup.

Tabel 7. Perjanjian Utama dan Tekanan Eksternal

Negara	Konvensi ILO Nomor 188	PSMA	Tekanan perdagangan
Ekuador	–	Diratifikasi 2019	Kartu kuning Uni Eropa 2019–sekarang
Ghana	Diratifikasi Agustus 2024	Diratifikasi 2016	Kartu kuning Uni Eropa: 2013–15; 2021–sekarang
Indonesia	Meninjau	Diratifikasi 2016	–
Meksiko	–	Diratifikasi 2023	Banyaknya embargo terhadap tuna dan udang
Taiwan	Implementasi pada prinsipnya	Implementasi pada prinsipnya	Kartu kuning Uni Eropa 2015–19; Undang-Undang Tarif (4 WRO)
Thailand	Diratifikasi Januari 2019	Diratifikasi 2016	Kartu kuning Uni Eropa: April 2015–Januari 2019; status perdagangan preferensial AS dicabut pada tahun 2019

Tekanan pasar internasional dapat menjadi alat yang penting, dan sebagian besar pembeli dan pengecer global telah berkomitmen secara terbuka untuk menegakkan konvensi inti ILO tentang hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Selain itu, undang-undang uji tuntas wajib yang baru di Eropa meningkatkan tekanan pada TNC untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kerja paksa dalam rantai pasokan mereka. Namun, insentif pasar internasional dari pembeli dan pengecer memengaruhi pengorganisasian pekerja perikanan di setiap negara secara sedikit berbeda, tergantung pada pentingnya ekspor boga bahari negara tersebut dan keterlibatan dengan komunitas internasional.

Di sektor industri yang sangat terkenal seperti Thailand dan Taiwan, organisasi pekerja perikanan telah mampu memanfaatkan tekanan pada pelaku pasar untuk memajukan reformasi industri. Di Thailand, industri membentuk Seafood Task Force sebagai respons terhadap kampanye internasional, dengan kepemimpinan dari pengecer seperti Costco dan Walmart dan produsen makanan laut besar seperti Thai Union dan CP Foods. Mereka membuat pernyataan yang mendorong reformasi kebijakan pro- pekerja perikanan tetapi tidak menyediakan pembiayaan (selain beberapa latihan percontohan) untuk membantu pemilik kapal melakukan perbaikan, dan pemilik kapal sekarang menolak. Di Taiwan, kampanye internasional untuk Wi-Fi di kapal perikanan laut lepas (DWF) telah dipimpin oleh kelompok pekerja perikanan di Taiwan dan telah mengambil pendekatan terpadu yang melibatkan reformasi kebijakan pemerintah, sementara juga mengajukan tuntutan kepada pemilik kapal dan rantai distribusinya. Ini adalah contoh dari kampanye advokasi bersama. Ini dimulai dengan tuntutan dari organisasi pekerja perikanan dan kemudian mendefinisikan tujuan advokasi kebijakan tingkat nasional dan tekanan bagi perusahaan transnasional (TNC) untuk bertindak.

Namun, di luar Thailand dan Taiwan, tekanan pasar internasional bahkan tidak terlalu berperan. Di empat negara lainnya, pembeli dan rantai distribusi internasional memiliki hubungan yang cukup jauh dari pekerja perikanan dan organisasinya. Meksiko dan Indonesia memberikan dua contoh yang sangat jelas tentang bagaimana ketidakterbukaan rantai pasokan makanan laut membuat tekanan pasar internasional sulit dimanfaatkan untuk mendukung pengorganisasian pekerja perikanan.



Nelayan bekerja di atas kapal, Thailand.

Kredit: Environmental Justice Foundation

- **Di Meksiko**, lembaga sertifikasi besar seperti Fair Trade dan Marine Stewardship Council (MSC) hadir dan 37 proyek peningkatan perikanan tersebar di pesisir pantai (García-Rodríguez dkk. 2024) Prakarsa-prakarsa ini membantu mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih baik, tetapi hanya sedikit yang memungkinkan koperasi pekerja perikanan bernegosiasi langsung dengan pembeli akhir dan retail.⁹ Proyek-proyek ini telah meningkatkan stok ikan, namun pekerja perikanan seringkali menanggung konsekuensinya (López-Ercilla dkk. 2024).
- **Di Indonesia**, serikat pekerja perikanan berupaya untuk mengatur agen perekrutan Indonesia dengan lebih baik, tetapi keterlibatannya dengan pemberi kerja langsung masih terbatas. Agen perekrutan Indonesia menghubungkan pekerja perikanan dengan agen perekrutan internasional, yang kemudian menugaskan pekerja perikanan ke kapal internasional (Palmer, Ford, dan Hasbiyalloh 2023). Para pekerja perikanan mengatakan mereka sering tidak tahu sampai mendekati hari keberangkatan, terkait dengan bendera mana mereka berlayar. Kurangnya transparansi dalam perekrutan dikombinasikan dengan kurangnya transparansi dalam rantai pasokan boga bahari membuat sulit untuk meminta pertanggungjawaban pembeli dan rantai distribusinya.

Kampanye advokasi internasional dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan organisasi pekerja perikanan dengan pengaruhnya terhadap perdagangan atau pasar. Namun pelajaran yang dirangkum di atas menyoroti keterbatasan pendekatan ini dan kebutuhan untuk menyeimbangkannya dengan pengorganisasian di lapangan. Kampanye advokasi bersama dapat dibangun bersama sehingga organisasi pekerja perikanan nasional dapat bekerja menuju agenda terpadu yang membantu membangun gerakan pekerja makanan laut. Idealnya ini dimulai dari prioritas advokasi organisasi pekerja perikanan nasional dan kemudian dimasukkan ke dalam kampanye internasional. Seperti disebutkan di atas, kampanye *Wi-Fi Now for Fishers' Rights at Sea* menggabungkan target TNC dengan advokasi kebijakan nasional. Di Ghana, dialog yang difasilitasi ILO seputar C 188 dapat membantu organisasi pekerja perikanan membangun persatuan dan memperkuat efektivitas reformasi terkait apa pun. Di Indonesia, kampanye advokasi baru untuk C 188 sedang berlangsung, yang mempertemukan dua LSM internasional dan tujuh LSM dan serikat pekerja dari Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 C 188, bagian penting dari upaya memajukan peninjauan dan potensi ratifikasi C 188 di Indonesia adalah menentukan bagaimana lembaga pemerintah terkait berkoordinasi, yang dapat membantu mengatasi kurangnya koordinasi antar kementerian. Kampanye yang disusun bersama untuk C 188 dapat meningkatkan dukungan bagi kepemimpinan serikat pekerja perikanan dalam hubungannya dengan perwakilan pemerintah dan pengusaha.

5. Kesimpulan

Ada empat poin utama yang perlu disoroti, untuk membentuk strategi yang lebih berkelanjutan dalam memperkuat organisasi pekerja perikanan. Poin-poin ini disusun dengan tujuan mendukung pembentukan organisasi yang dipimpin pekerja perikanan dan kemampuan mereka untuk membangun kekuatan serta memengaruhi kebijakan pemerintah dan pengusaha.

5.1 Diperlukan gerakan global untuk para pekerja perikanan

Di semua negara yang diulas pada makalah ini, terdapat inisiatif-inisiatif baru dalam pengorganisasian. Baik dalam bentuk asosiasi, koperasi, atau serikat pekerja, semuanya berupaya untuk mengadvokasi hak dan kesejahteraan pekerja perikanan. Langkah penting berikutnya adalah menambah jumlah anggota, baik anggota langsung maupun dengan membangun persatuan dengan organisasi pekerja lainnya. Hal ini khususnya berlaku bagi serikat pekerja ketika mereka berupaya bernegosiasi dengan pengusaha. Kekuatan serikat pekerja mulai menguat saat mereka memiliki banyak tempat kerja yang terorganisasi dan dapat memanfaatkan kemenangan organisasi sejawat untuk mendorong standar industri yang lebih tinggi. Kekuatan juga berasal dari jumlah pekerja yang sejalan mendukung tuntutan reformasi pemerintah dan industri, yang menunjukkan pentingnya membangun aliansi di seluruh industri. Kampanye ITF yang bernama *Global Justice for Fishers* (Keadilan Global untuk Pekerja Perikanan) telah menjadi perkembangan penting di sektor ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan berjejaring dengan FRN di Thailand, dan inisiatif yang muncul di Ekuador, Ghana, dan Indonesia. Sebagai federasi serikat pekerja global, ITF mengakui perlunya persatuan nasional, regional, dan global serta standar industri.

Kampanye yang didukung oleh para pelaku internasional dapat membantu mendorong persatuan dan kolaborasi yang lebih besar di antara organisasi pekerja perikanan, seperti yang membantu menggalang organisasi pekerja perikanan untuk mengadvokasi adopsi dan implementasi ILO C 188. Namun, hal ini perlu disertai dengan strategi dukungan berkelanjutan yang juga memungkinkan organisasi pekerja perikanan nasional untuk mengemukakan prioritas mereka sendiri dan mengidentifikasi bagaimana kampanye kesepakatan internasional akan membantu memajukan agenda mereka yang lebih luas. Ketika pemerintah didorong terlalu keras dan terlalu cepat oleh para pelaku eksternal untuk meratifikasi perjanjian internasional, ada risiko bahwa ratifikasi akan lebih banyak tentang *virtue signaling*, sekedar isyarat keinginan untuk berubah, namun bukanlah reformasi yang mengakar. Dalam kasus ini, implementasi dan transposisi perjanjian ke dalam hukum dan kebijakan nasional sering kali akan terhenti atau tidak efektif. Dalam kasus ILO C 188, Konvensi mengharuskan pemerintah yang meratifikasi untuk mengidentifikasi pihak yang berkoordinasi dan bertanggung jawab dalam pemerintah (C 188, Pasal 7). Agar hal ini terjadi, perlu ada proses peninjauan tripartit yang melaluinya pemerintah secara sistematis menganalisis dan merencanakan cara mengimplementasikan hasil Konvensi. Jika dialog sosial yang kuat terjalin sebelum ratifikasi, dialog tersebut berpotensi lebih besar untuk digunakan dalam menyelesaikan perbedaan di sepanjang proses implementasi. Gerakan organisasi pekerja perikanan yang lebih bersatu akan membantu memengaruhi proses ini.

5.2 Kebijakan yang tidak konsisten semakin melemahkan pengorganisasian pekerja perikanan

Kurangnya koherensi kebijakan yang teridentifikasi di setiap negara menciptakan “*blame game*” atau saling menyalahkan antar kementerian, dan solusi yang diusulkan telah mencakup inspeksi antar lembaga yang menyeluruh. Inspeksi terpadu berpotensi untuk meningkatkan pengelolaan perikanan dan perlindungan pekerja perikanan serta meningkatkan pengawasan Kementerian Tenaga Kerja di sektor tersebut. Namun, inisiatif ini berisiko menciptakan birokrasi yang tidak efektif sekaligus mengaburkan prihal kurangnya perlindungan bagi AKP migran dalam berorganisasi dan berunding. Agar perlindungan pemerintah berhasil, organisasi pekerja perikanan harus kuat dan mampu mengajukan kasus ke pengadilan. Namun, semakin banyak inkohereni kebijakan telah membuat proses itu sulit dinavigasi, semakin besar beban yang ditanggung organisasi pekerja yang kekurangan sumber daya.



Don Melesio, Presiden Koperasi Perikanan Guadalupe, Oaxaca, Meksiko, mendayung melalui hutan bakau yang mereka bantu lestarkan.

Kredit: Judy Gearhart

Kurangnya koherensi kebijakan terlihat baik di tingkat nasional, maupun lokal dalam kasus-kasus ketidakjelasan jam kerja atau penetapan upah, maupun kementerian mana yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan atau memproses keluhan pekerja. Thailand dan Indonesia telah berupaya mengatasi sebagian konflik ini dengan menyelenggarakan inspeksi bersama, dengan mempertemukan perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja, Transportasi, serta Perikanan. Namun di Thailand, yang telah menjalankan upaya ini selama beberapa tahun, jumlah pelanggaran tempat kerja yang ditemukan dari sejumlah inspeksi yang dilakukan memberikan alasan untuk meragukan efektivitas inspeksi ini. ITF, yang memiliki jaringan inspektur kapal secara global, bernegosiasi dengan dukungan dari Program ILO, Ship to Shore untuk bergabung dengan beberapa inspeksi Thailand, tetapi setelah beberapa inspeksi, inspektur Thailand berhenti, dengan alasan bahwa mereka perlu meminta izin pemilik kapal (Hartough dan Gearhart 2024). Penolakan ini semakin merusak kepercayaan pekerja perikanan terhadap pemerintah, terutama mengingat pembatasan hak-hak mereka untuk berorganisasi di Thailand.

Kurangnya koordinasi ini juga terlihat di tingkat internasional, di mana kontradiksi muncul antara perjanjian-perjanjian penting seperti PSMA dari FAO dan C 188 dari ILO. PSMA (Pasal 9) menyerukan agar kapal ditolak dari pelabuhan jika Kementerian Perikanan mencurigai kapal tersebut terlibat dalam IUU, sementara penerapan C 188 akan lebih efektif jika kapal-kapal yang mencurigakan dibawa untuk diperiksa oleh para ahli dari Kementerian Tenaga Kerja. Para pelaku internasional perlu membantu mengurangi bagaimana kegagalan dalam mengatasi ketidakkonsistenan ini melanggengkan hambatan yang kompleks dan terkait terhadap pengorganisasian pekerja perikanan.

5.3 Memperkuat kepemimpinan pekerja perikanan membutuhkan sumber daya

Organisasi independen berbasis konstituen merupakan cara terbaik bagi pekerja perikanan untuk membangun suara kolektif mereka, tetapi ini memerlukan waktu dan sistem pendukung yang diperlukan untuk berkonsultasi dengan anggota dan mengidentifikasi posisi bersama. Pekerja perikanan yang mendapatkan upah rendah atau terjebak dalam jeratan utang kesulitan untuk membiayai kegiatan ini. Sumber daya eksternal dapat memainkan peran penting saat serikat pekerja berusaha dibangun, tetapi sumber daya tersebut perlu dikelola dengan cara yang mampu berkontribusi dan tidak melemahkan pembangunan basis atau kemampuan organisasi berbasis konstituen, sehingga mereka dapat didengar.

Tiga isu yang perlu dipertimbangkan oleh aktor eksternal ketika mendukung atau melibatkan organisasi pekerja perikanan meliputi risiko menciptakan ketergantungan, kebutuhan untuk menghindari jalan pintas untuk mendapatkan suara pekerja, dan pentingnya membangun kampanye bersama yang dibangun dari prioritas organisasi pekerja perikanan. Strategi pendanaan harus menghindari terciptanya ketergantungan finansial dan memastikan organisasi pekerja perikanan memiliki rencana jangka panjang untuk membangun mekanisme pembiayaan mandiri dan basis keanggotaan yang solid yang membangun solidaritas (belahan bumi) selatan-selatan, bukan hanya solidaritas utara-selatan. Pendana juga harus memandang dengan skeptis organisasi yang mengklaim mengumpulkan atau mewakili suara pekerja melalui pendekatan survei atau cara lain yang tidak mewakili basis keanggotaan. Terakhir, kampanye LSM internasional dan nasional harus mempertimbangkan cara membangun kampanye bersama yang menggabungkan prioritas berkelanjutan organisasi pekerja perikanan dan serikat pekerja. Ketika kampanye dicetuskan dari pihak luar atau tidak dibangun bersama secara efektif, mereka berisiko mengalihkan perhatian para pemimpin pekerja, dari pembangunan basis dan strategi sehari-hari. Hal tersebut perlu mereka lakukan dengan para anggotanya. Kampanye *Wi-Fi Now* untuk Hak Pekerja Perikanan di Laut merupakan contoh baik dari kampanye yang didukung secara internasional, berpegang pada prioritas para pekerja perikanan sebagai pengorganisir.

5.4 Instrumen pasar dan perdagangan internasional belum (menunjukkan hasil yang) selaras

Kampanye internasional yang memberikan tekanan perdagangan pada negara pengekspor. Hal tersebut dapat menjadi pemicu yang kuat untuk reformasi. Meskipun demikian, tekanan itu tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan implementasi yang efektif setelah kampanye berakhir. Reformasi berkelanjutan mengharuskan organisasi pekerja perikanan lokal untuk terus mencoba dan memanfaatkan mekanisme yang mampu melindungi hak dan kesejahteraan pekerja perikanan. Selain itu, sulit untuk membangun kampanye konsumen yang efektif, saat terjadi kurangnya transparansi rantai pasokan dan tantangan keterlacakan dalam industri boga Bahari. Hal ini diperparah oleh kurangnya transparansi seputar kontrak pekerja perikanan, khususnya AKP migran yang dipekerjakan oleh agen perekrutan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendampingan jangka panjang dan jaringan dukungan dari para aktor internasional. Lebih penting lagi adalah berdiskusi tentang perlunya memprioritaskan penguatan organisasi pekerja perikanan nasional dan gerakan pekerja di bidang Boga Bahari. Sehingga mereka mampu membangun kekuatan dan mengedepankan solusi yang dipimpin pekerja perikanan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Catatan

- 1 Laporan ini menjabarkan penangkapan ikan tradisional dan penangkapan ikan pesisir secara bergantian untuk membahas usaha kecil yang (sering kali) dioperasikan oleh pemilik, yang mencakup berbagai kegiatan penangkapan ikan, mulai dari penyelam skuba, hingga Pekerja Perikanan tradisional terkecil, hingga Pekerja Perikanan pesisir, yang mungkin mencakup kapal semi-industri. Laporan ini juga menggunakan penangkapan ikan industri dan penangkapan ikan perairan laut lepas (Distance Water Fishing / DWF) secara bergantian untuk menyoroti bagaimana serikat pekerja mengatur tenaga kerja tersebut. Meskipun tantangannya bisa lebih rumit dalam Perikanan Laut Lepas (DWF), karena kapal melintasi perairan internasional dan beberapa yurisdiksi hukum.
- 2 Roisai Wongsuban, wawancara penulis, 11 Juni 2024.
- 3 Wawancara dengan AKP migran Kamboja di Chonburi, Thailand, Agustus 2024.
- 4 Pengecualian ini kemudian juga memungkinkan perusahaan penangkap ikan tuna long-line AS untuk mempekerjakan warga negara non-AS tanpa harus mematuhi hukum ketenagakerjaan AS karena mereka bekerja 'di luar' perairan AS.
- 5 Sekitar US\$350 pada bulan Desember 2024.
- 6 Jose Luis Carrillo dan Lorena Ortiz (pemimpin CONMECOOP), wawancara oleh penulis, 10 Desember 2024.
- 7 Amy Hudson Weaver, wawancara oleh penulis, 21 November 2024.
- 8 Jose Luis Carillo, wawancara oleh penulis, 18 Oktober 2024.
- 9 Ada beberapa pengecualian, terutama di antara koperasi yang terorganisasi dengan baik di Baja California, yang juga menangkap ikan spesies berharga mahal.

Bibliografi

- American University CLALS (Center for Latin American & Latino Studies) and InSight Crime. 2022. "IUU Fishing Crimes in Latin America and the Caribbean." American University. *CLALS Working Paper* 39. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4200724>.
- Apetorgbor, Socrates. 2018. *Fisher-2-Fisher Consultation Initiative with GNCFC and NAFPTA*. US Agency for International Development/Ghana Sustainable Fisheries Management Project. Narragansett, RI: Coastal Resources Center, Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island. https://www.crc.uri.edu/download/GH2014_COM085_CRC_FIN508.pdf.
- Arif, Muhamad. 2023. "Empat Tahun Kebijakan Maritim Jokowi: Ocean for Sale." *Destructive Fishing Watch Indonesia*, November 1. <https://dfw.or.id/empat-tahun-kebijakan-maritim-jokowi-ocean-for-sale/>.
- Asiedu, Berchie, Seidu Iddrisu, dan Pierre Failler. 2023. "Yesterday, Today, and Tomorrow's Fish Consumption: Analysis of Present and Prospective Fish Consumption in Ghana by 2030." *Cogent Food & Agriculture* 9 (1): 2224603. <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2224603>.
- Associated Press. 2015. "AP Investigation: Slaves May Have Caught the Fish You Bought." Maret 25. <https://www.ap.org/news-highlights/seafood-from-slaves/2015/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought/>.
- Basurto, Xavier, Abigail Bennett, Emilie Lindkvist, dan Maja Schlüter. 2020. "Governing the Commons beyond Harvesting: An Empirical Illustration from Fishing." *PLOS ONE* 15 (4): e0231575. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231575>.
- Bennett, Abigail. 2017. "The Influence of Neoliberalization on the Success and Failure of Fishing Cooperatives in Contemporary Small-Scale Fishing Communities: A Case Study from Yucatán, Mexico." *Marine Policy* 80 (Juni): 96–106. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.024>.
- Brush, Austin, dan Mary Utermohlen. 2022. *Net Worth: How the Chinese Government & US Stock Investors Are Funding the Illegal Activities of a Major Chinese Fishery Company*. Washington, DC: C4ADS <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2022/04/NetWorth-Report.pdf>.
- Bukharin, Irina. 2020. "Who Can Combat Forced Labor at Sea?" C4ADS, Februari 20. <https://c4ads.org/commentary/forced-labor-at-sea/>.
- Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2023. *2023 Country Reports on Human Rights Practices: Ecuador*. Country Reports on Human Rights Practices. Washington, DC: US Department of State. <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ecuador/>.
- CBP (US Customs and Border Protection). 2024. "Withhold Release Orders and Findings Dashboard." December 5. <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>.
- CEA (California Environmental Associates) Consulting. 2018. *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A 2018 Review*. San Francisco: CEA Consulting. https://www.ceiconsulting.com/wp-content/uploads/Indonesia-Report-2018_Executive-Summary-compressed.pdf.

- Chiang, Mina, dan Kimberly Rogovin. 2020. "Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry & Local Advocacy for Reform." Global Labor Justice–International Labor Rights Forum. *Briefing Paper*. <https://laborrights.org/sites/default/files/publications/Labor-Abuse-in-Taiwan-Seafood-Industry-Local-Advocacy-for-Reform.pdf>.
- CIA (Central Intelligence Agency). 2024. "The World Factbook 2024." <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/taiwan/#geography>.
- CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca). 2023. *Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2023*. Mazatlán: CONAPESCA, Government of Mexico. https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2023/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2023.pdf.
- Decker Sparks, Jessica L., Lee Matthews, Daniel Cárdenas, dan Chris Williams. 2022. "Worker-Less Social Responsibility: How the Proliferation of Voluntary Labour Governance Tools in Seafood Marginalise the Workers They Claim to Protect." *Marine Policy* 139 (May):105044. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105044>.
- EJF (Environmental Justice Foundation). 2019. *Gender Analysis: Ghana's Artisanal Fisheries*. London: EJF. <https://ejfoundation.org/reports/gender-analysis-ghanas-artisanal-fisheries-2019>.
- EJF. 2020. *Illegal Fishing and Human Rights Abuses in the Taiwanese Fishing Fleet*. London: EJF. <https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF-Taiwanese-vessels-briefing-public-final.pdf>.
- EJF. 2023. *High and Dry: A Policy Briefing on the Future of Thai Fisheries*. London: EJF. <https://ejfoundation.org/reports/high-and-dry-a-policy-briefing-on-the-future-of-thai-fisheries>.
- European Commission. 2019. "Illegal fishing: EU lifts Taiwan's yellow card following reforms." Press Release, Juni 26. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3397.
- European Commission. 2021. "Fighting against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Commission Notifies the Republic of Ghana with a Yellow Card." Press Release, Juni 1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2745.
- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2016. "Fishery and Aquaculture Country Profiles: Ghana, 2016." Country Profile Fact Sheet. <https://www.fao.org/fishery/en/facp/gha?lang=en>.
- FAO. 2020. "Fishery and Aquaculture Country Profiles: Ecuador, 2020." Country Profile Fact Sheet. <https://www.fao.org/fishery/en/facp/ecu?lang=en>.
- FAO. 2024. "Fishery and Aquaculture Country Profiles: Mexico, 2023." Country Profile Fact Sheets. <https://www.fao.org/fishery/en/facp/mex?lang=en>.
- FAO. 2025a. "Global Production." Fisheries and Aquaculture https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_production?lang=en.
- FAO. 2025b. "Global Aquatic Trade Statistics." Fisheries and Aquaculture. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_commodity_prod.
- Finkbeiner, Elena M., Christopher Giordano, Juno Fitzpatrick, Ashley Apel, Cecilia Blasco, Kathryn H. Dalton, Juan Carlos Jerí, et al. 2024. "Insights from a Community of Practice: Integrating Human Rights in Fisheries Improvement." *Marine Policy* 163 (May):106100. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106100>.

- Fischer-Daly, Matthew, dan Mark Anner. *Worker Voice: A Literature Review*. Prepared for the US Department of Labor. University Park, PA: Center for Global Worker Rights, Pennsylvania State University. <https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/Worker-Voice-Literature-Review-3-6-24.pdf>.
- Fisheries Agency. 2023. "Fishery Statistics Annual Report for the 112th Year of the Republic of China." https://www.fa.gov.tw/view.php?theme=FS_AR&subtheme=&id=26.
- Ford, Michele, Benni Hasbiyalloh, dan Wayne Palmer. 2024. "Labour Rights in Indonesia's Seafood Sector." London: Freedom Fund. <https://www.freedomfund.org/news/labour-rights-indonesia-seafood/>.
- Frawley, Timothy H., Elena M. Finkbeiner, dan Larry B. Crowder. 2019. "Environmental and Institutional Degradation in the Globalized Economy: Lessons from Small-Scale Fisheries in the Gulf of California." *Ecology and Society* 24 (1): 7. <https://doi.org/10.5751/ES-10693-240107>.
- Freedom House. 2022. "Thailand: Transnational Repression Host Country Case Study." <https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/thailand>.
- FRN (Fishers' Rights Network) dan Judy Gearhart. 2024. "S2E2: Nguyen, Lin, dan Hok: Organizers with the Fishers' Rights Network." *Labor Link Podcast*, Maret 28. <https://www.laborlinkpodcast.org/s2e2-mario-nguyen-and-lin-organizers-with-the-fishers-rights-network/>.
- Garcia Lozano, Alejandro, Crisol Méndez-Medina, Xavier Basurto, dan María Tercero Tovar. 2023. "Problemáticas: Multi-scalar, Affective and Performative Politics of Collective Action among Fishing Cooperatives in Mexico." *Environment and Planning C: Politics and Space* 41 (7): 1263–81. <https://doi.org/10.1177/23996544231194426>.
- Garcia Lozano, Alejandro J., Jessica L. Decker Sparks, Davina P. Durgana, Courtney M. Farthing, Juno Fitzpatrick, Birgitte Krough-Poulsen, Gavin McDonald, Sara McDonald, Yoshitaka Ota, and Nicole Sarto. 2022. "Decent Work in Fisheries: Current Trends and Key Considerations for Future Research and Policy." *Marine Policy* 136 (Februari):104922. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104922>.
- Gearhart, Judy. 2023. "Building Worker Power in Global Supply Chains: Lessons from Apparel, Cocoa, and Seafood." *Accountability Working Paper* 15. Accountability Research Center <https://doi.org/10.57912/23931795>.
- Gokkon, Basten. 2023a. "Indonesia Delays Enforcement of Widely Panned Fisheries Policy." Mongabay, Desember 17. <https://news.mongabay.com/2023/12/indonesia-fisheries-quota-policy-sustainable-ministry-small-fishers/>.
- Gokkon, Basten. 2023b. "Indonesia Eyes Enrolling More Ports in Fight against Illegal Fishing." Mongabay, Juni 1. <https://news.mongabay.com/2023/06/indonesia-fisheries-ports-psma-iuu-illegal-fishing-sustainability/>.
- Guelker, Daphne. 2023. "Fishers and Seafarers in International Law: Really So Different?" *Marine Policy* 148 (Februari):105473. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105473>.
- Hartough, Jon, dan Judy Gearhart. 2024. "S2E1: Jon Hartough, Southeast Asia Regional Coordinator of the International Transport Workers' Federation (ITF)." *Labor Link Podcast*, Februari 28. <https://www.laborlinkpodcast.org/s2e1-jon-hartough-southeast-asia-regional-coordinator-of-the-international-transport-workers-fed/>.
- Hiburong, Arnon, dan Judy Gearhart. 2024. "S2E5: Arnon Hiburong, SAKTI-SULUT." *Labor Link Podcast*, Desember 4. <https://www.laborlinkpodcast.org/s2e5-arnon-hiburong-sakti-sulut/>.

- ILAB (Bureau of International Labor Affairs). 2024. "Success Stories: Strengthening Decent Work in the Fishing Sector in South America." US Department of Labor, November 21. <https://www.dol.gov/agencies/ilab/success-stories/strengthening-decent-work-fishing-sector-south-america>.
- IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative). 2022. "The Vicious Cycle of Working at Sea: A Strenuous Journey of Indonesian Migrant Fishers." Jakarta: IOJI. https://oceanjusticeinitiative.org/main/wp-content/uploads/2024/05/Siaran-Pers-IOJI-Penangkapan-Kapal-Run-Zeng-03-20_05_2024.pdf.
- IOJI. 2024. "Constitutional Court: Migrant Seafarers Are Indonesian Migrant Workers." Press Release, December 3. <https://oceanjusticeinitiative.org/en/press-release-constitutional-court-migrant-seafarers-are-indonesian-migrant-workers/>.
- Jentoft, Svein, dan Ratana Chuenpagdee. 2022. "Blue Justice in Three Governance Orders." In *Blue Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean Economy*, edited by Svein Jentoft, Ratana Chuenpagdee, Alicia Bugeja Said, and Moenieba Isaacs, 17–32. Cham, Switzerland: Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89624-9_2.
- Kadfak, Alin. 2024. "The Labor Governance Frontier in Fisheries: A Critical Review and Future Outlook." *Society & Natural Resources* 37 (12): 1710–21. <https://doi.org/10.1080/08941920.2024.2411689>.
- Kalikoski, Daniela C., Svein Jentoft, Patrick McConney, dan Susana Siar. 2019. "Empowering Small-Scale Fishers to Eradicate Rural Poverty." *Maritime Studies* 18 (Agustus): 121–25. <https://doi.org/10.1007/s40152-018-0112-x>.
- Kyaw, Aung, dan Judy Gearhart. 2024. "S1E4: Aung Kyaw, Co-founder of Thailand's Migrant Worker Rights Network." *Labor Link Podcast*, Februari 28. <https://empathymedialab.podbean.com/e/the-labor-link-aung-kyaw-co-founder-of-thailand-s-migrant-worker-rights-network/>.
- Lee, Johanna, dan Sahiba Gill. 2023. "Wi-Fi for Fishers' Fundamental Labor Rights." *Global Labor Justice. Briefing Paper* 3. <https://laborrights.org/publications/briefing-paper-no-3-wi-fi-fishers%E2%80%99-fundamental-labor-rights>.
- Liu, Wen-Hong, Po-Chih Hung, Peter Vandergeest, Azmath Jaleel, Bruno Ciceri, dan Chih-Cheng Lin. 2024. "Protecting Migrant Labor Rights in the Distant-Water Fisheries Sector: A Comparative Analysis of the Legal Framework of Three Major Fishing Nations in Eastern Asia." *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture* (Desember): 1–19. <https://doi.org/10.1080/23308249.2024.2436415>.
- López-Ercilla, Inés, Lorena Rocha-Tejeda, Stuart Fulton, Maria José Espinosa-Romero, Jorge Torre, dan Francisco J. Fernández Rivera-Melo. 2024. "Who Pays for Sustainability in the Small-Scale Fisheries in the Global South?" *Ecological Economics* 226 (Desember): 108350. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108350>.
- McDowell, Robin, dan Margie Mason. 2015. "The World's Third-Largest Seafood Exporter Has a Slavery Problem." *Business Insider*, Februari 26. <https://www.businessinsider.com/the-worlds-third-largest-seafood-exporter-has-a-slavery-problem-2015-2>.
- Migiro, Geoffrey. 2018. "Countries with the Largest Exclusive Economic Zones." *WorldAtlas*, Juni 29. <https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-exclusive-economic-zones.html>.
- Mills, Elyse N. 2021. "The Politics of Transnational Fishers' Movements." *Journal of Peasant Studies* 50 (2): 665–90. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1975271>.

- Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 2023. "El Presidente Guillermo Lasso anuncia la creación de las primeras 8 millas marítimas del Ecuador como Reserva Marina a lo largo del perfil costero continental." Bulletin 27, March 2. <https://www.ambiente.gob.ec/el-presidente-guillermo-lasso-anuncia-la-creacion-de-las-primeras-8-millas-maritimas-del-ecuador-como-reserva-marina-a-lo-largo-del-perfil-costero-continental/>.
- MMAF (Ministry of Marine Affairs and Fishing). 2023. "Data dan Statistik (database)." Republic of Indonesia. https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/jumlah_kapal/tbl-statis/d/54.
- Mochtar, Zulficar, Mohamad Abdi Suhufan, Felicia Estrelita Nugroho, dan Miftachul Choir. 2023. "The Precarity at the Sea: The Experience of the Domestic Fishery Vessel Workers in Indonesia." *Journal of Human Rights and Peace Studies* 9 (2): 158–85. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/272112>.
- MoFAD (Ministry of Fisheries and Aquaculture Development). 2022. "National Fisheries Management Plan." Accra: Government of Ghana. <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC223697>.
- Molinari, Christian. 2023. "2022 Was a Year of Contradictions for Ecuador's Shrimp Sector." SeafoodSource, February 27. <https://www.seafoodsource.com/news/premium/aquaculture/2022-was-a-year-of-contradictions-for-ecuador-s-shrimp-sector>.
- Monterey Bay Aquarium dan Sustainable Fisheries Partnership. 2022. Tropical Tuna Social Risk Profile: Forced Labor, Human Trafficking, and Hazardous Child Labor Risks Ecuador, Fishing and Production. Seafood Social Risk Tool V2. Monterey, CA: Monterey Bay Aquarium Foundation. <https://www.seafoodwatch.org/globalassets/sfw/pdf/projects/ssrt/risk-profiles/tropical-tuna/published/seafood-watch-tropical-tuna-ssrt-risk-profile-ecuador-2022.pdf>.
- MPCEIP (Ministerio de Produccion Comercio Exterior, Inversiones, y Pesca). 2025a. "Registro Nacional de Embarcaciones Artesanales." <https://srp.produccion.gob.ec/registro-nacional-de-embarcaciones/registro-nacional-de-embarcaciones-artesanales/>.
- MPCEIP. 2025b. "Registro Nacional de Embarcaciones Industriales." <https://srp.produccion.gob.ec/registro-nacional-de-embarcaciones/registro-nacional-de-embarcaciones-industriales-nuevo/>.
- MWG (Migrant Working Group). 2023. *Report on the Review of Compliance of Thailand's Labor Protection Laws in Fishing Worker with ILO Convention No.188 on Worker in Fishing*. MWG. <https://mwgthailand.org/en/press/1689209928>.
- Nakamura, Katrina. 2024. "Is Tuna Ecolabeling Causing Fishers More Harm than Good?" *npj Ocean Sustainability* 3 (39). <https://www.nature.com/articles/s44183-024-00074-6>.
- Nunoo, F.K.E., B. Asiedu, J. Olauson, dan G. Intsiful. 2015. "Achieving Sustainable Fisheries Management: A Critical Look at Traditional Fisheries Management in the Marine Artisanal Fisheries of Ghana, West Africa." *Journal of Energy and Natural Resource Management* 2 (1). <https://jenrm.uenr.edu.gh/index.php/uenrjournal/article/view/67>.
- Nyavor, Samuel, Sandra Amposah, Victor Owusu, dan Kwame John Boateng. 2023. "Compensation Payment for Fisherfolk during Closed-Season Fishing: Lessons from Small-Scale Fisherfolk in Ghana." *Cogent Social Sciences* 9 (2): 2282502. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2282502>.

- OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 2024. "Employment in Fisheries, Aquaculture, and Processing." OECD Data Explorer, March 8. [https://data-explorer.oecd.org/vis?fs\[0\]=Topic%2C1%7CAgriculture%20and%20fisheries%23AGR%23%7CFisheries%20and%20aquaculture%23AGR_FSA%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=6&df\[ds\]=dsDisseminateFinalDMZ&df\[id\]=DSDFISH_EMP%40DF_FISH_EMPL&df\[ag\]=OECD.TAD](https://data-explorer.oecd.org/vis?fs[0]=Topic%2C1%7CAgriculture%20and%20fisheries%23AGR%23%7CFisheries%20and%20aquaculture%23AGR_FSA%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=6&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSDFISH_EMP%40DF_FISH_EMPL&df[ag]=OECD.TAD).
- Osei, Awura-Abena Amoah, Seth Etuah, Isaac Abunyuwah, Nicholas Oppong Mensah, Robert Aidoo, dan Simon Cudjoe Fialor. 2024. "Nature and Performance of Smoked Marine Fish Markets: Evidence from Ghana." *Cogent Food & Agriculture* 10 (1): 2367376. <https://doi.org/10.1080/23311932.2024.2367376>.
- Palmer, Wayne, Michele Ford, dan Benni Hasbiyalloh. 2023. "Regulating Recruitment and Contracting of Migrant Fishers from Indonesia." *Asian and Pacific Migration Journal* 32 (3): 452–74. <https://doi.org/10.1177/01171968231210760>.
- Parhusip, Jonathan. 2023. "Emerging Port Infrastructure and Advocacy Networks for Migrant Fishers in Taiwan." *Asian and Pacific Migration Journal* 32 (2): 371–83. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/01171968231191468>.
- Ritchie, Hannah, dan Max Roser. 2024. "Fish and Overfishing." OurWorldinData.org. <https://ourworldindata.org/fish-and-overfishing>.
- Rosendahl, Roger W. 1984. "The Development of Mexican Fisheries and Its Effect on United States–Mexican Relations." *UCLA Pacific Basin Law Journal* 3 (1–2). <https://doi.org/10.5070/P831-2021911>.
- Sarpong, Gideon. 2023. "Empty Nets: Unveiling the Dark Reality Behind Ghana's 'People's Fish' Collapse." Pulitzer Center, November 27. <https://pulitzercenter.org/projects/empty-nets-unveiling-dark-reality-behind-ghanas-peoples-fish-collapse>.
- SEAFDEC. (Southeast Asian Fisheries Development Center). 2022 "Fisheries Country Profile: Thailand." Desember 9. <http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-thailand-2022/>.
- Siahaan, Mona. 2024. "Indonesia: Fisheries Contribution to GDP." Statista, Januari 22. <https://www.statista.com/statistics/1083946/indonesia-fisheries-contribution-to-gdp/>.
- Southern Shrimp Alliance. 2023. "A Crisis of Our Own Making: U.S.-Backed Development Funding of Foreign Shrimp Aquaculture Is Substantially Injuring the American Shrimp Industry." September 6. <https://shrimpalliance.com/southern-shrimp-alliance-report-details-how-international-development-funding-has-crashed-the-world-shrimp-market/>.
- Suwarno, Hariyanto, Charli Fritzner, dan Judy Gearhart. 2024. "S2E4: Hariyanto Suwarno (Indonesian Migrant Workers' Union) and Charli Fritzner (Greenpeace USA)." *Labor Link Podcast*, Juli 8. <https://www.laborlinkpodcast.org/s2e4-hariyanto-suwarno-serikat-buruh-migran-indonesia-sbmi-and-charli-fritzner-greenpeace-usa/>.
- Thammachote, Pasakorn, dan Jirapa Inthisang Trochim. 2023. "Thailand Seafood Trade Flow and Its Challenges." Innovation Lab for Food Security Policy, Research, Capacity and Influence, Juni 21. <https://www.canr.msu.edu/resources/thailand-seafood-trade-flow-and-its-challenges>.
- Urbina, Ian. 2015. "The Outlaw Ocean." *New York Times*, July 25. <https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/24/world/the-outlaw-ocean.html>.

- UNEP-WCMC (United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre). 2025a. "Protected Area Profile for Indonesia from the World Database on Protected Areas." <https://www.protectedplanet.net/country/IDN>.
- UNEP-WCMC. 2025b. "Protected Area Profile for Taiwan, Province of China from the World Database on Protected Areas." <https://www.protectedplanet.net/country/TWN>.
- UNEP-WCMC. 2025c. "Protected Area Profile for Thailand from the World Database on Protected Areas." <https://www.protectedplanet.net/country/THA>.
- UNEP-WCMC. 2025d. "Protected Area Profile for Ecuador from the World Database on Protected Areas." <https://www.protectedplanet.net/country/ECU>.
- UNEP-WCMC. 2025e. "Protected Area Profile for Ghana from the World Database on Protected Areas." <https://www.protectedplanet.net/country/GHA>.
- UNEP-WCMC. 2025f. "Protected Area Profile for Mexico from the World Database on Protected Areas." <https://www.protectedplanet.net/country/MEX>.
- Vandergaest, Peter. 2018. "Law and Lawlessness in Industrial Fishing: Frontiers in Regulating Labour Relations in Asia." *International Social Science Journal* 68 (229–30): 325–41. <https://doi.org/10.1111/issj.12195>.
- Vandergaest, Peter, Melissa Marschke, dan Mallory MacDonnell. 2021. "Seafarers in Fishing: A Year into the COVID-19 Pandemic." *Marine Policy* 134 (December): 104796. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104796>.
- Williams, Chris, dan Jessica L. Decker Sparks. 2023. "Fishery Improvement Projects: A Voluntary, Corporate 'Tool' Not Fit for the Purpose of Mitigating Labour Abuses and Guaranteeing Labour Rights for Workers." *Marine Policy* 147 (Januari): 105340. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105340>.
- Yang, Tsung-Yu, Hsing-Chun Lin, dan Wen-Hong Liu. 2022. "The Fishery Value Chain Analysis in Taiwan." *Fishes* 7 (3): 114. <https://doi.org/10.3390/fishes7030114>.

Publikasi ARC terkini

Publikasi ARC terkini

- Parra Bayona, Mauricio. 2024. "Tejiendo vínculos entre autoprotección y protección colectiva: la experiencia de ACADESAN en Colombia." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 18*.
- Fox, Jonathan, Brendan Halloran, Alta Fölscher, dan Rosie McGee. 2024. "Disentangling Government Responses: How Do We Know When Accountability Work Is Gaining Traction?" Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 17*.
- Abhishek, Shriyuta, dan Samir Garg. 2023. "Community Health Workers as Rights Defenders: Exploring the Collective Identity of the Mitanins of Chhattisgarh, India." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 16*.
- Gearhart, Judy. 2023. "Building Worker Power in Global Supply Chains: Lessons from Apparel, Cocoa, and Seafood." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 15*.
- Shukla, Abhay, Shweta Marathe, Deepali Yakkundi, Trupti Malti, dan Jonathan Fox. 2023. "Activating Spaces, Scaling Up Voices: Community-Based Monitoring and Planning of Health Services in Maharashtra, India." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 14*.
- Gearhart, Judy. 2023. "Local Voices, Global Action: Transnational Organizing in Apparel Supply Chains." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 13*.
- Gebremedhin, Abrehet. 2023. "Moving on Up: Multilevel Monitoring and Advocacy for Health Rights." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 12*.

Catatan Akuntabilitas

- Freeman, Scott, Lani Inverarity, dan Megan Pearson. 2024. "After the Agreement: Implementing Remedy for Displacement in Northern Haiti." Accountability Research Center. *Accountability Note 14*.
- Parra Bayona, Mauricio, Elizabeth Barco Moreno, dan Jonathan Fox. 2024. "Collective Protection for Communities and Rights Defenders at Risk: Lessons from Grassroots Advocacy in Colombia." Accountability Research Center. *Accountability Note 13*.
- Fox, Jonathan, dan Carlos García Jiménez. 2023. "Farmer Movement Oversight and New Approaches to Government Agriculture Programs in Mexico." Accountability Research Center. *Accountability Note 12*.
- Quiñones Mendoza, Helmer Eduardo. 2022. "The Ethnic Chapter of Colombia's Peace Agreement Five Years On: An Independent Assessment." Accountability Research Center. *Accountability Note 11*.

Seluruh publikasi tersedia di: <http://accountabilityresearch.org/publications/>



American University
School of International Service
4400 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20016
www.accountabilityresearch.org